

**STUDI PENGEMBANGAN FUNGSI KAWASAN AGROPOLITAN
DALAM Mendukung KAPET MBAY
(STUDI KASUS : KAB. NAGEKEO PROVINSI NTT)**

SKRIPSI

Oleh

EMILIUS YUSTA GORE

NIM 45 11 042 082



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017**

**STUDI PENGEMBANGAN FUNGSI KAWASAN AGROPOLITAN
DALAM MENDUKUNG KAPET MBAY
(STUDI KASUS : KAB. NAGEKEO PROVINSI NTT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh

EMILIUS YUSTA GORE

NIM 45 11 042 082

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017**

**STUDI PENGEMBANGAN FUNGSI KAWASAN AGROPOLITAN
DALAM Mendukung KAPET MBAY
(STUDI KASUS : KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NTT)**

Disusun dan diajukan oleh

EMILIUS YUSTA GORE

4511042082

Menyetujui:

Pembimbing I

Ir. Rahmawati Rahman.,M.Si

NIDN: 07-0468-01

Pembimbing II

Rusneni,ST.M.Si

NIDN: 09-150386-02

Mengetahui

Dekan

Fakultas Teknik

Dr. Hamsina, ST., M.Si

NIDN : 09-240676-01

Ketua Jurusan

Perencanaan Wilayah dan Kota

Jufriadi, ST. M.Si

NIDN : 09-310168-02

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor : A.370/SK/FT/UNIBOS/IX/2017 pada tanggal 29 September 2017 tentang PANITIA DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, maka :

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 29 September 2017
Nama : Emilius Yusta Gore
Nomor Pokok : 45 11 042 082

Telah di terima dan disahkan panitia ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah di pertahankan dihadapan tim penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Ir. Rahmawati Rahman.,M.Si

Sekretaris : Rusneni,ST.M.Si

Anggota : Dr. Ir. Murshal Manaf, MT.

: Dr.Ir. Syafri, M.Si

Disahkan :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. Hamsina, ST.,M.Si
NIDN: 09-240676-01

Diketahui :

Ketua Jurusan
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Ir. Jufriadi, M.SP.
NIDN: 09-310168-02

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini:

Mahasiswa : Emilius Yusta Gore

Stambuk : 45 11 042 082

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan penggandaan tulisan atau hasil pikiran orang lain. Bila di kemudian hari terjadi atau ditemukan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 September 2017

Penulis

Emilus Yusta Gore

ABSTRAK

Emilius Yusta Gore, 2017 *“Studi Pengembangan Fungsi Kawasan Agropolitan Dalam Mendukung Kapet Mbay (Studi Kasus Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT)”*. Dibimbing oleh Rahmawati Rahman dan Rusneni.

Kabupaten nagekeo memiliki potensi sumberdaya alam dan lahan yang potensial untuk komoditi unggulan yang bernilai komersial, yaitu tanaman pangan dengan persentase sekitar 44,34%, lahan potensial untuk kegiatan budidaya pertanian sekitar 80% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo, serta 68,6% penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Penerapan konsep agropolitan merupakan tantangan sekaligus jawaban di tengah isu pembangunan yang berkaitan dengan masalah polarisasi desa-kota di negara-negara yang sedang berkembang.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengidentifikasi tingkat perkembangan desa-desa dan potensi sektor pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Menentukan Strategi dalam pengembangan Fungsi Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nagekeo.

Penelitian ini adalah **penelitian kuantitatif** dan **kualitatif** yang menggunakan metode survey langsung serta pemilihan data-data melalui proses Rasionalisasi. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan **analisis skalogram, Iq dan swot**.

Dalam studi ini kesimpulan utama yang dicapai adalah perkembangan desa-desa di Kabupaten Nagekeo sebagian besar masih tergolong rendah sekitar 67.25% dari seluruh wilayah desa, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan sektor basis utama atau primer di Kabupaten Nagekeo Sehingga strategi kedepannya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan serta mendorong industri pada KAPET Mbay di Kabupaten Nagekeo, menarik investor dalam pengembangan ekonomi di KAPET Mbay, meningkatkan persaingan masyarakat perdesaan dalam pengembangan pertanian, meningkatkan kualitas sarana dan infrastruktur penunjang, kualitas SDM masyarakat perdesaan, menguatkan kelembagaan pertanian dalam pengembangan ekonomi dalam iklim usaha serta meningkatkan persaingan masyarakat desa dalam pengembangan pertanian.

Kata Kunci: Pengembangan Wilayah, Agropolitan dan KAPET

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat tuntunan dan rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **STUDI PENGEMBANGAN FUNGSI KAWASAN AGROPOLITAN DALAM Mendukung KAPET MBAY (STUDI KASUS KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NTT).**

Karya ilmiah ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik (S1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

Musim dan waktu berganti begitu cepat memberikan banyak kisah, jawaban atas banyak pertanyaan, solusi untuk tiap ketakutan, kebersamaan di setiap sepi dan harapan di setiap pupus. Hingga kini tak terasa telah lebih dari empat tahun berlalu penyusun menekuni dan mendalami disiplin ilmu Planologi dengan begitu banyak suka duka dan tantangan, namun dengan tekad dan motivasi yang tertanam kuat dalam jiwa, berbagai dinamika tersebut dapat dilewati hingga penyusun dapat sampai pada tahap akhir studi ini.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penyusun menyadari bahwa begitu banyak bantuan dan dukungan moril, motivasi dan dan doa yang tinggi dari

berbagai pihak, oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, (Alm) Ayahanda Sirilus Meo dan Ibunda Ruth Nura , Kakak Ir, serta adik-adikku tersayang : Erik, Ica dan Venan serta keluarga besar terima kasih berlimpah untuk cinta abadi, doa, kepercayaan, dukungan dan harapan yang tak pernah berakhir.
2. Ibu **Ir. Hj. Rahmawati Rahman, M.Si**, selaku dosen pembimbing I I yang telah dengan keikhlasan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penyusun.
3. Ibu **Rusneini, ST.M.Si**, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penyusun serta memberikan masukan yang sangat bermanfaat.
4. Ibu **Dr. Hamsina, ST,.M.Si** selaku dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Bapak **Ir. Jufriadi., ST, MSP**, selaku ketua Program Studi PWK, Bapak **Ilham Yahya, ST, M.Sp IAP** selaku sekertaris Jurusan PWK, segenap dosen pengajar di Universitas Bosowa Makassar khususnya dosen pengajar di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, **Ibu Ros** selaku staf administrasi Jurusan PWK, terima kasih untuk kerja sama dan dukungan dalam membantu kelancaran administrasi penyusun.

5. Segenap SKPD terkait: BAPPEDA, KAPET Mbay, Dinas Pertanian, Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Nagekeo terima kasih atas bantuan berupa informasi dan data kepada penyusun.
6. Untuk Kakanda kakanda senior yang telah memberi masukan serta arahan, sahabat Ikbal, Engki, Prum, Baros, Rajd, Inong, Iwan, Ansar Mandala, Fahmi serta (alm) Nirwan serta semua teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan semuanya yang telah memberi masukan terima kasih telah banyak membantu selama penyusunan skripsi.
7. Untuk semua teman-teman Tercinta **Planologi angkatan 2011**. Suatu berkah yang luar biasa, ketika Tuhan mempertemukan dan menjadikan kita saudara dalam Plano '011, Terima kasih untuk kebersamaan dalam suka dan duka.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan keterbukaan, penyusun mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesuksesan karya-karya selanjutnya agar dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 27 April 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	11
1.4.2. Ruang Lingkup Materi.....	11
1.5. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Dasar Ruang dalam Sistem Wilayah.....	14
2.2. Wilayah Administratif-Politis atau Wilayah Geografis.....	16
2.3. Pengembangan Wilayah Khusus.....	16
2.3.1. Wilayah Perencanaan.....	16
2.3.2. Wilayah Homogen.....	17
2.4. Konsep Wilayah Nodal.....	18

2.5.	Pengembangan Wilayah Fungsional Menurut Sistem Perkotaan.....	20
2.5.1.	Konsep Pertumbuhan Kutub (<i>Growth Pole</i>).....	20
2.5.2.	Konsep Agropolitan.....	31
2.6.	Interaksi Spatial.....	28
2.7.	Komoditas/Sektor Unggulan.....	29
2.8.	Hierarki Wilayah.....	30
2.9.	Desa Pusat Pertumbuhan.....	31
2.10.	Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D).....	36
2.11.	Agropolitan Di Indonesia.....	40
2.12.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).....	41
2.13.	Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1.	Jenis Penelitian.....	46
3.2.	Lokasi Penelitian.....	47
3.3.	Variabel Penelitian.....	48
3.4.	Jenis Dan Sumber Data.....	48
3.4.1.	Jenis Data	48
3.4.2.	Sumber Data.....	48
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6.	Teknik Analisis Data.....	50
3.6.1.	Analisis Kuantitatif.....	50
3.6.2.	Analisis Deskriptif Kualitatif (Analisis SWOT).....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Nagekeo.....	63
4.1.1	Aspek Fisik Dasar Wilayah.....	64
4.1.2	Kependudukan.....	73
4.1.3	Potensi Sumber Daya Alam.....	79

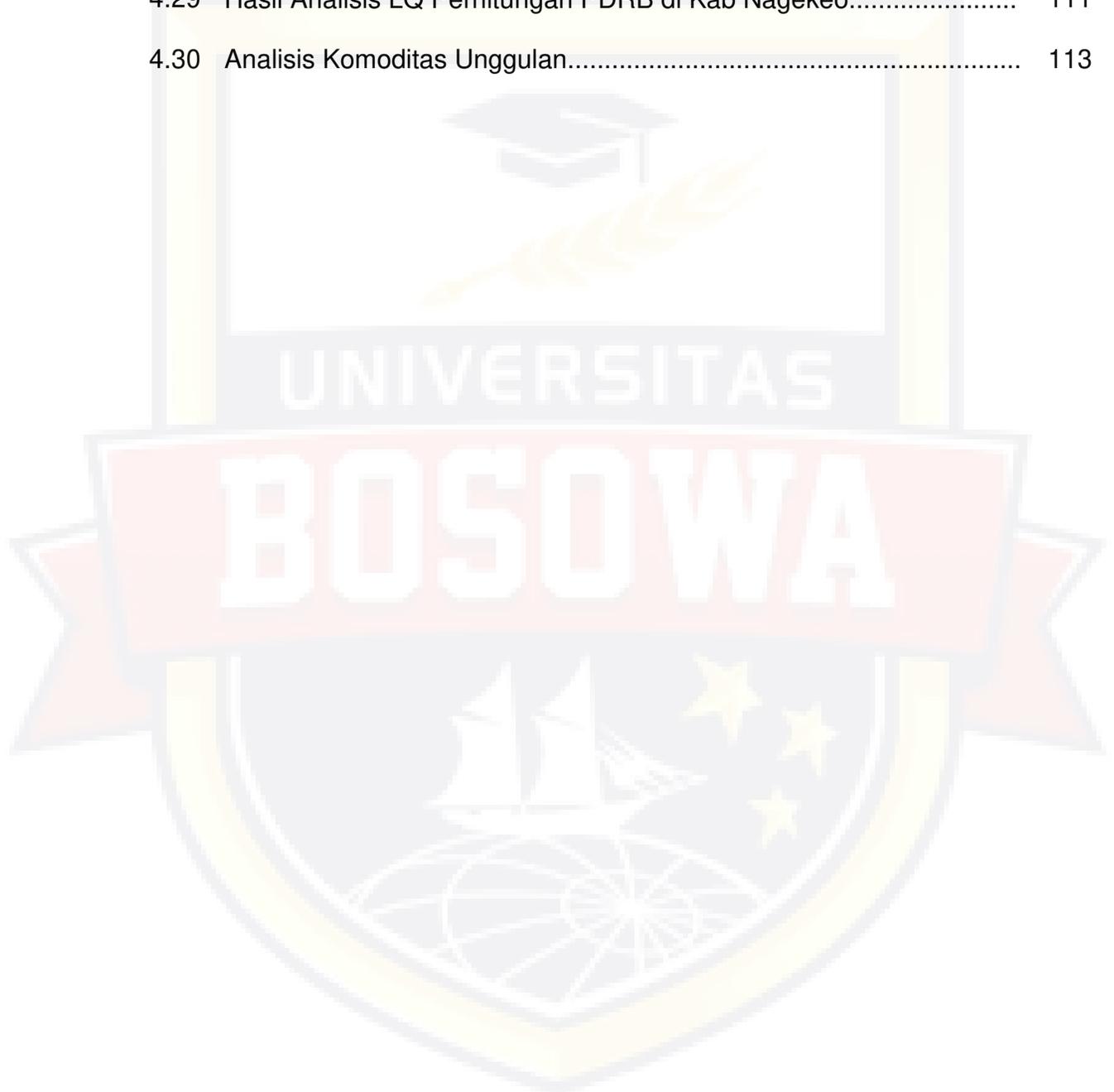
4.1.4 Sarana Prasarana Umum.....	91
4.2. Analisis dan Pembahasan.....	102
4.2.1 Hierarki Wilayah Berdasarkan Hasil Analisis Skalogram.....	102
4.2.2 Analisis Ekonomi Wilayah Kabupaten Nagekeo Berdasarkan Lapang Usaha (PDRB).....	111
4.2.3 Analisis Pemusatan Komoditas Pertanian Berdasarkan Hasil Panen/Produksi.....	112
4.2.4 Strategi dalam pengembangan Fungsi Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nagekeo.....	116
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Isu Strategis Kapet Mbay.....	7
2.1 Pengembangan Agropolitan.....	26
3.1 Nilai Selang Hirarki Pusat Pelayanan.....	52
4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Nagekeo.....	65
4.2 Elevasi Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2016.....	67
4.3 Curah Hujan Periode 2011-2015.....	70
4.4 Mata Air yang Telah Digunakan Sebagai Sumber Air Minum.....	71
4.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagekeo Periode 2011-2015.....	73
4.6 Kepadatan Penduduk.....	74
4.7 Prosentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016.....	75
4.8 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Nagekeo, Tahun 2016.....	76
4.9 Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Nagekeo, Tahun 2015.....	77
4.10 Pekerja Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nagekeo, Tahun 2015.....	79
4.11 Nilai dan Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo atas Dasar Harga Berlaku 2008 – 2012.....	80
4.12 Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo atas Dasar Harga Konstan 2008 – 2012.....	81

4.13	Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2008 – 2012.....	82
4.14	Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Perkecamatan Tahun 2012.....	83
4.15	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015.....	85
4.16	Luas Lahan Kering Fungsional Menurut Kecamatan Dan Jenis Penggunaan Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015.....	86
4.17	Sebaran Tanaman Holtikultura Menurut Kecamatan Dalam Jumlah Rumah Tangga dan Rumpun Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015.....	86
4.18	Sebaran Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015.....	88
4.19	Sebaran Hewan Ternak Menurut Kecamatan Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015.....	89
4.20	Sebaran Lahan Peruntukan Peternakan Menurut Kecamatan Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015.....	90
4.21	Penyebaran Sarana dan Prasarana Umum di Kab. Nagekeo.....	92
4.22	Panjang Jalan Menurut Fungsi Jalan.....	94
4.23	Kondisi Jalan di Kabupaten Nagekeo Berdasarkan RCI.....	95
4.24	Prosentase Kondisi Jalan di Kabupaten Nagekeo Berdasarkan RCI.....	97
4.25	Jenis Konstruksi Jalan di Kabupaten Nagekeo.....	98
4.26	Kombinasi Kondisi dan Jenis Konstruksi Jalan.....	99
4.27	Cakupan Pelayanan Air Bersih BLU-SPAM Kabupaten Nagekeo.....	101

4.28	Hasil Analisis Skalogram Perhitungan Nilai IPD.....	103
4.29	Hasil Analisis LQ Perhitungan PDRB di Kab Nagekeo.....	111
4.30	Analisis Komoditas Unggulan.....	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
2.1	Diagram Sub-sub Wilayah Inti dengan Berbagai Tingkat Hirarki Pada Wilayah Nodal (Rustiadiet <i>al.</i> , 2003).....	19
2.2	Skema keterkaitan desa dan kota.....	24
2.3	Model 1.....	30
2.4	Model 2.....	38
2.5	Model 3.....	38
2.6	Model 4.....	38
2.7	Model 5.....	39
2.8	Kerangka Pikir.....	45
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Nagekeo.....	64
4.2	Peta Topografi Kabupaten Nagekeo.....	66
4.3	Peta Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Nagekeo.....	96
4.4	Peta Tingkatan Hirarki Desa-desa di Kabupaten.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Hal
1	Variabel-variabel dalam analisis skalogram.....	131
2	Hasil perhitungan Analisis Skalogram.....	131
3	Perbandingan data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa ke Kecamatan dan ke Kabupaten.....	140
4	Data PDRB.....	143
5	Data dan Hasil Analisis LQ.....	144

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perkembangan wilayah perdesaan (*rural*) terinspirasi dari perkembangan pada wilayah perkotaan (*urban*) dimana wilayah perdesaan yang mempunyai sumber daya alam yang tersedia yaitu berbasis pertanian, hal ini memungkinkan dapat dikembangkan ekonomi perdesaan untuk mengoptimalkan hasil pertanian yang ada, sehingga resiko kerugian serta fluktuasi harga pertanian menjadi stabil yang berimbas pada peningkatan pendapat masyarakat perdesaan. Hal ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, tuntutan kepada masyarakat perdesaan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi pertanian yang ada, sehingga arus urbanisasi dari desa ke kota dapat diminimalisir. Sebagai salah satu cara dalam merencanakan suatu wilayah untuk mengembangkan potensi yang ada dimana sektor pertanian yang produktif, Agropolitan adalah salah satu konsep yang dapat dikembangkan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun

perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan (Rahardjo A., 2007).

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan telah mendorong upaya-upaya pembangunan di kawasan perdesaan. Meskipun demikian, pendekatan pengembangan kawasan perdesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya proses *urban bias* yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perdesaan malah berakibat sebaliknya yaitu tersedotnya potensi perdesaan ke perkotaan baik dari sisi sumber daya manusia, alam, bahkan modal (M. Douglas, 1989).

Konsep pembangunan suatu bangsa terkait erat dengan kesadaran yang terbentuk melalui pengalaman-pengalamannya yang sifatnya tidak statis atau dinamis. Dengan demikian, paradigma pembangunan dapat saja mengalami pergeseran, sementara paradigma-paradigma baru bermunculan menggantikannya. Pembangunan atau development adalah suatu kata yang mulai populer pada masa sesudah Perang Dunia II (Streeten, 1981 dalam Nurzaman, 2002). Pada saat itu, tingkat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product merupakan indikator yang sangat praktis yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat

perkembangan pembangunan. PDB terus diperbesar sampai titik tertentu melalui industrialisasi sehingga diharapkan proses pemerataan pembangunan akan berlangsung dengan sendirinya melalui proses yang sering dikenal dengan proses penetesan ke bawah (*Trickling Down Process*) ke wilayah serta golongan ekonomi yang kurang. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Pada kenyataannya banyak sekali peristiwa ketegangan sosial yang timbul dari masalah-masalah kesenjangan pendapatan, dan seringkali berakibat pada jatuhnya rejim-rejim pemerintahan yang berkuasa.

Hal seperti di atas terjadi, misalnya di India pada periode 1961-1966 secara tegas menyatakan bahwa konsep perkembangan yang dianut adalah konsep *industrial growth pole* (Mathur, 1979 dalam Nurzaman, 2002), atau yang biasa disebut juga sebagai pembangunan dari atas atau *development from above*. Konsep *growth pole* adalah konsep yang menekankan pada pembangunan industri '*leading*' di wilayah yang paling strategis (Mathur, 1978 dalam Nurzaman, 2002). Konsep *growth pole* cenderung menciptakan efek negatif yang dapat menurunkan keberlanjutan pembangunan. Perlombaan dalam peningkatan PDB dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan atau pengurasan besar-besaran (*massive backwash effect*) dari pedesaan ke perkotaan. Hal ini berakibat pada habisnya

sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan menurunnya kualitas sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.

Dengan mempertimbangkan sisi lain dari konsep di atas, tidak mengherankan apabila tumbuh alternatif lain dari konsep perkembangan, sebut saja paham pembangunan dari bawah (*development from below*). Konsep ini mengandalkan *participatory planning* terhadap sumberdaya dan keahlian setempat. Semua surplus wilayah dikembalikan lagi ke wilayah (atau negara) karena pada dasarnya persoalan pengembangan wilayah dapat diselesaikan melalui pendekatan ruang (spasial).

Salah satu bentuk dari *development from below* adalah konsep Agropolitan *development*. Suatu agropolitan district adalah suatu wilayah teritorial yang perekonomiannya dasarnya pertanian, dan mempunyai satu kota agropolis atau kota pertanian yang melayani seluruh keperluan serta merupakan pusat pengolahan hasil pertanian di agropolitan district. Sehingga pengembangan agropolitan merupakan pengembangan berbagai hal yang dapat memperkuat fungsi/peran ' agropolis' sebagai lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian. Tipologi pengembangan disesuaikan dengan karakteristik tipologi kawasan yang dilayaninya (Saefulhakim, 2004).. Kota tersebut berpenduduk sekitar 10.000-25.000 jiwa. Radius wilayah pelayanannya sekitar 5-10 km (1

jam naik sepeda), serta keseluruhan wilayah berpenduduk sekitar 50.000-150.000 jiwa. Satu hal yang penting adalah agropolitan district memiliki sistem pemerintahan yang berdiri sendiri dan terintegrasi (Friedman dan Douglas).

Karena DPP pada agropolitan direncanakan banyak (tidak hanya satu seperti pada Pertumbuhan Kutub), maka tempat/kota yang berkembang itu (agropolis) jumlahnya banyak di seluruh wilayah, sehingga perkembangan dan kemakmuran lebih merata. Pembangunan yang dipercepat ini perlu dilaksanakan dengan serius dengan mengintegrasikan semua sektor dan pihak-pihak terkait (*stakeholder*). Sektor pertanian telah terbukti merupakan salah satu sektor pembangunan yang mampu bertahan pada saat krisis meskipun tingkat kesejahteraan petani tidak meningkat setiap tahunnya. Pembangunan pertanian pedesaan yang strateginya didasarkan pada '*agro-based sustainable development*' memadukan (mensinergikan) pengembangan strategi agribisnis dengan pendekatan wilayah (spasial). Berarti, pembangunan akan dilaksanakan melalui Daerah Pusat Pertumbuhan (DPP) yang memasok hasil produksi pertanian (produk unggulan).

Salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang dikembangkan sebagai Kawasan Agropolitan adalah Kabupaten Nagekeo.

Daerah ini memiliki potensi sumberdaya alam dan lahan yang potensial untuk komoditi unggulannya yang bernilai komersial, yaitu tanaman pangan dengan persentase sekitar 44,34 % penyumbang terbesar dari seluruh nilai tambah pertanian. Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Nagekeo sangat potensial untuk kegiatan budidaya yaitu sekitar 80% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo atau sekitar 1416 km², serta sekitar 68,6% penduduknya mempunyai mata pencaharian yang berasal dari sektor pertanian. Kenyataan ini didukung pula oleh keadaan struktur perekonomian yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Indonesia merupakan kelanjutan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya pada Kawasan Andalan baik pada daerah-daerah Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), maupun pada Kawasan Tertinggal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari segi kepentingan ekonomi yaitu program pengembangan KAPET Mbay untuk dijadikan sebagai Daerah Pusat Pengembangan Ekonomi Terpadu Di Nusa Tenggara Timur secara khususnya, demikian Indonesia secara umumnya. Dalam menunjang KSN KAPET Mbay dari sektor pertanian yang menjadi

tolak ukur diambilnya agropolitan adalah fungsi kegiatan agribisnis perkebunan dan hortikultura serta peternakan, pusat pengolahan produk komoditas unggulan, pusat sarana-prasarana penunjang kegiatan agribisnis hulu. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi di kawasan tersebut, antara lain: posisi geografis yang sangat strategis di tengah Pulau Flores yang bisa diakomodasikan di interwilayah serta antarwilayah di Nusa Tenggara Timur serta kaya akan sumberdaya pertanian. Hal ini menjadikan Kabupaten Nagekeo harus dibenahi sebagai Kawasan Agropolitan yang bisa mendukung KAPET sendiri sebagai basis pengembangan Ekonomi Wilayah. Adapun permasalahan di KAPET Mbay yang dilihat dari beberapa aspek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 : Isu Strategis

ASPEK	STRATEGIS
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan sektor terkait arahan pengembangan cluster kawasan pertanian di KAPET Mbay 2. Kebijakan sektor terkait arahan pengembangan cluster kawasan perikanan di KAPET Mbay berupa perikanan tangkap dan industry garam 3. Kebijakan sektor terkait arahan pengembangan cluster kawasan pariwisata di KAPET Mbay berupa pariwisata alam dan budidaya
Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya pengembangan Bandara Surabaya II 2. Belum optimalnya fungsi pelabuhan di wilayah KAPET Mbay 3. Masih rendahnya aksesibilitas dari sentra-sentra produksi komoditi unggulan ke lokasi pelabuhan atau bandara
Kondisi Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. NTT umumnya dan KAPET Mbay khususnya merupakan wilayah geologi dengan resiko gempa dan tsunami tinggi. Hasil penelitian mengenai wilayah kegempaan di Indonesia

	<p>menunjukkan bahwa KAPET Mbay masuk dalam zona transisi antara zona bencana dan zona kerusakan yakni masuk skala kerawanan 5 (skala terendah 1 dan tertinggi 6).</p> <p>2. Mbay adalah salah satu kawasan pertanian lahan basah yang sangat potensial dengan sawah irigasi teknis seluas 3750 Ha. Oleh karena itu kota Mbay berperan sebagai lumbung beras bagi masyarakat Flores tetapi ketika kota Mbay berkembang sebagai Pusat Pemerintahan maka akan terjadi Konflik kepentingan antara konservasi lahan pertanian di satu sisi dengan tuntutan permintaah akan lahan permukiman dalam perkembangan kota pada sisi lain.</p>
Ekonomi	<p>1. Struktur perekonomian kota di Indonesia sesungguhnya masih bersifat dualistis dimana masyarakat agraris belum sepenuhnya berkembang menjadi masyarakat industri. Hal ini Nampak dalam struktur mata pencaharian penduduk kota Mbay dimana pekerja sektor pertanian masih mendominasi walaupun sector industri dan jasa juga perlahan tumbuh. Pada masa transisi dengan dualisme seperti ini akan tumbuh sektor informal secara mencolok.</p> <p>2. Sektor pertanian memberikan kontribusi pendapatan terbesar dalam pembentukan PDRB KAPET Mbay</p>
Daya Dukung	<p>1. Ancaman perubahan iklim terhadap produksi agrobisnis.</p> <p>2. Banyaknya lahan berstatus tanah ulayat atau tanah adat sehingga sulitnya pengelolaan lahan dalam penyiapan lahan untuk kawasan pengembangan budidaya.</p>
SDA	<p>1. Laju pertumbuhan wilayah KAPET Mbay selama delapan tahun adalah sebesar 2.302 % dengan laju pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mencapai angka 6.087 %, sedangkan di kecamatan Golewa Kabupaten Ngada merupakan kecamatan yang paling kecil angka pertumbuhan penduduknya yakni sebesar 0.59 %.</p> <p>2. Kepadatan penduduk rata-rata di KAPET Mbay pada tahun 2014 yakni 89 jiwa/km²</p> <p>3. Jumlah angkatan kerja tahun 2014 sebanyak 53% dari jumlah penduduk di KAPET Mbay</p> <p>4. Tingkat ketergantungan penduduk di KAPET Mbay sebesar 77%</p>

Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP KAPET Mbay tidak memiliki otoritas terhadap wilayah KAPET Mbay tetapi hanya sebatas memfasilitasi. 2. Hubungan dengan SKPD hanya sebatas melakukan koordinasi 3. Fenomena pembangunan dewasa ini ditandai dengan pergeseran peran pemerintah dari penyedia menjadi memampukan dan pergeseran peran dan tanggung jawab hirarkis dari pola top-down menjadi bottom-up.
--------------------	--

Sumber : Profil KSN Kapet Mbay

Berdasarkan uraian dan kenyataan sebagai mana dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perkembangan desa dengan judul **“Studi Pengembangan Fungsi Kawasan Agropolitan Dalam Mendukung KAPET Mbay (Studi kasus: Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi perkembangan desa-desa dan kondisi pertanian dalam mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nagekeo?
2. Bagaimana cara menentukan Strategi dalam pengembangan Fungsi Kawasan Agropolitan di wilayah di Kabupaten Nagekeo?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tingkat perkembangan desa-desa dan potensi sektor pertanian di Kabupaten Nagekeo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Menentukan Strategi dalam mengembangkan Fungsi Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nagekeo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat menjadi masukan dan referensi dalam pengembangan Kabupaten Nagekeo khususnya di sektor pertanian dalam menunjang pengembangan wilayah perdesaan dimasa yang akan datang.
- b. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Nagekeo dimasa yang akan datang.
- c. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, terutama menyangkut sumberdaya pertanian yang menjadikan wilayah Kabupaten

Nagekeo berbasis Agropolitan dalam menunjang KSN KAPET Mbay khususnya.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas arah dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas adapun lingkup batasan dalam penelitian ini meliputi;

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penulisan ini di fokuskan di seluruh wilayah perdesaan di Kabupaten Nagekeo.

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi;

- a. Menguraikan gambaran umum Kabupaten Nagekeo.
- b. Kajian terhadap Podes di Kabupaten Nagekeo.
- c. Kajian terhadap karakteristik desa-desa berdasarkan potensi dan sumberdaya alam wilayah Kabupaten Nagekeo itu sendiri.

1.5. Sistematika Pembahasan.

Sistematika dalam penulisan ini merupakan urutan-urutan dalam rangkaian penyusunan penulisan dengan tujuan agar pembaca mudah mengenal dan mengetahui bagian-bagian penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan tentang konsep dasar ruang dan sistem wilayah, wilayah administratif-politis atau wilayah geografis, pengembangan wilayah khusus, konsep wilayah nodal, pengembangan wilayah fungsional menurut sistem perkotaan, analisis tingkat perkembangan wilayah, interaksi spasial, komoditas/sector unggulan, hierarki wilayah, agropolitan di Indonesia, kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Nagekeo yang meliputi aspek fisik dasar, kependudukan, serta kondisi prasarana dan sarana. serta analisis dan pembahasan yang meliputi hierarki wilayah berdasarkan hasil analisis skalogram,

analisis ekonomi wilayah kabupaten nagekeo berdasarkan lapangan usaha (PDRB), analisis pemusatan komoditas pertanian berdasarkan hasil panen/produksi metode Iq, strategi pengembangan fungsi kawasan agropolitan di kabupaten nagekeo dengan analisis swot-quadran.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Ruang dalam Sistem Wilayah

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaan tidak tak terbatas (UU No.24 Tahun 1992) yang direvisi menjadi (UU No.26 Tahun 2007) oleh Dirjen Penataan Ruang, 2008. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan maka diperlukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan mencegah dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Ruang memiliki beberapa elemen atau unsur yang penting antara lain adalah: (i) jarak, (ii) lokasi, (iii) bentuk dan (iv) ukuran atau skala. Unsur-unsur ini secara bersamaan menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah (Hanafiah, 1982).

Wilayah adalah satuan geografis dengan batas-batas tertentu yang bagian-bagiannya saling bergantung secara internal (Nasoetion, 1988 dalam Syafrizal, 1990). Menurut Dusseldorp (1973) dalam Jayadinata (1999) dapat dibuat tiga macam wilayah pengembangan, yaitu : (a) menurut prinsip homogenitas atau uniformitas, yaitu wilayah geografi fisik/sosial, wilayah ekonomi, atau wilayah budaya; (b) menurut konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat ; dan (c) menurut wilayah yang khusus yaitu wilayah terbelakang, wilayah aliran sungai, wilayah pedesaan, dan sebagainya yang dikembangkan menurut prinsip uniformitas.

Analisis Ruang atau *Spatial Analysis* adalah bidang kajian yang menyangkut analisis berbagai fenomena spasial di alam, khususnya di atas permukaan bumi, termasuk fenomena- fenomena fisik dan sosial. Data yang melekat dengan posisi di permukaan bumi (data spasial atau *georeferenced data*) memiliki karakteristik 27 yang khusus karena sifat alamiahnya yang memiliki korelasi spasial (*spatial lintercorrelation*). Obyek-obyek atau kejadian-kejadian yang terdistribusi di dalam ruang cenderung tidak saling bebas, namun saat diterjemahkan dalam analisis-analisis statistika cenderung diasumsikan bersifat independen (saling bebas) untuk tujuan penyederhanaan (Rustiadi *et al.*, 2003).

2.2. Wilayah Administratif-Politis atau Wilayah Geografis

Wilayah administratif sering disebut sebagai wilayah otonomi yang termasuk perencanaan wilayah teritorial (formal). Artinya suatu wilayah yang dibatasi atas dasar kenyataan bahwa wilayah tersebut berada dalam batas-batas pengelolaan administrasi/ tatanan politik tertentu. Wilayah ini umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau suatu sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijakan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di dalamnya.

Pengembangan wilayah secara administratif atau secara geografis, misalnya pengembangan daerah Jawa Barat (Propinsi Jawa Barat), atau pengembangan wilayah geografis Jawa Barat (yang terdiri atas Propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta), dengan mengembangkan seluruh wilayah pedesaan dan perkotaannya. Hal itu termasuk perencanaan wilayah teritorial (formal).

2.3. Pengembangan Wilayah Khusus

2.3.1. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu baik alamiah maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan secara terintegrasi melalui pendekatan teritorial (formal).

Sebagai contoh, ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terbentuk oleh 28 matriks dasar kesatuan hidrologis sehingga dalam pengelolaannya direncanakan melalui pendekatan teritorial (formal), misalnya pembangunan bendungan untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik.

Pengembangan DAS yang telah dilakukan di Indonesia antara lain : DAS Citarum di Jawa Barat dengan Bendungan Jatiluhur, Cirata dan Saguling, DAS Brantas di Jawa Timur, serta DAS Jenebirang dengan Bendungan Bili-Bili di Sulawesi selatan.

2.3.2. Wilayah Homogen

Konsep perwilayahan homogen diawali oleh kegiatan evaluasi sumberdaya lahan seperti evaluasi kesesuaian lahan (*land suitability*) atau kemampuan lahan (*land capability*) terhadap suatu jenis komoditas tertentu. Keunggulan potensi sumberdaya tanah dan iklim di wilayah ini merupakan '*comparative advantage*' yang sifatnya homogen dan dominan. Umumnya faktor-faktor yang tidak dominan sifatnya heterogen, misalnya jumlah penduduk, pengetahuan, keterampilan, kelembagaan petani, pasar dan sebagainya. Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas (kesamaan) di dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan (kompleksitas, *varians*, ragam) antar wilayah-wilayahnya atau antar komponen-komponen di dalamnya (Rustiadi *et al.*, 2003). Daerah "Jalur Pantura" (Jatiluhur dan Pantai Utara Jawa), dapat dikatakan sebagai

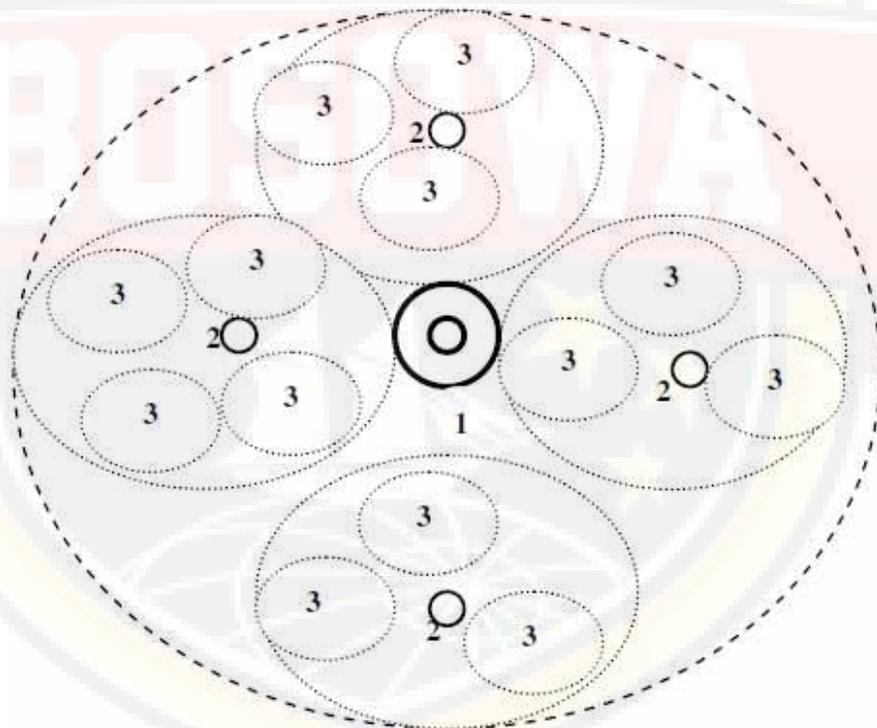
daerah homogen mengingat daerah ini didominasi oleh pertanian sawah beririgasi teknis. Di lain pihak faktor budaya (etnik) di Jalur Pantura ini sangat heterogen, karena di daerah ini dijumpai berbagai grup etnik yaitu Melayu, Sunda, Cirebonan dan Jawa.

2.4. Konsep Wilayah Nodal

Wilayah diasumsikan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat) merupakan pusat-pusat pelayanan/pemukiman yang berfungsi sebagai: (1) tempat terkonsentrasinya penduduk, (2) pasar bagi komoditi-komoditi pertanian maupun industri, (3) sebagai pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*, serta (4) sebagai lokasi pemusatan industri manufaktur yang diartikan sebagai kegiatan yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan plasma adalah daerah belakang (*periferi/hinterland*) yang berfungsi sebagai : (1) pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan/atau bahan baku, (2) pemasok tenaga kerja melalui urbanisasi, (3) sebagai daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur dan umumnya terdapat interdependensi antara inti dan plasma, serta (4) sebagai fungsi-fungsi keseimbangan ekologis (Rustiadi *et al.*, 2003).

Batas fisik dari setiap daerah pelayanan bersifat sangat baur dan dinamis karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem transportasi. Oleh karena itu, struktur wilayah ini sangat efisien khususnya dalam

mendukung perkembangan ekonomi dan sistem transportasi. Pada wilayah nodal pusat-pusat yang berhierarki lebih tinggi melayani pusat-pusat yang berhierarki rendah disamping juga melayani *hinterland* disekitarnya. Pada kenyataannya dalam suatu sub areal yang cukup luas mempunyai beberapa inti dengan hierarki (orde) tertentu. Sub wilayah inti dengan hierarki yang lebih tinggi merupakan pusat bagi beberapa sub wilayah inti dengan hierarki yang lebih rendah. Secara skematik hirarki wilayah ini dapat dijelaskan pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Keterangan : 1,2,3 menunjukkan urutan hierarki pusat

Gambar 2.1 Diagram Sub-sub Wilayah Inti dengan Berbagai Tingkat Hirarki Pada Wilayah Nodal (Rustiadi *et al.*, 2003).

2.5. Pengembangan Wilayah Fungsional Menurut Sistem Perkotaan

2.5.1. Konsep Pertumbuhan Kutub (*Growth Pole*)

Konsep pertumbuhan kutub (*growth pole*) dikenal juga sebagai pembangunan dari atas (*development from above*) yang sifatnya *top down* (komando). Menurut Mathur (1978) dalam Nurzaman (2002) konsep *growth pole* adalah konsep yang menekankan pada pembangunan industri '*leading*' di wilayah yang paling strategis. Industri-industri dan kegiatan-kegiatan yang akan berkembang dan membentuk kutub pertumbuhan tersebut memiliki beberapa ciri sebagai *leading industries* dan *propulsif industries*. Selain itu prinsip konsentrasi dan aglomerasi akan menimbulkan efek efisiensi lokasi berupa skala ekonomi (*scale economies*), *localization economies* dan *urbanization economies*.

Pusat pertumbuhan juga melahirkan konsep *Centre-Periphery* (Pusat-Pinggiran) sebagaimana dikemukakan Friedmann, yaitu adanya kota utama dan wilayah sekitarnya yang menjadi inti (*core*) dan pinggiran (*periphery*) yang berada diluar serta bergantung pada inti. Perkembangan disebarkan dari inti ke pinggiran melalui pertukaran penduduk, barang, dan jasa. Kota sebagai inti berpengaruh atas wilayah pinggirannya. Hubungan antara *core* dan *periphery* dilukiskan dengan dua efek, yaitu efek sebar '*spread effect*' dari pusat ke pinggiran dan kedua efek serap balik '*backwash effect*' dari pinggiran ke pusat (Mirdall, 1957).

Dalam konsep tersebut terdapat istilah penjalaran dan penetesan (*spread and trickling down*) serta penarikan dan pemusatan (*backwash and polarization*). Investasi diberikan pada kota besar, dengan pendirian bahwa jika kegiatan terkonsentrasi dalam suatu ruang, maka konsentrasi itu menimbulkan *external economics* yang mengakibatkan bertambahnya kegiatan baru pada kawasan kota tersebut. Proses demikian mempertinggi aglomerasi ekonomi (Jayadinata, 1999). Pada kenyataannya proses penetesan ke bawah tidak otomatis berlangsung dengan sendirinya. Selain PDB dan pendapatan per kapita, pemerataan juga perlu diperhatikan. Jose Luis Corragio menguraikan bagaimana *growth center theory* bukannya menyebabkan penetesan perkembangan, tetapi malahan menyebabkan ketergantungan yang semakin besar dari *periphery* terhadap *center* atau pusat (Weaver, 1981 dalam Nurzaman, 2002).

Berdasarkan pengertian di atas, kunci kutub pertumbuhan adalah adanya konsentrasi investasi, industri, dan pembangunan di satu tempat yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana sehingga penciptaan efisiensi ekonomi. Dalam konteks pembangunan perdesaan, desa-desa pada tipologi desa di perkotaan (kelurahan) dan desa yang memiliki basis industri memiliki peluang dalam penerapan model kutub pertumbuhan. Konsep pusat dapat dianalogikan dengan perkotaan (desa di perkotaan) dan pinggiran sama dengan desa-desa diluar perkotaan. Selain itu prinsip

kutub pertumbuhan dapat pula diterapkan desa yang jauh dari pusat dengan kriteria konsentrasi investasi, beberapa desa yang berbasis ekonomi pariwisata atau pertambangan dapat menjadi pusat pertumbuhan di daerah perdesaan.

2.5.2. Konsep Agropolitan

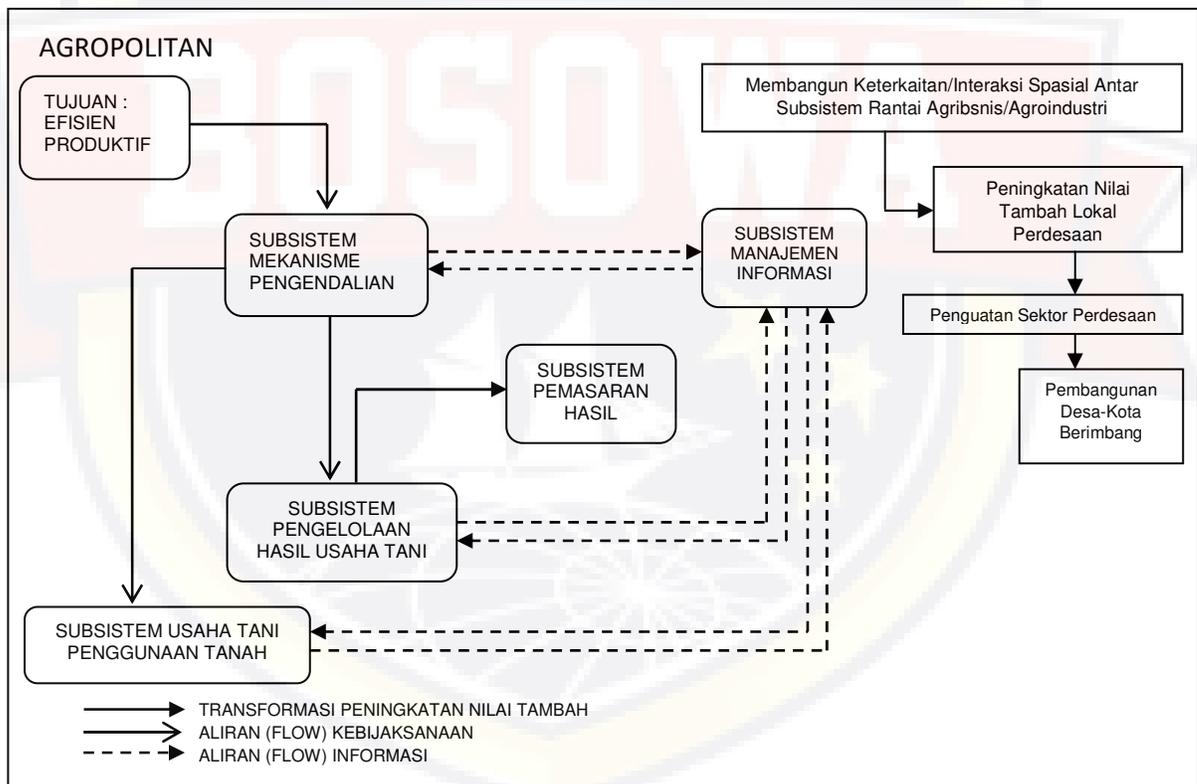
Berhubung proses penjarangan atau perambatan perkembangan dari kota ke wilayah sekitar daerah inti tersebut bekerjanya lambat atau bahkan kurang dapat dijelaskan secara meyakinkan, maka orangpun berpaling pada sisi lain dari daerah perkotaan, yaitu di pedesaan. Umumnya di negara berkembang seperti Indonesia, daerah pedesaan merupakan sumber penghidupan dari sebagian besar penduduk. Argumentasi yang juga menunjang pandangan ini adalah adanya keterkaitan antara pedesaan dan perkotaan. Keterkaitan itu paling tidak dalam hal pasar kota menyerap hasil produksi desa, tenaga desa dipekerjakan di lapangan kerja kota dan fasilitas pelayanan di kota dimanfaatkan penduduk desa. Atas dasar alasan-alasan tersebut Friedmann dan Douglass (1978) mengusulkan konsep *Agropolitan*.

Beberapa dekade yang lalu paradigma pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik tanpa diikuti pembangunan ekonomi sosial dan lingkungannya yang dilakukan secara terpadu. Hal ini menimbulkan masalah di dalam pengelolaannya, karena masyarakat belum punya kemampuan untuk mengelola agar investasi yang

telah dilaksanakan dapat lestari/berfungsi. Investasi dalam skala besar/masif yang dilaksanakan di daerah perkotaan yang diharapkan dapat memberikan efek penetesan ke wilayah sekitarnya juga tidak terjadi secara serta merta. Berdasarkan pada paradigma tersebut di atas, maka pembangunan harus juga diberikan perhatiannya ke pembangunan perdesaan. Pendekatan pembangunan di perdesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik, melainkan yang lebih penting sebagai *entry point*-nya adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada potensi unggulan di masing-masing wilayah. Terkait dengan pendekatan ini maka melalui konsep pembangunan agropolitan menjadi relevan untuk dilaksanakan di daerah perdesaan.

Kata 'agro' merupakan istilah dari bahasa latin yang bermakna 'Tanah yang dikelola' atau 'Budidaya Tanaman' yang kemudian digunakan untuk menunjuk berbagai aktivitas berbasis 'Pertanian'. Sedangkan kata 'agropolis' berasal dari kata agro dan metropolis, yakni lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian. Jadi, pengembangan agropolitan merupakan pengembangan berbagai hal yang dapat memperkuat fungsi/peran 'agropolis' sebagai lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian. Tipologi pengembangan disesuaikan dengan karakteristik tipologi kawasan yang dilayaninya (Saefulhakim, 2004).

Agropolitan merupakan konsepsi kesisteman yang utuh, terintegrasi, dan bersifat multi sektor, terdiri atas subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem jasa-jasa penunjang. Karena itu pembangunan dengan pendekatan agropolitan sering disebut pembangunan pertanian pedesaan yang didukung pembangunan industri dan jasa. Kota-kota yang berkembang adalah rural-urban di mana karakteristik rural (pedesaan) dan karakteristik urban (perkotaan)



terintegrasi secara harmonis (Anugrah, 2003).

Gambar 2.2.Skema keterkaitan desa dan kota dalam hubungannya dengan interaksi spasial antar subsistem rantai

agribisnis/agroindustry akibat peningkatan nilai tambah (Saefulhakim, 2004).

Sitorus dan Nurwono (1998) menjelaskan bahwa persyaratan terbentuknya Agropolitan adalah kota yang memiliki nilai tambah (efisien) baik dalam pelayanan jasa-jasa yang mudah dan murah dibandingkan dari kota terdekat maupun dalam produksi dan pemasaran serta memiliki *hinterland* yang kegiatan perekonomiannya utamanya adalah di bidang agribisnis (ada rantai agribisnisnya). Interaksi spasial antar subsistem agribisnis/agroindustri dilakukan melalui peningkatan *economic of scope* dan *economic of scale*, bukan ditentukan oleh batas luasan administratifnya, seperti desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten.

Dari uraian tersebut di atas agropolitan dapat diartikan :

1. Suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, dengan kegiatan pengolahan agrobisnis yang berkonsentrasi di wilayah perdesaan sehingga mendorong kegiatan ekonomi.
2. Pendekatan agropolitan dapat mengurangi dampak negatif pembangunan yang telah dilaksanakan, yaitu terjadinya urbanisasi yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, pengurasan sumber daya alam dan pemiskinan desa.
3. Menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanisme ke dalam lingkungan perdesaan yang spesifik.

Penerapan agropolitan, secara teoritik diyakinkan mampu memberdayakan wilayah perdesaan tidak terkesan sebagai wadah produksi semata namun juga wadah pengelolaan dan penyuplai pada wilayah kota kecil hingga kota besar. Dengan demikian wilayah perdesaan akan muncul sebagai wilayah kota kecil hingga kota besar. Serta pada akhirnya wilayah perdesaan akan muncul sebagai wilayah kota yang berbasis pertanian, dengan potensi lahan dan sumberdaya lokal yang menjadi pokok pengembangan selama ini. Untuk itu perlu adanya penerapan konsep agropilitan pada wilayah-wilayah yang memiliki sumberdaya pertanian yang lebih produktif sebagai leading dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.1
Pengembangan Agropolitan

No	Muatan Agropolitan	Keterangan
1	Penetapan Pusat Agropolitan yang berfungsi sebagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (<i>Agricultural trade/ transport centre</i>). 2. Penyedia jasa pendukung pertanian (<i>Agricultural support services</i>). 3. Pasar konsumen produk non-pertanian (<i>non-Agricultural consumers market</i>). 4. Pusat Industri Pertanian (<i>agro-based industry</i>). 5. Penyedia pekerjaan non-pertanian (<i>non-agricultural employment</i>). 6. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional,

No	Muatan Agropolitan	Keterangan
		provinsi, dan kabupaten (RTRW Provinsi/Kabupaten)
2	Penetapan unit-unit Kawasan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat produksi pertanian (<i>agricultural production</i>) 2. Intensifikasi pertanian (<i>agricultural intensifikation</i>). 3. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (<i>rural income and demand non-agricultural goods and services</i>). 4. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (<i>cash crop production and agricultural diversification</i>).
3	Penetapan Sektor Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya. 2. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal). 3. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
4	Sistem Infrastruktur	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan diantaranya: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi)
5	Sistem Kelembagaan	<p>Lembaga pengelolaan kawasan agropolitan (bagian dari PEMDA)</p> <p>Perangkat perundang-undangan yang mengatur (intensif dan disintensif)</p>

2.6. Interaksi Spasial

Konsep pengembangan wilayah memandang penting aspek keterpaduan sektoral, spasial serta keterpaduan antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Keberadaan potensi sumberdaya alam serta aktivitas-aktivitas sosial-ekonomi yang tersebar secara tidak merata dan tidak seragam menyebabkan perlu adanya mekanisme interaksi antar dan inter wilayah secara optimal. Akibat keterbatasan sumberdaya yang tersedia, dalam suatu perencanaan pembangunan selalu diperlukan adanya skala prioritas pembangunan. Dari sudut dimensi sektor pembangunan, skala prioritas didasarkan atas suatu pemahaman bahwa setiap sektor memiliki sumbangan langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan (penyerapan tenaga kerja, pendapatan regional dan sebagainya), dimana setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pada kenyataannya, aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumberdaya alam, buatan (infrastruktur) dan sosial yang ada pada wilayah tersebut (Rustiadi, 2005).

Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergis antar sektor-sektor pembangunan. Keterpaduan spasial membutuhkan adanya interaksi spasial yang optimal dalam arti terjadinya

struktur keterkaitan antar wilayah yang dinamis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), interaksi (interaction) adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan atau saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi wilayah itu sendiri merupakan hubungan yang dinamis antara satu wilayah dengan wilayah lain, baik hubungan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan lain sebagainya. Interaksi antar dua wilayah dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan masyarakat di dua wilayah tersebut, jarak wilayah dan besarnya pengaruh jarak antara kedua wilayah tersebut.

Menurut Richardson (1991) dalam Maulana (2006), faktor penentu besarnya interaksi antara dua daerah atau lebih ditentukan berdasarkan pada: (1) jarak antar daerah yang berinteraksi dan (2) jumlah penduduk pada daerah yang berinteraksi. Semakin dekat jarak dan semakin besar jumlah penduduk antar daerah yang berinteraksi, maka interaksi yang terjadi akan semakin besar. Adapun pergerakan yang dilakukan oleh penduduk sedikitnya dipengaruhi oleh dua motivasi yaitu: (1) pergerakan dengan motivasi ekonomi dan (2) pergerakan dengan motivasi pemenuhan kebutuhan pelayanan.

2.7. Komoditas/Sektor Unggulan

Arah dan tujuan pembangunan pertanian di suatu kawasan haruslah selaras dengan spesifikasi wilayah sasaran berdasarkan kondisi agroekosistem setempat, sifat komoditas yang dikembangkan, kondisi

infrastruktur, dan situasi social budaya kelompok sasaran. Untuk menunjang hal tersebut di atas, maka penentuan komoditas unggulan di suatu wilayah kabupaten/kota merupakan suatu keharusan agar sumberdaya pembangunan pertanian dapat dimanfaatkan secara efisien dan dan terfokus pada pengembangan komoditas unggulan wilayah tersebut.

Komoditas unggulan wilayah adalah komoditas andalan suatu daerah/wilayah yang tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan kondisi biofisik yang spesifik di daerah tersebut (Ernawanto, 2007).

Menurut Master Plan Kabupaten Paser (2007), komoditas unggulan mempunyai kriteria:(1) diminati masyarakat dan sesuai dengan potensinya, (2) bersifat khas dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, (3) permintaan pasar yang tinggi dan kontinu serta mempunyai manfaat ekonomi yang tinggi (B/C ratio dan land rent tinggi) dan (4) dari segi teknik budidaya, petani sudah berpengalaman.

2.8.Hirarki Wilayah

Struktur interaksi dapat memiliki tingkatan strata/hirarki. Strata/hirarki interaksi terwujud dalam bentuk strata/hirarki (1) antar unsur pusat-pusat (noda), (2) antara linkage dan (3) bentuk/jenis interaksi.

Hirarki pusat-pusat adalah hirarki yang menggambarkan strata pusat-pusat konsentrasi (central places) seperti hirarki pusat-pusat pemukiman,

hirarki kota-kota, hirarki pasar, dan lain-lain. Hirarki pusat (noda) pada dasarnya ditentukan oleh kapasitas pelayanan, kapasitas/potensi berinteraksi dan tingkat aksesibilitas (locational rent) pusat-pusat. Kapasitas pelayanan pusat-pusat dapat diidentifikasi dengan metode skalogram yang dapat diukur dari ketersediaan dan kapasitas pelayanan fasilitas-fasilitas fisik, kelembagaan, besaran pasar, lapangan pekerjaan, ekonomi hingga ke daya dukung lingkungannya. Namun dalam penelitian variabel yang digunakan adalah ketersediaan dan kapasitas pelayanan fasilitas-fasilitas fisik.

2.9. Desa Pusat Pertumbuhan

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip strategi pusat pertumbuhan yang diterapkan dalam pembangunan perdesaan, Kementrian Pekerjaan Umum sejak tahun 1990-an mengembangkan konsep atau strategi desa pusat pertumbuhan. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat serta merupakan simpul jasa dan distribusi dari wilayah di sekitarnya. DPP terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategi berupa :

1. Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan mengembangkan potensi kawasan perdesaan lain di sekitarnya,

2. Keunggulan ekonomis (*economies scale*) guna mengembangkan potensi andalannya,
3. Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.

Tujuan dari Program Pengembangan DPP adalah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi lokal pada kawasan perdesaan yang potensial menjadi Desa Pusat Pertumbuhan, dengan Sasaran Program yaitu :

- 1) Penyediaan prasarana dan sarana dasar perdesaan yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi perdesaan.
- 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui pemanfaatan sumber daya alam setempat dan atau potensi unggulan desa lainnya.
- 3) Mempercepat terbentuknya keterkaitan struktur kota dengan DPP sebagai simpul terkecil melalui perwujudan *urban-rural linkages*.
- 4) Menciptakan kemandirian kawasan perdesaan, untuk mengurangi arus migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.

Dalam pelaksanaan Program DPP menggunakan 3 pendekatan dalam prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Pendekatan *Community Based Development* (Pembangunan Yang Bertumpu Pada Masyarakat), dengan melibatkan masyarakat secara

penuh mulai dari tahap Persiapan sampai dengan tahap Pengelolaan (*Participatory Planning*).

2. Pendekatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Desa pusat pertumbuhan dikembangkan dengan melengkapi sarana dan prasarana wilayah yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, yang bersifat stimulasi agar sumberdaya masyarakat dan pemerintah lokal dapat ikut mendukung proses pengembangan kawasan perdesan selanjutnya.

Kriteria penetapan lokasi DPP terdiri dari pemenuhan *Kriteria Umum* dan *Kriteria Khusus*. Penetapan kriteria Desa Pusat Pertumbuhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan kriteria umum dan khusus yaitu:

- 1) Kriteria Umum
 - a. Tidak rawan bencana alam (periodik maupun yang dapat diperkirakan).
 - b. Terdiri dari satu kesatuan kawasan perdesaan, dengan desa pusat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan maupun distribusi barang, serta jasa dan informasi.
 - c. Didukung oleh adanya potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kawasan.

- d. Mempunyai akses yang memadai, baik antar desa dalam kawasan maupun kepusat-pusat lainnya yang lebih tinggi ordenya.
- e. Karakteristik kawasan dapat berupa kawasan perdesaan yang mewakili karakteristik spesifik : desa daratan rendah, daratan tinggi, desa pegunungan dan desa pantai/pesisir.
- f. Mempunyai kelembagaan dan kepemimpinan (formal maupun informal) yang berjalan baik.
- g. Masyarakat terbuka terhadap pembaharuan dan pembangunan.

Dalam konsep pendekatan kawasan beberapa kriteria lain yang dapat digunakan diantaranya: (1) merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan, (2) tidak memiliki ciri kekotaan, (3) merupakan kawasan pusat jasa dan pelayanan lokal, (4) merupakan kawasan perdesaan pusat perdagangan, (5) merupakan kawasan perdesaan pertanian/agro bisnis.

2) Kriteria Umum

Adalah penciri desa pusat pertumbuhan menurut ciri atau potensi serta fungsi kawasan yang akan dikembangkan, diantaranya:

a. Kawasan Agri-Bisnis (*Agriculture-Based*).

- Potensi utama kawasan adalah pertanian yang berorientasi pasar (surplus, kontinyu, mutu, dan harga yang kompetitif).

- Direncanakan sebagai kawasan pengembangan pertanian primer untuk konsumen, industri dan perdagangan melalui *On Farm Agri Bisnis*, *Upstream Agri Bisnis* dan *Downstream Agri Bisnis*.

b. Kawasan Desa Industri Rumahan (*Home Industries-Based*).

- Kegiatan Utama adalah pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat yang dapat dikerjakan oleh masing-masing keluarga masyarakat perdesaan, baik industri pengelolaan barang setengah jadi atau barang jadi dan barang konsumsi, dengan kekhasan setempat, serta distribusi dan pemasarannya.
- Berpeluang untuk dikembangkan sebagai pengelompokan kegiatan industri dengan produk yang berorientasi pasar.

c. Kawasan Desa Wisata (*Potentially tourism-based*)

- Kawasan perdesaan yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan (alam, wisata budaya, adat istiadat, situs sejarah).
- Didukung oleh kegiatan lainnya yang menunjang.
- Mempunyai akses ke jalur regional.

d. Kawasan Desa Nelayan (*Fishery-Based*):

- Kawasan ini dapat berupa kawasan desa nelayan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan (Kawasan Pantai/Pesisir, Perikanan Tambak, Pinggiran Danau, Sungai).

Secara teknik, Muta'ali (2006) dalam penyusunan kampung pusat pertumbuhan menggunakan indikator-indikator :

- 1) Identifikasi potensi (sektor, atau komoditas) unggulan
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana umum (pelayanan publik) dan sarana dan prasarana produksi
- 3) Analisis Demografi, baik jumlah, kepadatan dan struktur
- 4) Kelembagaan, baik kelembagaan masyarakat maupun pemerintah (kelembagaan ekonomi, sosial, kemasyarakatan)
- 5) Aksesibilitas yaitu ketertudahan ketercapaian lokasi yang terkait dengan posisi geografis, sarana dan prasarana transportasi
- 6) Bebas dari gangguan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam

2.10. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

Dalam perkembangannya, terutama terkait defenisi tentang kawasan perdesaan dalam UU Penataan Ruang, yaitu studi desa pusat pertumbuhan diperluas lagi menjadi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), yaitu satu kesatuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa

pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa :

- 1) Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lainnya di sekitarnya,
- 2) Keuntungan ekonomis (*economic scale*) guna mengembangkan potensi andalannya,
- 3) Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kawasan perdesaan di sekitarnya.

Berdasarkan keragaman ciri khas perdesaan di Indonesia, maka sangat dimungkinkan adanya beberapa alternatif atau model desa pusat pertumbuhan, khususnya terkait dengan keberadaan hinterlandnya sebagai berikut :

1. Model 1 : lebih dari satu DPP dengan beberapa *hinterland*

Terdiri lebih dari satu Desa Pusat Perumbuhan (DPP), dengan beberapa desa *hinterland* yang tergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi dan pelayanan



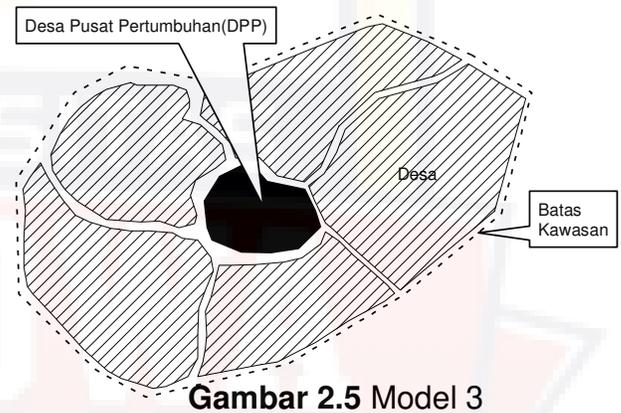
Gambar 2.3 Model 1

2. Model 2 : Hanya satu desa, dengan pusat desa *centre of activity*

Terdiri lebih dari satu Desa Pusat Perumbuhan (DPP), dengan beberapa desa *hinterland* yang saling tergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi dan pelayanan



3. Model 3 : Terdiri lebih dari satu DPP, dengan beberapa desa *hinterland* disekitarnya



- Terdiri lebih dari satu DPP, dengan beberapa desa *hinterland* disekitarnya, kondisi ini biasanya terjadi pada kawasan yang luasan masing-masing desa relatif kecil.

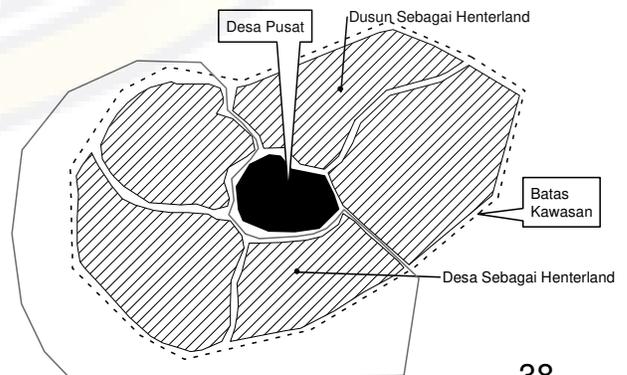
- Alternatif

Radius untuk P. Jawa : + 10 km

Radius untuk luar P. Jawa : > 10 km

4. Model 4 : Terdiri atas satu DPP, dengan beberapa desa *hinterland* berupa desa (dusun)

- Terdiri atas satu DPP dengan *Hinterland*



berupa desa (dusun). Penentuan *hinterland* berupa dusun didasarkan atas jarak capai/radius keterkaitan serta ketergantungan dusun-dusun tersebut pada DPP bersangkutan pada bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.

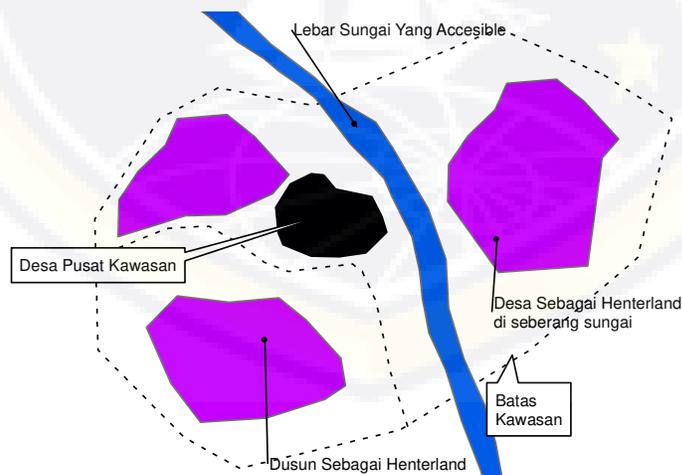
- Alternatif II

Radius untuk P. Jawa : + 10 km

Radius untuk luar P. Jawa : > 10 km

5. Model 5 : kawasan yang antara desa hinterland dengan desa pusat dibatasi oleh sungai

Kawasan yang antara desa hinterland dengan desa pusat dibatasi oleh sungai . hal tersebut dimungkinkan apabila pencapaian antara desa pusat dengan *Hinterland*-nya relatif mudah, disamping memang diantara keduanya punya ikatan dan keterkaitan baik dibidang ekonomi maupun pemerintah.



Gambar 2.7. Model 5

2.11. Agropolitan di Indonesia

Di Indonesia masa kini, konsep agropolitan ini mendapat banyak perhatian. Hal ini terlihat dalam berbagai buku Pedoman Pembentukan Agropolitan yang dikeluarkan Departemen Pertanian pada tahun 2002-2003, maupun konsep-konsep yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Akan tetapi, dalam konsep tersebut terlihat masih adanya kerancuan antara konsep agropolitan yang merupakan bagian dari perkembangan dari bawah dengan beberapa unsur dari perkembangan dari atas. Selain itu, kebijaksanaan- kebijaksanaan pengembangan agropolitan ini masih terlihat bergantung pada pemerintah pusat. Padahal seharusnya, masyarakatlah yang didorong untuk memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan sendiri yang cocok dengan wilayahnya. Salah satu wilayah agropolitan yang berhasil, yaitu Provinsi Gorontalo (sudah mulai dengan konsep agropolitan sebelum adanya pedoman dari Deptan). Provinsi ini menerapkan prinsip limited government intervention dalam kebijaksanaannya.

Jadi, dengan mengingat rawannya keadaan pangan di Indonesia, walaupun merupakan konsep lama, konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah, patut untuk dipikirkan kembali. Pedomannya bisa menggunakan pedoman agropolitan yang sekarang sudah dimiliki Deptan dan Dep. PU dengan sedikit perbaikan di sana-sini (Nurzaman, 2008).

2.12. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Model ini mengadopsi konsep growth centers (growth pole), yaitu menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, berupa satu kawasan andalan prioritas mewakili masing-masing propinsi. Kawasan ini didukung oleh kegiatan sektor/komoditi unggulan, yang berupa potensi sumber daya lokal, yang diharapkan menjadi prime mover pengembangan propinsi yang bersangkutan (Prasetya dan Hadi 2000).

Praktek pengembangan wilayah melalui konsep growth centers dibanyak negara banyak mengalami kegagalan. Salah satu alasan kegagalan tersebut adalah melupakan kekuatan industrial-linkages yang mestinya dibangun jauh-jauh hari, baik dalam proses penambahan nilai, keterkaitan produk (industrial tree), maupun keterkaitan lokasi (spesialisasi aktivitas ekonomi). Termasuk dalam kelemahan linkages ini adalah ketiadaan konsep operasional yang kongkrit bagaimana masyarakat bawah dilibatkan dan diangkat kehidupannya dalam pengembangan KAPET yang sebagian besar berbasis agroindustri dan agribisnis tersebut. Dengan dipertanyakan keterkaitan ini, maka trickle down effect yang dijadikan harapan saat diberlakukannya konsep growth centers ini menjadi menipis (Kasikoen 2005).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996, kemudian disempurnakan oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998 yang

selanjutnya diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000, maka telah ditetapkan 14 lokasi KAPET. Pengertian Kapet adalah suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (1) Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, atau Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan (2) Memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.

Konsep pemikiran ilmiah tersebut tentunya tidak dapat diwujudkan apabila tidak diawali dengan penataan dan pengaturan ruang secara baik dan melalui suatu kajian akademis secara akurat, sehingga menghasilkan ruang yang sesuai harapan atau tujuan dari keputusan Presiden tersebut. Oleh karena itu sejalan dengan Keputusan Presiden nomor 150 Tahun 2000 maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun untuk menjabarkannya menuju pendekatan operasional maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang diawali dengan penataan dan pengaturan ruang sesuai Keputusan Presiden nomor 150 Tahun 2000 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dilakukan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan salah satu adalah KAPET Mbay yang terdiri dari Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo yang berpusat di Mbay yang menjadi ibukota dari Kab. Nagekeo

dengan luas wilayah masing-masing Kabupaten Ngada seluas 1.620,89 km² dan Kabupaten Nagekeo seluas 1.416,99 km². KAPET Mbay dibatasi oleh batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ende, dan Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

KAPET adalah salah satu bentuk wujud nyata kebijakan Pemerintah Indonesia dalam usaha mengembangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembentukan KAPET ini diharapkan dapat memberikan dampak positif melalui penggabungan kebijakan pengembangan wilayah dan kebijakan ekonomi berdasarkan konsep growth center yang diasumsikan dapat menimbulkan trickling down effect. KAPET Mbay yang merupakan salah satu KAPET yang berada di KTI yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan berdasarkan KEPPRES No.15 Tahun 1998. Kawasan tersebut terletak di wilayah tengah Pulau Flores dengan cakupan wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo, serta pusat pertumbuhan ekonomi di Mbay Kabupaten Nagekeo.

KAPET sebagai kebijakan pengembangan wilayah menekankan pada penguatan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di

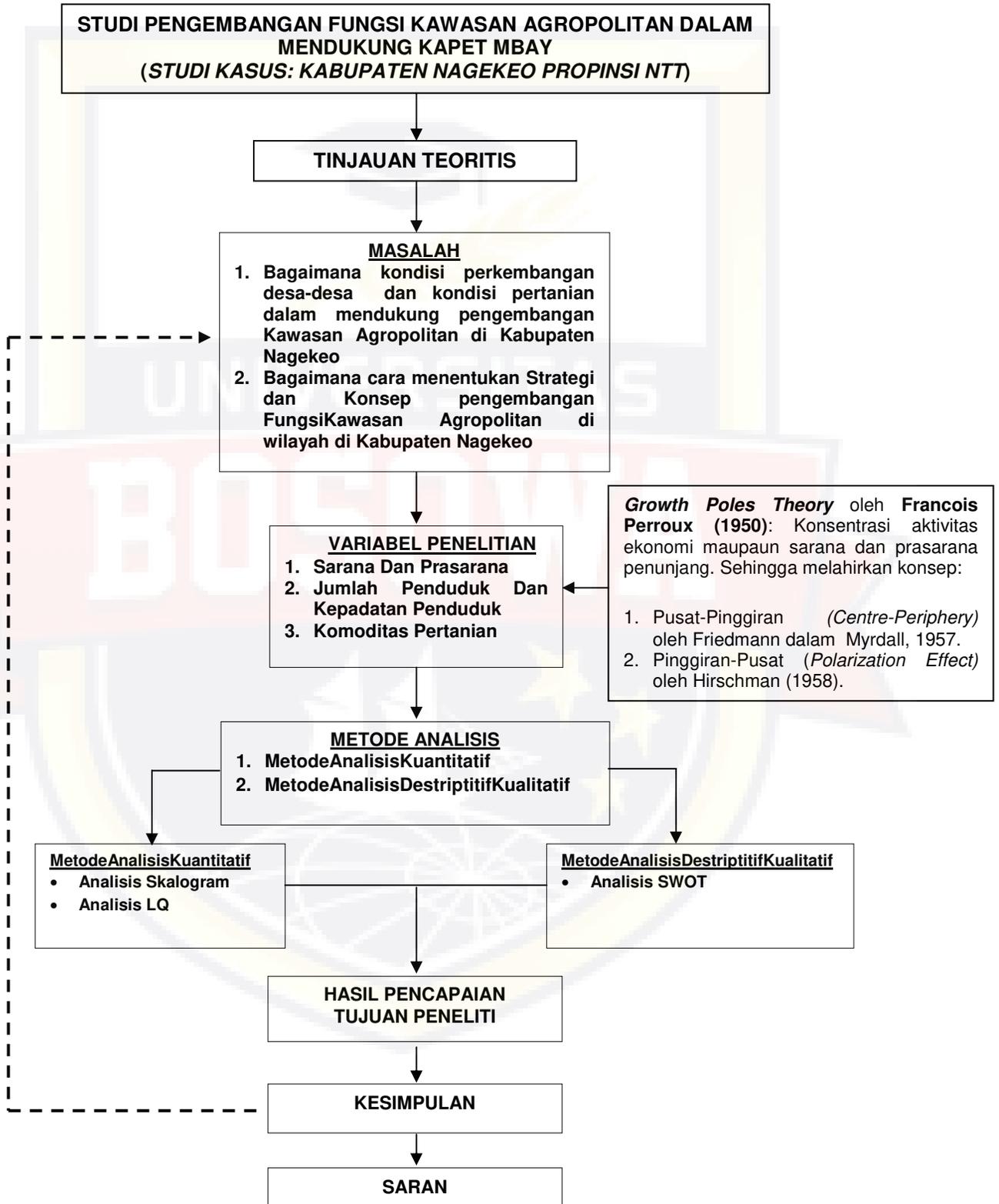
kawasan tertinggal. Dengan demikian, KAPET tidak berdasarkan pada pengembangan produksi pertambangan ataupun sumber daya mineral, melainkan pada produksi komoditi unggulan berbasis pada sumber daya alam lain yang bisa diperbarui, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dll.

Berdasarkan hal ini KAPET dapat mengembangkan kegiatan sektor primer, sekunder (industri pengolahan berbasis komoditi unggulan), dan tersier, yang diharapkan akan menguatkan sektor basis ekonomi wilayah dan memperluas pelibatan masyarakat dalam proses produksi, sehingga aspek kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai. Namun KAPET juga tetap mendorong pengembangan Kawasan Industri untuk menarik investor asing (*Foreign Direct Investment*).

2.13. Kerangka Pikir

Dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan awal, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisa serta menentukan hasil keluaran akhir. Oleh karena itu untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan maka diperlukan suatu kerangka pikir sebagai landasan dalam menentukan arah penelitian yang akan dilakukan, hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak terfokus. Dengan demikian untuk lebih jelasnya sebagaimana pada gambar 2.8. berikut :

Gambar 2.8. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Secara lebih terinci menurut Nazir (1988 : 51), metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

Bertolak dari permasalahan dan tujuan maka metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis kuantitatif menggunakan analisis statistic. Analisis statistic adalah cara untuk mengolah informasi data (kuantitatif) yang berhubungan dengan angka-angka, bagaimana mencari, mengumpul, mengolah data, sehingga sampai menyajikan data dalam bentuk sederhana dan mudah untuk dibaca atau data yang diperoleh dapat dimaknai (diinterpretasikan).

Menurut Whetney (1960) dalam Nazir (1988 : 63), metode diskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian diskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode diskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada perdesaan di Kab. Nagekeo yang mempunyai potensi dalam pengembangan Kawasan Agropolitan serta adanya KSN KAPET Mbay di kabupaten ini. Alasan dalam memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

1. Kabupaten Nagekeo merupakan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi sektor pertanian yang baik.
2. Dalam RTRW Kabupaten Nagekeo menekankan perlu adanya penetapan kawasan agropolitan.
3. Berbagai potensi sumberdaya alam di desa yang masih kurang dikembangkan dalam menunjang pengembangan Kabupaten

Nagekeo khususnya KAPET Mbay. Hal ini disebabkan oleh, belum adanya optimaisasi disektor pertanian melalui konsep agropolitan.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel yang diambil berdasarkan ***Growth Poles Theory*** oleh **Francois Perroux (1950)**: dimana adanya Konsentrasi aktivitas ekonomi maupaun sarana dan prasarana penunjang, yang melahirkan konsep pusat-pinggiran dan pinggiran-pusat.

Variabel/indicator dalam penelitian ini yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan meliputi;

1. Sarana dan Prasarana
2. Jumlah Penduduk serta Kepadatan Penduduk
3. Potensi Sumberdaya Alam (komoditas unggulan)

3.4. Jenis Dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Berdasarkan variabel/indikator yang diuraikan diatas, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana
- b) Jumlah penduduk
- c) Kepadatan penduduk
- d) Data potensi komoditas pertanian (sumberdaya alam)

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, karena jenis data yang dibutuhkan juga ada dua. Adapun sumber data, sebagai berikut;

- a. Sumber data primer, data yang didapat dari survei yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh peneliti yang meliputi; data kondisi serta ketersediaan sarana dan prasarana.
- b. Sumber data sekunder, didapat dari hasil survei yang dilakukan pada instansi terkait terutama dinas bersangkutan, berupa buku atau dokumen yang sudah diterbitkan ke publik, sehingga mudah disadur, seperti; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo, Data Kabupaten Nagekeo Dalam Angka tahun terakhir, Data Seluruh Kecamatan Dalam Angka tahun terakhir, dan lain-lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder dari instansi terkait serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi yaitu teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui observasi langsung pada lokasi penelitian.
3. Wawancara (interview), yaitu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dari informan secara mendalam dalam melengkapi data.

4. Dokumentasi yaitu merekam kondisi eksisting di lapangan secara visual dalam bentuk gambar atau foto-foto.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukan untuk kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang ada sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis Kuantitatif (Analisis Skalogram dan LQ) dan analisis SWOT yang diharapkan saling menunjang, terutama dari segi outputnya.

3.6.1. Analisis Kuantitatif

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, Bagaimana kondisi perkembangan desa-desa dan kondisi pertanian dalam mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nagekeo menggunakan alat analisis Kuantitatif yang terdiri dari : Analisis Skalogram dan Analisis LQ.

3.6.1.1. Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah (Metode Skalogram)

Tipologi dan posisi desa-desa yang terdapat di masing-masing kecamatan terhadap keseluruhan desa di tujuh kecamatan di Kabupaten

Nagekeo dapat dikaji dengan menganalisis tingkat perkembangan wilayahnya melalui metode skalogram.

Pada penelitian ini digunakan data Potensi Desa (PODES) tahun 2015 kuantitatif yang menggambarkan seluruh potensi sumberdaya fisik, sosial, dan ekonomi wilayah. Data yang diperlukan untuk analisis skalogram adalah data PODES 2015 yang telah melalui proses rasionalisasi.

Urutan kegiatan pada analisis data dengan metode skalogram antara lain :

1. Melakukan pemilihan (*filtering*) terhadap seluruh data PODES 2015 sehingga hanya tinggal data-data yang sifatnya kuantitatif.
2. Melakukan seleksi terhadap data-data kualitatif tadi sehingga data-data yang relevan saja yang akan digunakan.
3. Melakukan seleksi terhadap data-data hasil rasionalisasi hingga diperoleh variabel untuk analisis skalogram. Variabel-variabel yang digunakan pada metode ini adalah variabel-variabel yang secara signifikan mencirikan tingkat perkembangan desa-desa di Kabupaten Nagekeo.
4. Menentukan indeks perkembangan desa (IPD) dan kelas hirarkinya, kemudian diplotkan pada peta dasar.

Pada penelitian ini, IPD dikelompokkan kedalam tiga kelas hirarki, yaitu kelas hirarki I (tinggi), kelas hirarki II (sedang) dan kelas hirarki III (rendah). Penentuannya didasarkan atas nilai standar deviasi IPD (*St dev*), nilai rataan IPD, dan nilai rataan IPD dijumlah dengan dua kali nilai standar deviasinya. Nilai yang didapat untuk selang hirarki dan digunakan untuk menentukan kelas hirarki dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Nilai Selang Hirarki Pusat Pelayanan

No	Nilai Selang (x)	Kelas Hirarki	Tingkat Hirarki
1.	$x > [\text{rataan IPD} + (2 * \text{Stdev})]$	I	Tinggi
2.	$\text{rataan} < x < (2 * \text{Stdev})$	II	Sedang
3.	$x < \text{rataan}$	III	Rendah

3.6.1.2. Analisis LQ (Location Quotient)

Location Quotient merupakan analisis yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pemusatan atau basis aktivitas kegiatan tertentu. Selain itu, LQ juga bias digunakan untuk mengetahui potensi ekspor perekonomian suatu wilayah serta tingkat kecukupan barang atau jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Analisis LQ yang dilakukan luas panen/jumlah produksi pertanian dengan menggunakan data hasil produksi pertanian tahun 2015 perkecamatan.

Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat seragam dan (3) setiap aktifitas menghasilkan produk yang sama.

Adapun persamaan dari LQ ini adalah:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{X_{.j} / X_{..}}$$

Dimana:

X_{ij} = nilai sektor kegiatan(*) ke-j pada kecamatan ke-i

X_i = jumlah seluruh sektor kegiatan(*) di kecamatan ke-i

$X_{.j}$ = jumlah sektor kegiatan(*) ke-j di Kabupaten Nagekeo

$X_{..}$ = besaran sektor kegiatan(*) total di Kabupaten Nagekeo

Keterangan (*): Sebaran hasil komoditas pertanian menggunakan data hasil produksi pertanian tiap kecamatan di Kabupaten Nagekeo tahun 2015.

Interpretasi hasil analisis LQ adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $LQ > 1$, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di sub wilayah ke-i.
2. Jika nilai $LQ = 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total.
3. Jika $LQ < 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan diseluruh wilayah.

Analisis LQ lebih bersifat statis karena dilakukan untuk data dalam satu titik waktu, namun keterbatasan metode ini hanya melihat pemusatan aktivitas dari sisi konteks/lingkup wilayah Kabupaten Nagekeo saja.

3.6.2. Analisis Deskriptif Kualitatif (Analisis SWOT)

Teknik analisis deskriptif kualitatif (Analisis SWOT) dilakukan untuk dapat mengakumulasi dan menjustifikasi data-data kualitatif yang tidak dapat dikuantitatifkan tapi turut berpengaruh sebagai variabel penelitian. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan wilayah dalam hal ini strategi pengembangan sektor ekonomi. Analisis SWOT (*Strength, Weakneses, Opportunities, and Threat*). Adalah

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Rangkuti (1997:18,21).

Adapun langkah-langka analisis Analisis SWOT sebagai berikut;

3.6.2.1. Matriks Analisis SWOT

Untuk mendapatkan strategi matriks SWOT terdapat empat strategi yang akan ditampilkan yaitu;

- 1) Strategi SO dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkup eksternal.
- 2) Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.
- 3) Strategi ST akan digunakan untuk menghindari atau paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang akan datang dari luar.
- 4) Strategi WT akan digunakan untuk memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Berdasarkan strategi yang digunakan dalam matriks SWOT maka model matriks yang digunakan adalah sebagai berikut:

Matriks analisis SWOT

Eksternal	Internal	Strengths (S) Susunan daftar kekuatan	Weaknesses (W) Susunan daftar kelemahan
	Opportunities (O) Susunan daftar peluang	Strategi SO Pakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
	Threats (T) Susunan daftar ancaman	Strategi ST Pakai kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Perkecil kelemahan dan hindari ancaman

Sumber: R. Fredy (1997;65)

3.6.2.2. Analisis Matriks Faktor Strategi Internal dan Eksternal (IFAS - EFAS)

Tabel IFAS

Strengths (S) Kekuatan	Skala Prioritas (SP)	Konstanta (K)	SP x K	Bobot
Menguraikan Kekuatan Pada Lingkungan Internal	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktormulai dari 8-9 sangat baik, 7 baik, 5-6 kurang baik dan <5 buruk	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor berdasarkan jumlah Faktor yang diuraikan	Mengkalikan masing-masing faktor nilai skala prioritas dengan nilai konstanta	Membagiikan nilai dari masing-masing hasil perkalian antara SP x K dengan jumlah total
Total				
Weaknesses (W) Kelemahan	Skala Prioritas (SP)	Konstanta (K)	SP x K	Bobot
Menguraikan Kelemahan Pada Lingkungan Internal	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor mulai dari 8-9 sangat baik, 7 baik, 5-6 kurang baik dan <5 buruk	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor berdasarkan jumlah Faktor yang diuraikan	Mengkalikan masing-masing faktor nilai skala prioritas dengan nilai konstanta	Membagiikan nilai dari masing-masing hasil perkalian antara SP x K dengan jumlah total
Total				

Sumber : Afid Burhanuddin, M.Pd. 2013

Tabel EFAS

Opportunities (O) Peluang	Skala Prioritas (SP)	Konstanta (K)	SP x K	Bobot
Menguraikan Peluang Pada Lingkungan Eksternal	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor mulai dari 8-9 sangat baik, 7 baik, 5-6 kurang baik dan <5 buruk	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor berdasarkan jumlah Faktor yang diuraikan	Mengkalikan masing-masing faktor nilai skala prioritas dengan nilai konstanta	Membagikan nilai dari masing-masing hasil perkalian antara SP x K dengan jumlah total
Total				
Threats (T) Ancaman	Skala Prioritas (SP)	Konstanta (K)	SP x K	Bobot
Menguraikan Ancaman Pada Lingkungan Eksternal	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor mulai dari 8-9 sangat baik, 7 baik, 5-6 kurang baik dan <5 buruk	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor berdasarkan jumlah Faktor yang diuraikan	Mengkalikan masing-masing faktor nilai skala prioritas dengan nilai konstanta	Membagikan nilai dari masing-masing hasil perkalian antara SP x K dengan jumlah total
Total				

Sumber : Afid Burhanuddin, M.Pd. 2013

3.6.2.3. Analisis Matriks Nilai Skor Faktor Strategi Internal dan Eksternal (IFAS - EFAS)

Tabel Nilai Skor IFAS

Strengths (S) Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
Menguraikan Kekuatan Pada Lingkungan Internal	Menguraikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor mulai dari 4 sangat kuat, 3 kurang, 2 rata-rata dan 1 lemah	Mengkalikan masing-masing faktor nilai bobot dengan nilai rating
Total	Jumlah Keseluruhan nilai bobot	-	Jumlah Keseluruhan nilai skor
Weaknesses (W) Kelemahan	Bobot	Rating	Skor
Menguraikan Kelemahan Pada Lingkungan Internal	Menguraikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor mulai dari 4 sangat kuat, 3 kurang, 2 rata-rata dan 1 lemah	Mengkalikan masing-masing faktor nilai bobot dengan nilai rating
Total	Jumlah Keseluruhan nilai bobot	-	Jumlah Keseluruhan nilai skor

Sumber : Afid Burhanuddin, M.Pd. 2013

Tabel Nilai Skor EFAS

<i>Opportunities (O)</i> Peluang	Bobot	Rating	Skor
Menguraikan Peluang Pada Lingkungan Eksternal	Menguraikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor mulai dari 4 sangat kuat, 3 kurang, 2 rata-rata dan 1 lemah	Mengkalikan masing-masing faktor nilai bobot dengan nilai rating
Total	Jumlah Keseluruhan nilai bobot	-	Jumlah Keseluruhan nilai skor
<i>Threats (T)</i> Ancaman	Bobot	Rating	Skor
Menguraikan Ancaman Pada Lingkungan Eksternal	Menguraikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor	Memberikan Rens Bobot Pada Masing-Masing Faktor mulai dari 4 sangat kuat, 3 kurang, 2 rata-rata dan 1 lemah	Mengkalikan masing-masing faktor nilai bobot dengan nilai rating
Total	Jumlah Keseluruhan nilai bobot	-	Jumlah Keseluruhan nilai skor

Sumber : Afid Burhanuddin, M.Pd. 2013

3.6.2.4. Analisis Kuadran

Dari hasil analisis matriks IFAS dan EFAS serta nilai skor IFAS dan EFAS kemudian digambarkan dalam bentuk analisis kuadran yang meliputi sebagai berikut;

1) Kuadran I (Pengembangan dan Pertumbuhan)

Dalam kuadran ini kekuatan yang dimiliki lebih dominan dari pada kelemahannya, di samping itu peluang untuk tumbuh sangat bagus.

2) Kuadran II (Stabilitas dan Konsolidasi Internal)

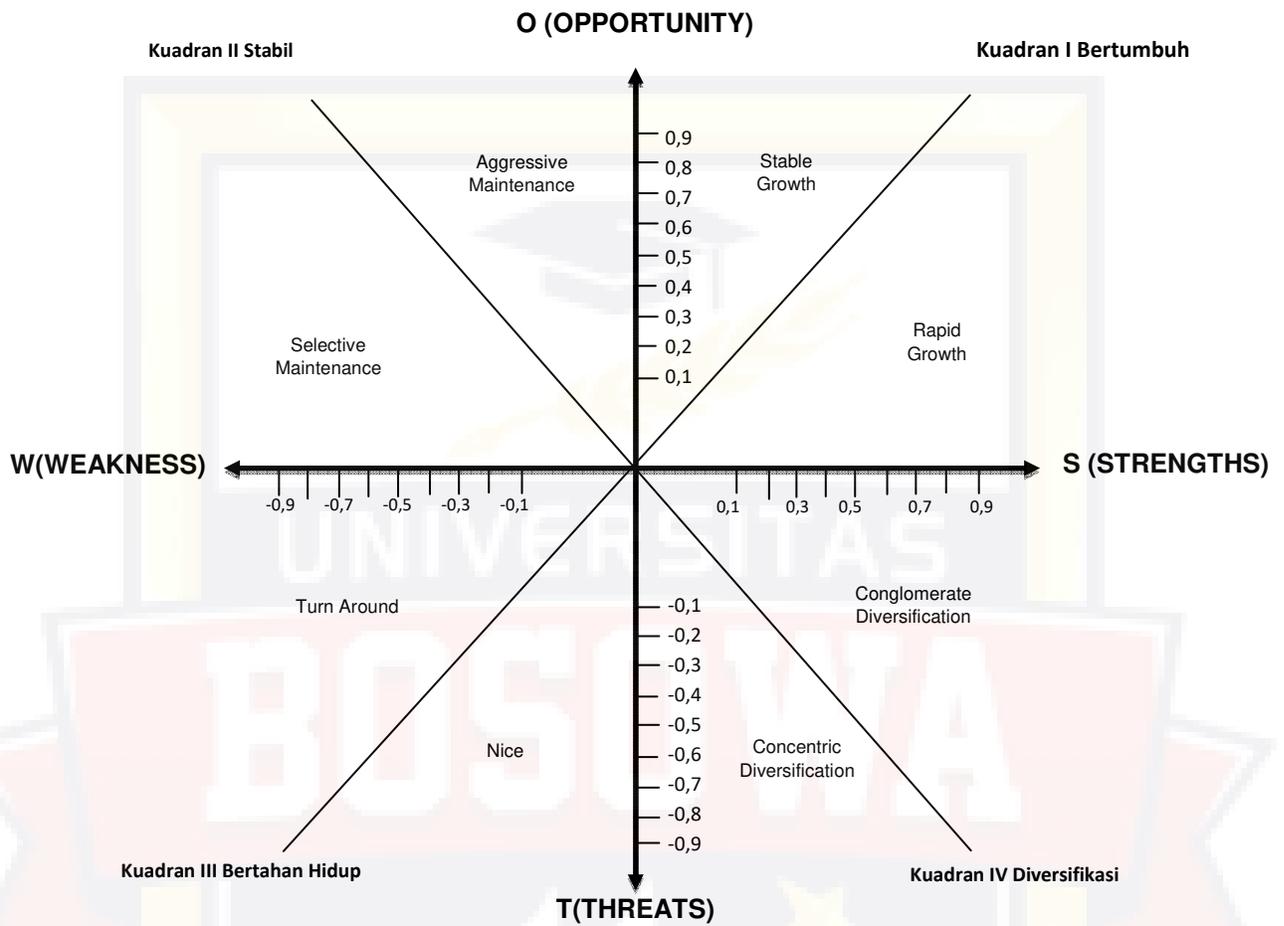
Peluang untuk tumbuh masih ada dengan terlebih dulu harus mengadakan stabilitas dan konsolidasi internal, karena masih ada kelemahan faktor internal.

3) Kuadran III (Penciutan Kegiatan)

Dalam kuadran ini menghadapi tantangan yang cukup berat, karena tidak mempunyai peluang untuk tumbuh dan kondisi internal lemah.

4) Kuadran IV (Diversifikasi Kegiatan)

Dalam kuadran ini posisi keberadaan pasar sangat kecil dan tingkat pertumbuhan rendah sehingga perlu dilakukan diversifikasi.



Sumber : Afid Burhanuddin, M.Pd. 2013

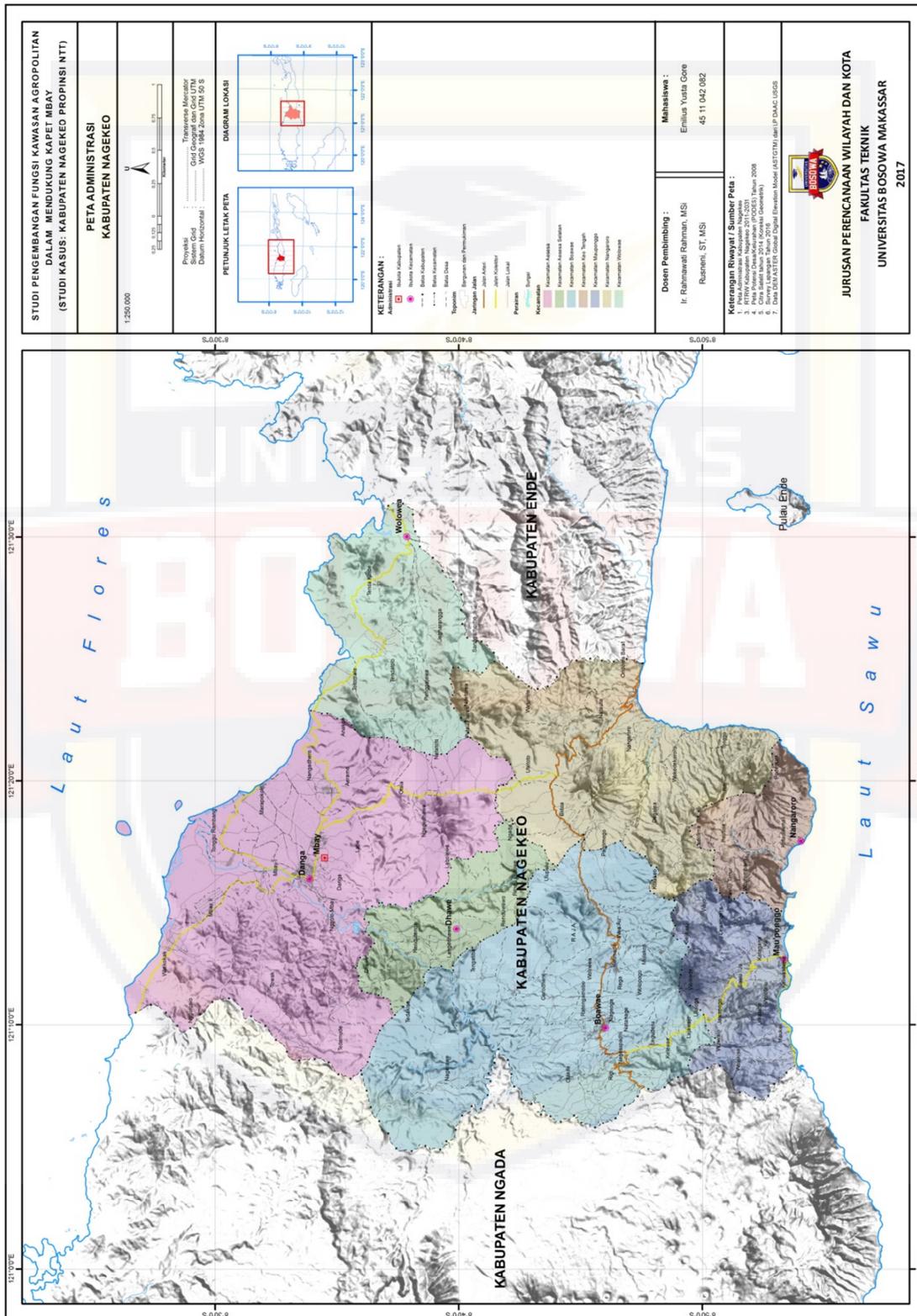
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Nagekeo memiliki luas wilayah 1.410,36 km², dan secara administratif terdiri atas 7 kecamatan, 97 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan dengan luas areal terbesar adalah Kecamatan Aesesa yang mencapai 432,29 km² atau 30,51% dari luas total Kabupaten Nagekeo disusul Kecamatan Boawae dengan luas wilayah 325,42 km² atau 22,97% dari luas total Kabupaten Nagekeo. Sebaliknya kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Aesesa Selatan dengan luas wilayah masing-masing 65,62 km² dan 71 km² atau setara dengan 4,63% dan 5,01% dari total wilayah Kabupaten Nagekeo.

Letak Kabupaten Nagekeo cukup strategis yaitu dibagian tengah Pulau Flores. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Laut Sawu, sebelah timur dengan Kabupaten Ende, dan sebelah barat dengan Kabupaten Ngada. Secara astronomis Kabupaten Nagekeo terletak di antara 8°26'00"- 8°64' 40" lintang selatan dan 121°6'20" - 121°32' 00" bujur timur.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Nagekeo

Tabel 4.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Nagekeo

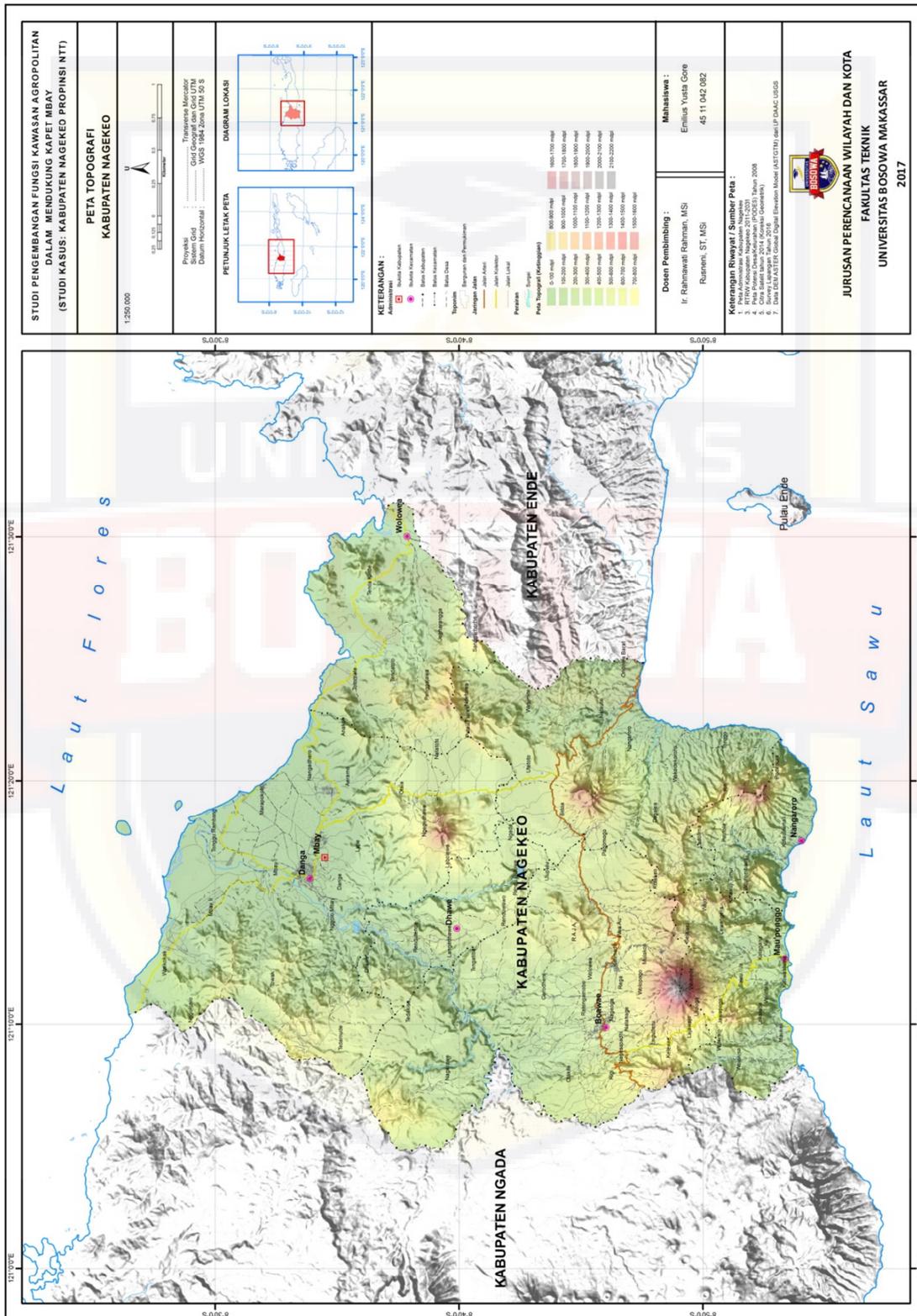
No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km ²)	(%)
		Desa	Kelurahan		
1	Mauponggo	20	1	102,52	7,24
2	Keo Tengah	16	-	65,62	4,63
3	Nangaroro	18	1	238,02	16,80
4	Boawae	19	8	325,42	22,97
5	Aesesa Selatan	7	-	71,00	5,01
6	Aesesa	12	6	432,29	30,51
7	Wolowae	5	-	182,09	12,85
	Jumlah	97	16	1.416,96	100,00

Sumber: Nagekeo dalam Angka, 2016

4.1.1. Aspek Fisik Dasar Wilayah

4.1.1.1. Topografi

Dari segi biofisik, elevasi tanah di Kabupaten Nagekeo sangat bervariasi dari ± 0 m s.d. 925 m dari permukaan laut (dpl), seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Elevasi yang dominan adalah kelas 0-250 m dpl yang menempati areal sekitar 62.454,17 ha, atau sekitar 44,08% dari total area kabupaten, selanjutnya elevasi 251- 500 m dpl dengan area sekitar 41.949,7 ha atau 29,61% dari luas Kabupaten Nagekeo. Sedangkan wilayah Kabupaten Nagekeo yang menempati luasan paling kecil yaitu 8.700 ha atau 6,18%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Gambar 4.2. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Nagekeo

Tabel 4.2

Elevasi Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2016

No	Kecamatan	Elevasi Lahan (Ha)			
		0-250 m dpl	251-500 m dpl	501-750 m dpl	>750 m dpl
1	Mauponggo	1.575,61	4.481,63	3.018,76	1.180,00
2	Keo Tengah	3.687,00	2.013,00	1.237,00	0
3	Nangaroro	9.424,00	6.189,00	8.190,00	0
4	Boawae	9.152,00	9.120,00	6.700,00	7.570,00
5	Aesesa Selatan	-	7.100,00	-	-
6	Aesesa	35.243,56	1.210,07	639,37	0
7	Wolowae	3.372,00	11.836,00	3.001,00	0
	Jumlah	62.454,17	41.949,70	28.542,13	8.750,00

Sumber: Nagekeo dalam Angka, 2016



Gambar disamping menunjukkan bahwa topografi di kabupaten Nagekeo merupakan wilayah bercorak perbukitan dan yang kemiringannya landai berbukit.

4.1.1.2. Kemiringan Lereng

Berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada luasan sempit merupakan ciri topografi Kabupaten Nagekeo. Kebanyakan permukaannya berbukit dan bergunung, dataran-dataran sempit memanjang

disekitar pantai diapit oleh dataran tinggi atau sistem perbukitan. Berdasarkan tingkat kemiringan lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo mempunyai kemiringan lahan antara 16° s/d 60° yang mencakup 37,16% dari total luas wilayah serta yang paling terjal memiliki luasan paling kecil yaitu sekitar 711 ha atau 0,83 % dari luas keseluruhan wilayah kabupaten. Berdasarkan data dari BPS, luas wilayah berdasarkan kemiringan lahan sebagai berikut:

- a. Kemiringan $0 - 3^{\circ}$ seluas 18.855 ha (13,37%)
- b. Kemiringan $4 - 8^{\circ}$ seluas 7.635 ha (5,41%)
- c. Kemiringan $9 - 15^{\circ}$ seluas 581 ha (4,12%)
- d. Kemiringan $16 - 25^{\circ}$ seluas 25.402 ha (37,16%)
- e. Kemiringan $26 - 40^{\circ}$ seluas 3.214 ha (25,68%)
- f. Kemiringan $40 - 60^{\circ}$ seluas 25.297 ha (17,94%)
- g. Kemiringan $> 60^{\circ}$ seluas 711 ha (0,83%)

4.1.1.3. Geologi

Kabupaten Nagekeo termasuk daerah vulkanis muda. Klasifikasi tanah di Kabupaten Nagekeo terdiri dari jenis tanah Mediteran, Latosol dan Aluvial. Bahan galian C banyak ditemukan di Kabupaten Nagekeo. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemetaan semi mikro oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperlihatkan biji besi di Kecamatan Aesesa, kadar Ferum (Fe) sekitar 72%. Granit di Desa Nggolonio, Zeolit di Marapokot (Kecamatan Aesesa) seluas 9,6 ha, di

Kecamatan Nangaroro seluas 313 ha dan di Desa Totomala (Kecamatan Wolowae) terdapat di daerah konservasi air, dengan potensi lestari sekitar 266.721.653 m³. Bahan galian batu kapur, marmer di Desa Gerodhere (Kecamatan Boawae) luas penyebaran belum teridentifikasi. Bahan galian pasir batu di Kecamatan Aesesa jumlah sumberdaya 2.783.483 m³ di Kecamatan Boawae terdapat di Desa Wolopogo dan Desa Nageoga jumlahnya 191.908.817 m³, sirtu di Desa Ulupulu (Kecamatan Nangaroro) dengan luas 1 (satu) ha. Bahan galian tanah liat terdapat di Kelurahan Danga (Kecamatan Aesesa) seluas 753,93 ha dengan ketebalan 1,5 m – 2 m dan Watuapi memiliki kandungan sebesar 17.648.547 ton.

4.1.1.4. Iklim dan Curah Hujan

Secara umum Kabupaten Nagekeo beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara Bulan Desember hingga Maret dan musim kemarau antara Bulan April hingga November. Kecamatan Boawae memiliki curah hujan terbesar selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2013 s/d 2015, yaitu lebih dari 2.500 mm dan mencapai lebih dari 3.000 mm pada tahun 2015, disusul Kecamatan Mauponggo yang memiliki curah hujan sebesar 2.008 mm pada tahun 2015. Curah hujan Kecamatan Mauponggo, Keo Tengah, Boawae, Aesesa Selatan dan Wolowae cenderung meningkat selama

periode 2011 s/d 2015, sedangkan curah hujan di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Nangaroro cenderung fluktuatif.

Tabel 4.3
Curah Hujan Periode 2011-2015

No	Kecamatan	Curah Hujan/Tahun (mm)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mauponggo	165,00	1.703,00	2.318,00	1.583,00	2.008,00
2.	Keo Tengah	325,00	1.466,00	1.747,00	1.626,00	1.802,00
3.	Nangaroro	93,00	1845,00	1.960,00	1.140,00	1.120,00
4.	Boawae	156,00	777,00	2.644,50	2.659,00	3.058,00
5.	Aesesa (Danga)	103,00	1.328,00	944,10	1.035,00	622,00
6.	Aesesa (Boanio)	-	883,00	1.949,50	574,00	926,00
7.	Aesesa Selatan	-	-	-	685,00	1.161,00
8.	Wolowae	93,00	516,00	765,30	1.124,00	2.361,00

Sumber: Nagekeo dalam Angka 2016

4.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa dengan areal seluas 118.074,29 ha masuk dalam dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Nagekeo seluas 70.980,15 ha yang sebagian besar berada pada wilayah hilir dan Kabupaten Ngada seluas 47.094,14 ha yang sebagian besar berada pada wilayah hulu. Sub DAS Aesesa terdiri dari Wae Woki, Wulabhara, Aelia-Nagerawe, Gako, Aemau, di antara sub DAS tersebut, tiga sub DAS terletak di wilayah Kabupaten Nagekeo yaitu sub DAS Aelia-Nagerawe, Gako, dan Aemau. Sungai Aesesa merupakan sungai utama dari DAS Aesesa dengan debit $\pm 7 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim hujan dan $\pm 3 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim kemarau.

Beberapa sungai lain yaitu; Ae Bha, Lowo Lele, Natabhada (Boawae), Ae Maunori (Keo Tengah), Lowo Redu (Aesesa Selatan); Sungai Nangaroro, Nangemere, Ndetunura (Nangaroro), serta beberapa sungai lain yang tersebar merata di setiap kecamatan. Terdapat juga 290 mata air yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Nagekeo, dan diantaranya telah digunakan masyarakat sebagai sumber air minum. Mata air yang telah digunakan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Mata Air yang Telah Digunakan Sebagai Sumber Air Minum

No	Mata Air	Debit (m ³ /dt)	Wilayah Pelayanan
1.	Wugha-wugha I	0,010	Kecamatan Aesesa
2.	Napunipa / Jano	0,020	Kecamatan Aesesa
3.	Wugha-wugha II	0,003	Kecamatan Aesesa
4.	Zita Lewa	0,003	Kecamatan Aesesa Selatan
5.	Tu Dhanga	0,002	Kecamatan Aesesa Selatan
6.	Napu Gere	0,005	Kecamatan Aesesa Selatan
7.	Oki Bobe	0,006	Kecamatan Aesesa Selatan
8.	Hobo Dhoki	0,003	Kecamatan Mauponggo
9.	Hobo Ae Kata	0,002	Kecamatan Mauponggo
10.	Wawi Bo	0,003	Kecamatan Mauponggo
11.	Oki Tana To	0,002	Kecamatan Mauponggo
12.	Eko Kubho	0,002	Kecamatan Mauponggo
13.	Eko Toba	0,001	Kecamatan Mauponggo

No	Mata Air	Debit (m ³ /dt)	Wilayah Pelayanan
14.	Labo Pusu	0,003	Kecamatan Mauponggo
15.	Hobo Yunga	0,002	Kecamatan Mauponggo
16.	Labo Bela	0,002	Kecamatan Mauponggo
17.	Labo Muku Watu	0,003	Kecamatan Mauponggo
18.	Lowo Labo	0,002	Kecamatan Mauponggo
19.	Ae Woka	0,002	Kecamatan Mauponggo Watuwela
20.	Ae Tana	0,001	Kecamatan Mauponggo Watuwela
21.	Ae Ndika	0,001	Kecamatan Mauponggo Watuwela
22.	Mata Air Kungu	0,001	Kecamatan Mauponggo
23.	Ae Koda	0,001	Kecamatan Mauponggo
24.	Ae Ghaju Ege	0,001	Kecamatan Mauponggo
25.	Ae Kata	0,001	Kecamatan Mauponggo
26.	Ae Lade	0,001	Kecamatan Boowae
27.	Uta Ngeta I	0,002	Kecamatan Nangaroro
28.	Lowo Labo	0,004	Kecamatan Nangaroro
29.	Lowo Tu'u	0,002	Kecamatan Nangaroro
30.	Utangeta II	0,002	Kecamatan Nangaroro
31.	Ae Kana	0,001	Kecamatan Nangaroro
32.	Ae Api	0,001	Kecamatan Nangaroro
33.	Ae Tele	0,003	Kecamatan Nangaroro
34.	Ae Bhia	0,002	Kecamatan Nangaroro

Sumber: RTRW Kabupaten Nagekeo, 2011

4.1.2. Kependudukan

4.1.2.1. Kepadatan Penduduk

Nagekeo dalam angka tahun 2016 yang diperlihatkan pada Tabel 4.5 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo selama kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan jumlah absolut. Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo meningkat dari 132.458 jiwa di tahun 2011 menjadi 141.851 jiwa di tahun 2015.

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagekeo Periode 2011-2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mauponggo	21.616	20.711	20.561	22.300	22.944
2.	Keo Tengah	13.048	12.573	13.428	13.619	13.768
3.	Nangaroro	20.131	17.909	17.172	18.620	19.658
4.	Boawae	33.888	33.110	33.917	34.402	35.846
5.	Aesesa Selatan	6.638	6.335	6.252	6.593	7.942
6.	Aesesa	32.144	31.258	33.901	35.913	36.718
7.	Wolowae	4.993	4.865	4.889	4.934	4.975
Jumlah		132.458	126.761	130.120	136.381	141.851

Sumber: Nagekeo dalam Angka, 2016

Dilihat dari sebaran penduduk seperti terlihat pada Tabel 4.6, jumlah penduduk dengan prosentase tertinggi selama dua tahun terakhir berturut-turut adalah Kecamatan Aesesa dan Boawae, dimana pada Tahun 2015 prosentase masing-masing adalah 25,88% dan 25,27% dari total penduduk Kabupaten Nagekeo. Sementara pada tahun yang sama prosentase penduduk terendah terdapat di Kecamatan Wolowae dan Aesesa Selatan

berturut-turut 3,51% dan 5,60% dari total penduduk Kabupaten Nagekeo.

Tabel 4.6

Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	% Penduduk			
		2012	2013	2014	2015
1.	Mauponggo	16,34	15,83	16,35	16,17
2.	Keo Tengah	9,92	10,34	9,99	9,71
3.	Nangaroro	14,13	13,18	13,65	13,86
4.	Boawae	26,12	26,00	25,22	25,27
5.	Aesesa Selatan	5	4,81	4,83	5.6
6.	Aesesa	24,66	26,08	26,33	25,88
7.	Wolowae	3,84	3,76	3,62	3,51

Sumber: Nagekeo dalam Angka, 2016

4.1.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan agama seperti terlihat pada grafik dibawah ini, hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan penduduk beragama Katolik merupakan jumlah terbesar di Kabupaten Nagekeo, disusul penduduk beragama Islam, sisanya adalah penduduk beragama Kristen Protestan dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pada halaman selanjutnya di bawah ini:

Grafik 4.1



Sumber: Sensus Penduduk di Kab. Nagekeo tahun, 2010

4.1.2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan kriteria pendidikan, prosentase penduduk umur 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Prosentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016

Ijazah Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Punya Ijazah	35,28	33,27	34,25
SD/MI sederajat	34,33	36,54	35,46
SLTP/MTs sederajat	12,52	12,47	12,49
SLTA/MA sederajat	12,61	10,76	11,66
Diploma I/II	0,57	1,38	0,98
Diploma III/Sarjana Muda	2,02	1,15	1,57
Diploma IV/S1/S2/S3	2,67	4,44	3,58

Sumber: Nagekeo dalam Angka, 2016

Prosentase penduduk Kabupaten Nagekeo berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki yaitu sebesar 35,46 persen penduduk tamat Sekolah Dasar (SD)/sederajat, sebesar 12,49 persen tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat, sebesar 11,66 persen tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, sebesar 0,98 persen Diploma I/II, sebesar 1,57 persen Diploma III/Sarjana Muda, dan sebesar 4,44 persen Diploma IV/S1/S2/S3.

4.1.2.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan yang memperlihatkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Nagekeo terdiri dari laki-laki kurang lebih 67.917 jiwa dan jumlah penduduk perempuan kurang lebih 71.660 jiwa. Secara rinci struktur penduduk menurut usia diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.8.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Nagekeo, Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Mauponggo	10.656	11.400	22.056	93,47
2.	Keo Tengah	6.753	7.670	14.405	87,81
3.	Nangaroro	8.664	13.450	18.422	88,79
4.	Boawae	17.848	18.534	36.382	96,80
5.	Aesesa Selatan	3.76	3.430	6.706	95,51
6.	Aesesa	18.142	18.221	36.363	99,57
7.	Wolowae	2.596	2.674	5.243	98,07
Jumlah		67.917	71.660	139.577	94,78

Sumber : BPS Kabupaten Nagekeo, Tahun 2016

4.1.2.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kajian tentang struktur penduduk menurut usia dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pada setiap kelompok umur tertentu, terutama kelompok umur yang berkaitan dengan usia sekolah, usia kerja, dan usia produktif atau usia angkatan kerja. Jika dilihat dari struktur umur, prosentase penduduk berumur kurang dari 15 tahun (0-14 tahun) menunjukkan peningkatan dari 35,53% pada tahun 2014 menjadi 37,56% pada tahun 2015. Sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dari 6,71% menjadi 6,14% dalam kurun waktu yang sama. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) dari 57,76% pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 56,30% pada tahun 2015.

Tabel 4.9

Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Nagekeo, Tahun 2015

Tahun	Struktur Umur (%)		
	0- 14	15- 64	65 +
2011	36,66	56,85	6,49
2012	34,52	59,23	6,26
2013	36,02	57,47	6,51
2014	35,53	57,76	6,71
2015	37,56	56,30	6,14

Sumber: Nagekeo dalam Angka, 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat struktur umur produktif lebih banyak dengan persentase antara 56,30%-59,23% dari total penduduk kabupaten.

4.1.2.6. Struktur Ketenagakerjaan

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun meskipun telah melakukan telah melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup tidak terkategori sebagai angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal ini terjadi karena faktor alamiah seperti kelahiran, kematian maupun perpindahan yang menyebabkan bergesernya pola kependudukan secara keseluruhan.

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja cenderung menurun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya mismatch dalam pasar kerja. Menurut data dari BPS Kab. Nagekeo jumlah pekerja lebih banyak pada lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan berjumlah 45.706 jiwa, sementara perkerja yang paling sedikit bekerja pada lapangan usaha Listrik Gas dan Air minum yang berjumlah 188 jiwa. Secara lebih terperinci data yang tercatat di BPS dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.10

Pekerja Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Nagekeo, Tahun 2015

No	Lapangan Usaha	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	27.388	18.318	45.706
2.	Industri	877	4.576	5.453
3.	Listrik, Gas Dan Air Minum	188	-	188
4.	Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa Akomodasi	1.879	2.163	4.042
5.	Konstruksi	1.751	248	1.999
6.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.704	-	1.704
7.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan Dan Jasa Peusahaan	497	160	657
8.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	2.668	4.950	7.618
Total		36.952	30.415	67.367

Sumber: Nagekeo dalam Angka, 2016

4.1.2.7. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh produk barang dan jasa akhir atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan dimiliki oleh penduduk Kabupaten Nagekeo atau tidak. Sistem penilaian yang umum digunakan untuk menghitung PDRB ada dua, yaitu atas dasar harga yang berlaku pada tahun penghitungan dan atas dasar harga konstan

pada tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Terdapat 9 (sembilan) lapangan usaha yang ada berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2008-2012.

Tabel 4.11

Nilai dan Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo atas Dasar Harga Berlaku 2008 – 2012

NO	SEKTOR	2008		2009		2010		2011		2012	
		Rp (Juta Rupiah)	%								
1	Pertanian	393.177,47	69,27	434.241,61	69,29	476.550,11	68,39	524.956,67	67,42	583.631,24	66,78
2	Pertambangan & Penggalian	3.602,75	0,63	4.013,89	0,64	4.345,49	0,62	4.891,05	0,63	5.574,99	0,64
3	Industri	10.818,83	1,91	11.917,32	1,90	13.280,76	1,90	14.723,54	1,89	16.095,13	1,84
4	Listrik & Air Minum	1.230,77	0,22	1.383,53	0,22	1.568,96	0,23	1.776,87	0,23	2.028,6	0,23
5	Bangunan/ Konstruksi	31.642,81	5,58	34.249,08	5,46	37.814,13	5,43	42.655,6	5,48	47.261,37	5,41
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	35.516,70	6,25	39.722,29	6,34	45.153,45	6,48	51.537,69	6,62	59.138,23	6,77
7	Angkutan & Komunikasi	21.949,41	3,87	23.174,52	3,70	25.526,59	3,66	27.939,65	3,59	30.610,69	3,50
8	Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	12.417,21	2,19	13.725,42	2,19	15.236,44	2,19	17.167,51	2,20	19.301,2	2,21
9	Jasa-Jasa	57.210,20	10,08	64.303,01	10,26	77.363,63	11,10	92.938,26	11,94	110.289,97	12,62
	PDRB	567.566,16	100	626.730,67	100	696.839,56	100	778.586,84	100	873.931,42	100

Sumber: Indikator Ekonomi Kabupaten Nagekeo, 2009-2013

Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Nagekeo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2012 masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 66,78 persen. Diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 12,62 persen dan kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,77 persen. Meskipun pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam postur

PDRB, akan tetapi sektor ini mengalami penurunan selama periode 2008-2012. Sebaliknya sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran terus mengalami peningkatan. Sektor jasa meningkat dari 10,08 persen pada tahun 2008 menjadi 12,62 persen pada tahun 2012 dan sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat dari 6,25 persen pada tahun 2008 menjadi 6,77 persen pada tahun 2012 untuk. Hal ini mencerminkan berkembangnya perekonomian Kabupaten Nagekeo yang telah bergerak ke sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sedangkan berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo
atas Dasar Harga Konstan 2008 – 2012

NO	SEKTOR	2008		2009		2010		2011		2012	
		Rp (Juta Rupiah)	%	Rp (Juta Rupiah)	%	Rp (Juta Rupiah)	%	Rp (Juta Rupiah)	%	Rp (Juta Rupiah)	%
1	Pertanian	192.151,544	4,86	202.637,34	5,46	207.486,43	2,39	213.434,53	2,87	220.233,41	3,19
2	Pertambangan & Penggalian	1.899,646	4,21	1.940,11	2,13	2.013,96	3,81	2.093,85	3,97	2.178,71	4,05
3	Industri	5.977,973	2,67	6.150,14	2,88	6.342,02	3,12	6.566,53	3,54	6.802	3,59
4	Listrik & Air Minum	58,53	4,15	620,01	5,93	657,19	6	697,1	6,07	738,9	6
5	Bangunan/ Konstruksi	16.779,386	3,9	17.102,39	1,93	17.651,38	3,21	18.287,99	3,61	19.159,68	4,77
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	16.093,41	5,21	17.040,67	5,89	18.049,19	5,92	19.132,87	6	20.366,92	6,45
7	Angkutan & Komunikasi	10.810,495	2,84	10.985,79	1,62	11.416,85	3,92	11.807,26	3,42	12.217,75	3,48
8	Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	6.233,092	2,86	6.487,54	4,08	6.834,3	5,35	7.191,5	5,23	7.608,61	5,8
9	Jasa-Jasa	30.127,331	5,52	31.898,55	5,88	35.617,53	11,66	39.168,53	9,97	43.123,68	10,1
	PDRB TANPA MIGAS	280.658,172	4,71	294.862,54	4,74	306.068,85	3,8	318.380,16	4,02	332.429,66	4,41

Sumber: Indikator Ekonomi Kabupaten Nagekeo, 2009-2013

Kontribusi sektor ekonomi terhadap harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 4.13
Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo
atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2008 – 2012

NO	SEKTOR	TAHUN									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	Pertanian	69,2 7	4,86	69,2 9	5,46	68,39	2,39	67,42	2,87	66,78	3,19
2	Pertambangan & Penggalian	0,63	4,21	0,64	2,13	0,62	3,81	0,63	3,97	0,64	4,05
3	Industri	1,91	2,67	1,9	2,88	1,9	3,12	1,89	3,54	1,84	3,59
4	Listrik & Air Minum	0,22	4,15	0,22	5,93	0,23	6	0,23	6,07	0,23	6
5	Bangunan/ Konstruksi	5,58	3,9	5,46	1,93	5,43	3,21	5,48	3,61	5,41	4,77
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6,25	5,21	6,34	5,89	6,48	5,92	6,62	6	6,77	6,45
7	Angkutan & Komunikasi	3,87	2,84	3,7	1,62	3,66	3,92	3,59	3,42	3,5	3,48
8	Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	2,19	2,86	2,19	4,08	2,19	5,35	2,2	5,23	2,21	5,8
9	Jasa-Jasa	10,0 8	5,52	10,2 6	5,88	11,1	11,66	11,94	9,97	12,62	10,1
	PDRB	100	4,71	100	4,74	100	3,8	100	4,02	100	4,41

Sumber: Indikator Ekonomi Kabupaten Nagekeo, 2009-2013

Kontribusi sektor ekonomi terhadap harga berlaku dan harga konstan perkecamatan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14

Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Perkecamatan Tahun 2012

NO	SEKTOR/KECAMATAN	Mauponggo		Keo Tengah		Nangaroro		Boawae		Aesesa Selatan		Aesesa		Wolowae	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	63,11	3,23	55,69	2,33	61,11	2,09	71,86	3,38	50,43	1,68	71,48	3,54	66,81	2,28
2	Pertambangan & Penggalian	0,39	2,70	0,60	3,50	1,95	4,93	0,24	4,60	0,53	4,05	0,59	3,50	0,70	2,40
3	Industri	1,77	2,30	6,37	4,05	1,15	3,40	2,11	5,18	1,06	1,60	1,03	2,60	1,14	1,30
4	Listrik & Air Minum	0,18	4,92	0,16	4,21	0,22	4,18	0,20	6,33	0,00	-	0,36	6,97	0,15	3,56
5	Bangunan/ Konstruksi	6,47	4,01	5,62	2,50	7,03	4,56	4,70	5,48	7,55	1,57	4,39	7,23	5,83	1,47
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,34	4,88	7,99	4,91	10,34	5,20	5,59	8,23	8,25	2,93	5,56	8,42	3,65	4,61
7	Angkutan & Komunikasi	5,07	2,88	4,06	3,39	1,16	3,40	3,23		5,18	1,08	3,60	4,65	2,88	1,46
8	Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	2,63	5,02	3,31	3,75	1,79	4,45	2,37	6,73	2,27	3,08	1,84	7,54	1,57	2,99
9	Jasa-Jasa	12,04	10,24	16,21	8,86	15,25	9,86	9,70	10,84	24,74	7,88	11,16	11,57	17,27	8,04
	PDRB	100	4,71	100	3,83	100	4,32	100	4,40	100	3,80	100	4,82	100	3,81

Sumber: PDRB Kabupaten Menurut Kecamatan, 2010-2012

4.1.3. Potensi Sumber Daya Alam

Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari Kawasan hutan lindung seluas 11.071 Ha, hutan bakau mangrove seluas 1.201,40 ha, cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas 300 ha, sempadan pantai 1.016 ha dan taman wisata laut seluas 20 ha. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian yang mencakup kelompok tanaman pangan lahan basah, kelompok tanaman pangan lahan kering, palawija, buah-buahan, hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, dan lahan peternakan. Kawasan budidaya non-pertanian seluas 4.119,22 ha

yang mencakup kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di dalamnya termasuk perumahan, industri, pertambangan, pariwisata dan lain-lain di luar kawasan lindung dan budidaya pertanian. Kawasan budidaya non pertanian ini lebih dominan berada di pusat-pusat pertumbuhan wilayah baik perkotaan maupun perdesaan dengan dicirikan tersebarnya pusat-pusat pemukiman di setiap wilayah.

4.1.3.1. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian di Kabupaten Nagekeo dibagi menjadi empat kategori, yaitu

4.1.3.1.1. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian lahan basah adalah lahan yang sepanjang tahun dapat ditanami padi karena cukup air yang bersumber dari air irigasi. Potensi kawasan persawahan tersebar di Kecamatan Boawae, Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Wolowae, Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Nagekeo dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensinya di setiap wilayah kecamatan. Potensi pengembangan jagung terdapat pada Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae, Kecamatan Mauponggo dan Nangaroro. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan serta menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat perdesaan

serta perkotaan di kabupaten nagekeo secara khususnya, maupun ke kabupaten-kabupaten lain di wilayah Nusa Tenggara Timur, peluang ekstensifikasi, pemeliharaan saluran irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana dalam skala wilayah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kedua tabel selanjutnya sebagai berikut :

Tabel 4.15

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan Di Kab.
Nagekeo, Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Irigasi			Non	Tadah	Jumlah
	Teknis	½Teknis	Sederhana	Pu	Hujan	
Mauponggo	-	-	55	360	20	435
Keo Tengah	-	-	-	55	2	57
Nangaroro	-	-	-	69	91	160
Boawae	-	-	172	568	395	1.135
Aesesa Selatan	-	-	-	-	59	59
Aesesa	3.060	-	-	215	546	3.821
Wolowae	-	-	-	15	560	575
Jumlah	3.060	-	227	1.282	1.673	6.242
Persentase	49,02	0,00	3,64	20,54	26,80	100,00

Sumber: Dinas Pertanian Dan Pertenakan Kab. Nagekeo, 2016

Tabel 4.16

Luas Lahan Kering Fungsional Menurut Kecamatan Dan Jenis Penggunaan
Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015

Kecamatan	Potensi	Jenis Penggunaan			Jumlah	Persentase
		Pekarangan	Tegal	Ladang		
Mauponggo		-	-	55	20	435
Keo Tengah		-	-	-	2	57
Nangaroro		-	-	-	91	160
Boawae		-	-	172	395	1.135
Aesesa Selatan		-	-	-	59	59
Aesesa		3.060	-	-	546	3.821
Wolowae		-	-	-	560	575
Jumlah		3.060	-	227	1.673	6.242
Persentase		49,02	0,00	3,64	26,80	100,00

Sumber: Dinas Pertanian Dan Pertenakan Kab. Nagekeo, 2016

4.1.3.1.2. Holtikultura

Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Nagekeo diarahkan di Kecamatan Aesesa Selatan, Boawae dan Mauponggo. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.17

Sebaran Tanaman Holtikultura Menurut Kecamatan Dalam Jumlah Rumah Tangga dan Rumpun Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015

Tanaman Holtikultura		Kecamatan						
		Mauponggo	Keo Tengah	Nangaroro	Boawae	Aesesa Selatan	Aesesa	Wolowae
Pisang	Jumlah Rumah Tangga	2876	1062	2537	4623	0	1843	43
	Jumlah Rumpun	89822	22014	37123	107447	0	27896	5754
Jeruk	Jumlah Rumah Tangga	188	107	560	1055	2	136	15

	Jumlah Pohon	731	528	3272	4472	20	574	99
Mangga	Jumlah Rumah Tangga	508	471	1285	2487	76	1388	21
	Jumlah Pohon	2113	1603	6588	14719	1814	8916	142
Pepaya	Jumlah Rumah Tangga	370	768	627	1219	1	146	0
	Jumlah Pohon	6318	6869	5923	12131	50	2410	0
Kunyit	Jumlah Rumah Tangga	57	173	2	8	0	1	0
	Luas Tanam m ²	7993	1278	1300	3621	0	14	0
Jahe	Jumlah Rumah Tangga	151	129	2	88	0	1	0
	Luas Tanam m ²	56735	2195	60	69420	0	2	0
Kencur	Jumlah Rumah Tangga	10	16	0	0	0	0	0
	Luas Tanam m ²	970	402	0	0	0	0	0
Bawang Merah	Jumlah Rumah Tangga	1	0	2	38	0	4	0
	Luas Tanam m ²	300	0	256	813	0	11730	0
Bawang Putih	Jumlah Rumah Tangga	0	0	0	24	0	0	0
	Luas Tanam m ²	0	0	0	392	0	0	0
Cabai	Jumlah Rumah Tangga	80	572	228	208	0	54	0
	Luas Tanam m ²	11273	9101	32593	35652	0	11739	0
Cabai Besar	Jumlah Rumah Tangga	5	7	35	20	0	10	0
	Luas Tanam m ²	1250	75	17761	5714	0	2067	0
Cabai Hijau	Jumlah Rumah Tangga	1	7	6	2	0	0	0
	Luas Tanam m ²	200	75	27	20	0	0	0
Cabai Merah Besar	Jumlah Rumah Tangga	1	0	15	2	0	2	0
	Luas Tanam m ²	20	0	13751	700	0	1540	0
Cabai Merah Keriting	Jumlah Rumah Tangga	3	0	14	16	0	8	0
	Luas Tanam m ²	1030	0	3983	4994	0	527	0
Cabai Rawit	Jumlah Rumah Tangga	75	565	210	194	0	46	0
	Luas Tanam m ²	10023	926	14832	29938	0	9672	0

Sumber: Dinas Pertanian Dan Pertenakan Kab. Nagekeo, 2016

4.1.3.1.3. Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Nagekeo adalah 18.607,96 ha atau sekitar 13,13% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo yang tersebar di semua kecamatan, dengan jenis tanaman bervariasi tergantung dari topografi dan iklim masing-masing wilayah. Komoditi perkebunan utama adalah kelapa, kopi, kemiri, cengkeh, jambu mente, vanili, lada, dan pala yang tersebar di semua wilayah kecamatan Kabupaten Nagekeo.

Tabel 4.18
Sebaran Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Di Kab. Nagekeo,
Tahun 2015

Tanaman Perkebunan (ha)	Kecamatan						
	Mauponggo	Keo Tengah	Nangaroro	Boawae	Aesesa Selatan	Aesesa	Wolowae
Aren	2	0	1	124	0	0	0
Asam Jawa	1	0	106	13	0	0	0
Cengkeh	2950	1884	779	1130	1	24	6
Gambir	0	0	0	1	0	0	0
Jambu Mete	32	58	976	3008	389	749	616
Coklat	2713	2050	1406	2785	1	155	200
Kapuk	2	1	6	53	0	14	0
Kayu Manis	1	0	0	2	0	0	0
Kelapa	2660	2272	2272	3954	13	2080	87
Kemiri	1352	1287	1856	3874	175	721	62
Kopi	637	490	382	2775	1	87	29
Lada	4	31	2	21	0	0	0
Lontar	0	3	15	0	0	0	0
Panilli	0	14	1	4	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian Dan Pertenakan Kab. Nagekeo, 2016

4.1.3.1.4. Peternakan

Berdasarkan topografi dan curah hujan kawasan peruntukan peternakan ternak besar dan kecil tersebar di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae dan Kecamatan Nangaroro dengan luas kurang lebih 18.000 ha. Pengembangan komoditas ternak dapat berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan.

Tabel 4.19

Sebaran Hewan Ternak Menurut Kecamatan Di Kab. Nagekeo, Tahun 2015

Kecamatan	Hewan Ternak (Ekor)					
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Mauponggo	1819	987	217	5106	7	15612
Keo Tengah	664	231	211	3353	5	10461
Nangaroro	4347	402	383	3881	13	9933
Boawae	6985	1422	859	4626	21	18094
Aesesa Selatan	2769	636	362	2791	422	4229
Aesesa	8547	1539	728	16098	5152	18363
Wolowae	5917	698	249	2255	405	6416
Nagekeo	31048	5915	3009	38110	6025	83108
Persentase	18,56771	3,537362	1,79948	22,79102	3,603146	49,70128

Sumber: Dinas Pertanian Dan Pertenakan Kab. Nagekeo, 2016

Tabel 4.20

Sebaran Lahan Peruntukan Peternakan Menurut Kecamatan Di Kab.

Nagekeo, Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Ha)	
	Padang Penggembalaan	Kebun Dinas
Mauponggo	-	-
Keo Tengah	-	-
Nangaroro	650	40
Boawae	3552,5	45,5
Aesesa Selatan	3507	-
Aesesa	6323	11
Wolowae	3000	10
Nagekeo	17032,5	106,5

Sumber: Dinas Pertanian Dan Pertenakan Kab. Nagekeo, 2016

4.1.3.2. Sektor Perikanan

Wilayah Kabupaten Nagekeo yang berpotensi sebagai kawasan Minapolitan, yang meliputi Desa Anakoli, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Kelurahan Nangaroro, dan Kelurahan Mauponggo. Potensi perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap atau perikanan laut memiliki potensi pengembangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan pelabuhan perikanan Aewoe di Kecamatan Mauponggo;

- b. Pengembangan kawasan perikanan pesisir selatan; Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Mauponggo;
- c. Pengembangan kawasan perikanan pesisir utara; Desa Nangadhero (Kecamatan Aesesa) dan kawasan pesisir Kaburea (Kecamatan Wolowae);
- d. Pengembangan TPI di Marapokot di Kecamatan Aesesa; dan
- e. Pengolahan hasil ikan di Marapokot Kecamatan Aesesa.

4.1.4. Sarana dan Prasarana

4.1.4.1. Sarana Dan Prasarana Umum

Sarana dan Prasarana umum di Kabupaten Nagekeo yang terdata meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, jasa hotel dan prasarana pelabuhan. Dengan persentase tertinggi berada di Kecamatan Aesesa yaitu 24,57 %, disusul pada Kecamatan Mauponggo yaitu 20,00 %, Kecamatan Boawae yaitu 18,13 %, Kecamatan Nangroro 15,42 %, Kecamatan Keo Tengah yaitu 12,20 %, Kecamatan Aesesa Selatan yaitu 5,59 %, serta pada Kecamatan Wolowae dengan persentase terendah yaitu 4,06 %. Penyebaran sarana dan prasarana di kabupaten nagekeo terlihat tidak merata terlihat pada perbedaan persentase yang jauh pada setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.21

Penyebaran Sarana dan Prasarana Umum di Kab. Nagekeo

Kecamatan	Sarana Pendidikan	Sarana Kesehatan	Sarana Peribadatan	Sarana Koperasi	Sarana Hotel	Prasarana Pelabuhan	Total	Porsentase (%)
	(Unit)							
Kecamatan Mauponggo	38	23	48	8	0	1	118	20,00
Kecamatan Keo Tengah	31	14	18	9	0	0	72	12,20
Kecamatan Nangarororo	41	15	26	9	0	0	91	15,42
Kecamatan Boawae	50	23	20	12	2	0	107	18,13
Kecamatan Aesesa Selatan	16	6	8	3	0	0	33	5,59
Kecamatan Aesesa	62	22	37	17	5	2	145	24,57
Kecamatan Wolowae	12	6	4	2	0	0	24	4,06

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kab. Nagekeo tahun 2015.

4.1.4.2. Prasarana Jalan

Sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Nagekeo berdasarkan fungsi jalan terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan lokal primer. Berdasarkan status jalan, sistem jaringan jalan tersebut terdiri dari jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Jalan nasional di Kabupaten Nagekeo mencakup jalan arteri primer yang melintasi pulau Flores dengan segmen Rowa-Nangaboa sepanjang 60,47 km atau 7,78% dari keseluruhan panjang jalan sistem jaringan jalan Kabupaten Nagekeo. Dengan demikian penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jalan propinsi hanya meliputi beberapa jalan kolektor primer penting

di dalam wilayah Kabupaten Nagekeo dengan panjang jalan 130,10 kilometer atau 16,73% dari total panjang jalan di dalam sistem jaringan jalan Kabupaten Nagekeo. Ruas-ruas jalan provinsi tersebut antara lain Aegela - Dadiwuwu, Dadiwudu - Kaburea, Dadiwuwu - Perengating (arah Riung), Boawae - Bhia (batas Ngada ke Soa), Gako - Maupunggo dan Maupunggo - Maumbawa (batas Ngada). Selebihnya jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan propinsi dan semua jalan lokal primer merupakan jalan kabupaten.

Selain itu sistem jaringan jalan di Kabupaten Nagekeo juga terdapat jalan lingkungan dan sistem jaringan jalan sekunder. Sedangkan jalan lingkungan primer pada umumnya terdapat di kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan sekunder dan jalan lingkungan primer yang dimaksud, pembangunannya selain melalui alokasi anggaran di tingkat kabupaten, juga dibiayai melalui program-program pemberdayaan di desa dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 – 2031 dan dengan memperhatikan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan jalan primer terbagi atas jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer.

Jalan lokal primer yang berfungsi menghubungkan pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan atau antar pusat kegiatan lingkungan jumlahnya jauh lebih besar daripada jalan kolektor primer dan arteri primer. Atau dengan kata lain bahwa jalan kolektor primer yang berfungsi menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dan jalan arteri primer yang berfungsi menghubungkan pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan nasional jumlahnya lebih sedikit daripada jalan lokal primer. Kedua kategori jalan tersebut pada prinsipnya lebih melayani aspek pergerakan atau mobilitas di dalam wilayah dan antar wilayah di dalam Kabupaten Nagekeo maupun dengan kabupaten lainnya. Jalan menurut fungsi jalan di Kabupaten Nagekeo sepanjang jalan 777,62 km yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.22
Panjang Jalan Menurut Fungsi Jalan

Fungsi Jalan	Panjang (Km)	Prosentase
Jalan Arteri Primer	60,47	7,78%
Jalan Kolektor Primer	254,39	32,71%
Jalan Lokal Primer	462,77	59,51%
Total	777,62	100,00

Sumber: Bappeda dan Statistik 2016

Terlihat pada tabel di atas bahwa panjang jalan lokal primer lebih besar yaitu 462,77 km atau 59,51% dari total panjang jalan dibanding jalan kolektor primer yaitu 254,39 km atau 32,71% dan arteri primer yaitu 60, 47

km atau 7,78%. Terkait penentuan kondisi jalan, pada prinsipnya menggabungkan data *Road Condition Index* (RCI) dan Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT). Namun karena kesulitan untuk memperoleh data LHRT untuk sistem jaringan jalan di Kabupaten Nagekeo, penentuan kondisi jalan hanya didasarkan pada nilai RCI melalui deskripsi kondisi secara visual. Berdasarkan klasifikasi RCI sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011, tentang Tata cara pemeliharaan dan penilaian jalan, sistem jaringan jalan Kabupaten Nagekeo dapat dilakukan kategorisasi berdasarkan kondisi jalan sebagai berikut :

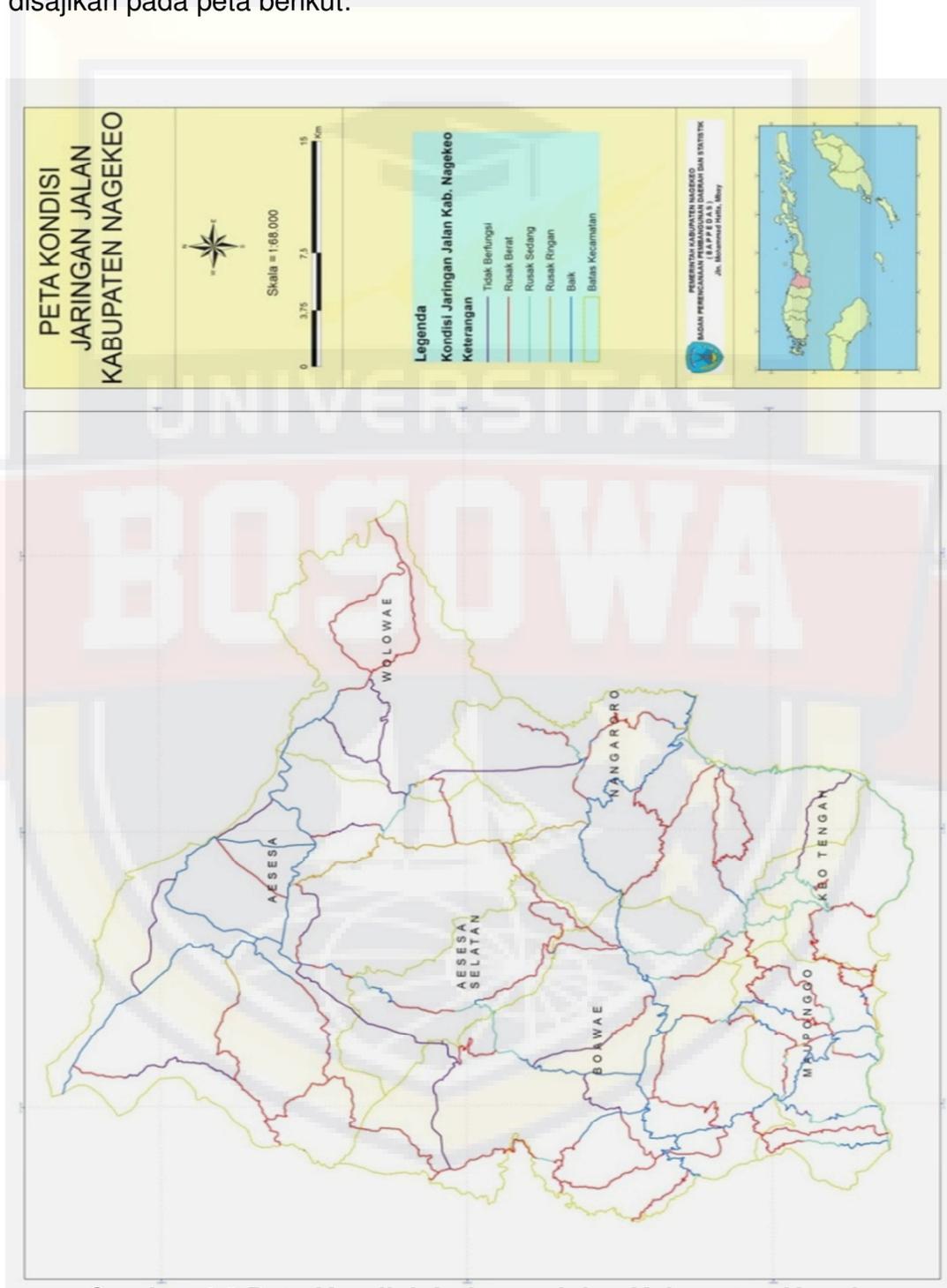
Tabel 4.23

Kondisi Jalan di Kabupaten Nagekeo Berdasarkan RCI

Kondisi Jalan	Deskripsi kondisi visual	Deskripsi permukaan jalan visual	Nilai RCI
Tidak berfungsi	Tidak bisa dilalui	Belum ada badan jalan, masih berbentuk jalan setapak atau belukar	0 - 2
Rusak Berat	Rusak berat, banyak lubang dari seluruh daerah permukaan jalan	Jenis konstruksi jalan tanah maupun semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4 - 5 tahun atau lebih)	2 - 3
Sedang	Rusak bergelombang, banyak lubang	Pemeliharaan berkala lama, permukaan cenderung berupa batu dan kerikil	3 - 4
Rusak Ringan	Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata	Pemeliharaan berkala setelah pemakaian 2 tahun	4 - 5
Baik	Baik, permukaan jalan rata, tidak ada lubang	Peningkatan berumur kurang dari 2 tahun serta perkerasan lebih dari 1 lapis.	> 5

Sumber: Bappeda dan Statistik 2016

Kondisi prasarana jaringan jalan di wilayah Kabupaten Nagekeo dapat disajikan pada peta berikut:



Gambar 4.3 Peta Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Nagekeo

Selanjutnya rincian panjang jalan dengan kondisinya masing-masing dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.24

Prosentase Kondisi Jalan di Kabupaten Nagekeo Berdasarkan RCI

Kondisi	Panjang (Km)	Prosentase
Baik	207,28	26,66%
Rusak Berat	342,82	44,09%
Rusak Sedang	97,06	12,48%
Rusak Ringan	31,47	4,05%
Tidak Berfungsi	99,00	12,73%
Total	777,62	100,00%

Sumber: Bappeda dan Statistik 2016

Dari tabel pada halaman sebelumnya terlihat bahwa kondisi jaringan jalan di Kabupaten Nagekeo didominasi oleh kondisi rusak berat sepanjang 342,82 km atau sekitar 44% dari total panjang jaringan jalan tersebut. Sementara jalan dengan kondisi baik hanya 27% dari panjang jaringan jalan atau 207,28 km. Yang menarik bahwa jalan dengan kondisi tidak berfungsi mencapai 12,73% dari panjang jaringan jalan atau 99 km. Hal ini dapat dijelaskan bahwa segmen jalan telah ada di dalam rencana tata ruang wilayah, namun jalan tersebut belum dapat dibangun. Selanjutnya jalan dengan kondisi rusak sedang dan rusak ringan masing-masing 12% dan 4% dari total panjang jaringan jalan atau 97,06 km dan 31,47 km. Walaupun proporsi jalan dengan kondisi tidak berfungsi sebesar 12,73% tidak cukup

signifikan dibandingkan dengan kondisi baik dan rusak, kondisi jalan yang tidak berfungsi tentu sangat berpengaruh terhadap akses dan mobilitas transportasi di wilayah Kabupaten Nagekeo.

Selain melakukan identifikasi terhadap kondisi jalan, adapun terdapat jenis-jenis konstruksi jalan yang meliputi jenis konstruksi hotmix, lapisan penetrasi (lapen), telford, agregat, tanah, rabat penuh dan rabat rel. Panjang jalan berdasarkan jenis konstruksi jalan dapat dilihat pada tabel pada halaman selanjutnya sebagai berikut:

Tabel 4.25

Jenis Konstruksi Jalan di Kabupaten Nagekeo

Jenis Konstruksi	Panjang (Km)	Prosentase
Hotmix	240,37	30,91%
Lapen	140,09	18,02%
Telford	2,68	0,34%
Agregat	61,48	7,91%
Tanah	301,31	38,75%
Rabat penuh	29,10	3,74%
Rabat rel	2,58	0,33%
Total	777,62	100,00%

Sumber: Bappeda dan Statistik, 2016

Terlihat pada di atas bahwa dari keseluruhan jaringan jalan di Kabupaten Nagekeo masih didominasi oleh jenis jalan tanah yaitu 39% atau 301,31 km. Kemudian diikuti oleh jalan dengan jenis konstruksi hotmix. Namun perlu disadari bahwa kontribusi terbesar untuk jenis konstruksi

hotmix tersebut adalah jalan dengan status jalan negara dan propinsi. Selain itu, juga masih terdapat cukup banyak konstruksi *jalan* dengan jenis lapisan penetrasi (lapen) dan agregat, yaitu 18% dan 8% dari total panjang jaringan jalan di Kabupaten Nagekeo. Walaupun semakin banyak konstruksi jalan yang menggunakan cement yang sering dikenal dengan konstruksi rabat (penuh dan rel) melalui berbagai program khususnya program-program pemberdayaan, jumlah jenis konstruksi ini masih belum cukup signifikan yaitu hanya 4% lebih dari seluruh total panjang jaringan jalan.

Dari database jaringan jalan yang ada dapat dilakukan kombinasi data kondisi jalan dan *jenis* konstruksi. Dengan demikian, dari sudut pandang yang berbeda selanjutnya dapat ditelusuri dari kombinasi data tersebut. Kombinasi kondisi dan jenis konstruksi dapat disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.26

Kombinasi Kondisi dan Jenis Konstruksi Jalan

URAIAN	Hotmix	Lapen	Telford	Agregat	Jalan Tanah	Rabat Penuh	Rabat Rel	Total
Baik	174,06	14,58	-	-	-	16,06	2,58	207,28
Rusak berat	-	66,71	4,67	61,41	202,31	7,73	-	342,82
Rusak sedang	31,50	53,61	-	9,92	-	2,03	-	97,06
Rusak Ringan	24,97	5,19	-	-	-	1,30	-	31,47
Tidak berfungsi	-	-	-	-	99,00	-	-	99,00
Jumlah	230,53	140,09	4,67	71,32	301,31	27,12	2,58	777,62

Sumber: Bappeda dan Statistik, 2016

Tabel 4.26 di atas menjelaskan bahwa kondisi jalan rusak berat dan tidak berfungsi dominan terjadi pada jalan dengan jenis konstruksi tanah atau yang belum dilakukan pembangunan sama sekali. Sedangkan kondisi jalan baik, rusak sedang dan ringan lebih banyak terdapat pada jalan dengan jenis konstruksi hotmix. Walaupun jenis konstruksi jalan rabat belum cukup signifikan jumlahnya, jenis konstruksi ini juga memberikan kontribusi bagi kondisi jalan yang baik. Dengan demikian, dari informasi tersebut dapat diperoleh arahan teknis konstruksi jalan yang dianggap cukup layak untuk konteks Kabupaten Nagekeo dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketersediaan dana, target yang ingin dicapai, kesulitan topografi, iklim mikro maupun cara pengelolaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut.

4.1.4.3. Air Bersih

Pemanfaatan air bersih selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga digunakan berbagai keperluan kesejahteraan manusia seperti keperluan pertanian, perikanan, peternakan dan industri. Masyarakat perkotaan memerlukan air bersih lebih banyak (150 ltr/org/hr) sedangkan masyarakat pedesaan memerlukan air bersih sekitar (90 ltr/org/hr).

Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui BLU-SPAM secara langsung berupaya menyediakan air bersih kepada masyarakat. Dari debit air yang ada pada setiap kecamatan, cakupan pelayanan BLU-SPAM terhadap total

penduduk di setiap kecamatan mencapai 20,25% pada Kecamatan Aesesa, 4,21% pada Kecamatan Mauponggo, 12,20% pada Kecamatan Boawae, dan 10,01% pada Kecamatan Nangaroro. Sedangkan masyarakat yang tidak terlayani oleh BLU-SPAM menyediakan air bersih untuk keperluan sehari-hari secara swadaya melalui pembangunan sumur, mengambil dari sungai/mata air, atau membangun jaringan air bersih melalui program PNPM atau program pemberdayaan masyarakat lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.27 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.27

Cakupan Pelayanan Air Bersih BLU-SPAM Kabupaten Nagekeo

No	Data	Kecamatan			
		Aesesa	Mauponggo	Boawae	Nangaroro
1	Jumlah Sumber Air Minum	2	1	4	1
2	Debit Sumber Air	161	5	18	7
3	Kapasitas Terpasang	31	5	18	7
4	Jumlah Kapasitas Produksi	20	2.5	8	5
5	Cakupan Pelayanan Terhadap Jumlah Penduduk	20,25%	4,21%	12,20%	10,01%

Sumber: BLU-SPAM Kabupaten Nagekeo, 2016

4.2. Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Hierarki Wilayah Berdasarkan Hasil Analisis Skalogram

Hasil analisis skalogram akan menentukan struktur pusat pelayanan menurut hirarki wilayah serta dapat diidentifikasi perkembangan desa-desa di Kabupaten Nagekeo. Penentuan hirarki didasarkan atas tingkat perkembangan dan kapasitas pelayanan yang dapat disediakan oleh suatu wilayah. Tingkat hirarki ini penting dalam penentuan kapasitas suatu wilayah, apakah suatu wilayah merupakan wilayah pusat/inti atau wilayah hinterland. Konsep wilayah nodal menjadi penting karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk mendorong wilayah pusat untuk menyediakan berbagai fasilitas sehingga mampu mendorong perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya (hinterland).

Tingkat perkembangan desa-desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Nagekeo ditentukan dengan metode skalogram dan dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Desa (IPD). Umumnya, semakin tinggi nilai IPD, semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya, sebaliknya, semakin rendah nilai IPD berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Nilai IPD yang dihasilkan berada pada kisaran 3.585,86 sampai 176,40 yang dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.23 Nilai IPD tertinggi sebesar

3.585,86 dimiliki oleh desa dengan hirarki/orde pertama, yaitu Danga di Kecamatan Aesesa dengan kepadatan penduduk 373,88 jiwa/km². Sedangkan nilai IPD terkecil sebesar dimiliki oleh desa dengan hirarki/orde ketiga, yakni Desa Alorawe di Kecamatan Boawae dengan kepadatan penduduk 176,40 jiwa/km². Hasil perhitungan nilai IPD disajikan pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28
Hasil Analisis Skalogram Perhitungan Nilai IPD

No	Kecamatan	Nama Desa/Kel	Indeks Perkembangan Desa (IPD)	Hierarki Desa
1	Aesesa	Danga	3.585,86	1
2	Aesesa	Aeramo	2.397,12	1
3	Aesesa	Lape	1.606,13	2
4	Aesesa	Mbay I	1.568,76	2
5	Aesesa	Nangadhero	1.415,71	2
6	Aesesa	Marapokot	1.052,05	2
7	Aesesa	Waekokak	1.029,33	2
8	Aesesa	Labolewa	882,27	2
9	Aesesa	Olaia	823,42	2
10	Aesesa	Dhawe	778,61	3
11	Aesesa	Tonggurambang	722,56	3
12	Aesesa	Nggolonio	677,68	3
13	Aesesa	Mbay li	665,62	3
14	Aesesa	Ngegedhawe	525,46	3
15	Aesesa	Towak	492,62	3
16	Aesesa	Nggolombay	483,59	3
17	Aesesa	Tedakisa	449,12	3

18	Aesesa	Tedamude	384,8	3
19	Aesesa Selatan	Tengatiba	1.268,81	2
20	Aesesa Selatan	Rendubutowe	677,93	3
21	Aesesa Selatan	Rendutenoe	659,13	3
22	Aesesa Selatan	Rendututubhada	581,51	3
23	Aesesa Selatan	Wajomara	481,44	3
24	Aesesa Selatan	Renduwawo	464,13	3
25	Aesesa Selatan	Langedhawe	441,98	3
26	Boawae	Natanage	1.867,74	1
27	Boawae	Rega	1.727,77	2
28	Boawae	Nageoga	1.315,77	2
29	Boawae	Natanage Timur	1.290,42	2
30	Boawae	Rotongamobo	1.241,25	2
31	Boawae	Kelimado	983,8	2
32	Boawae	Wolowea	913	2
33	Boawae	Nagesepadhi	870,98	2
34	Boawae	Wolopogo	822,99	2
35	Boawae	Mulakoli	757,77	3
36	Boawae	Kelewae	728,89	3
37	Boawae	Gerodhere	702,49	3
38	Boawae	Raja	696,78	3
39	Boawae	Wea Au	681,12	3
40	Boawae	Wolowea Barat	645,01	3
41	Boawae	Raja Selatan	605,09	3
42	Boawae	Rowa	594,23	3
43	Boawae	Leguderu	590,35	3
44	Boawae	Wolowea Timur	534,24	3
45	Boawae	Rigi	508,51	3
46	Boawae	Raja Timur	501,83	3
47	Boawae	Olakile	499,6	3

48	Boawae	Nagerawe	487,59	3
49	Boawae	Focolodorawe	433,12	3
50	Boawae	Dhereisa	413,74	3
51	Boawae	Solo	373,7	3
52	Boawae	Alorawe	176,4	3
53	Keo Tengah	Mbaenuamuri	1.012,83	2
54	Keo Tengah	Wajo	906,53	2
55	Keo Tengah	Ladolima Timur	902,88	2
56	Keo Tengah	Ladolima	793,94	2
57	Keo Tengah	Witurombaua	741,81	3
58	Keo Tengah	Kotodirumali	691,18	3
59	Keo Tengah	Pautola	689,3	3
60	Keo Tengah	Lewangera	677,48	3
61	Keo Tengah	Kotowuji Barat	610,39	3
62	Keo Tengah	Udiworowatu	604,79	3
63	Keo Tengah	Kotowuji Timur	599,91	3
64	Keo Tengah	Keli	529,26	3
65	Keo Tengah	Ngera	499,9	3
66	Keo Tengah	Ladolima Utara	491,63	3
67	Keo Tengah	Paumali	363,3	3
68	Keo Tengah	Wajo Timur	345,21	3
69	Mauponggo	Mauponggo	1.955,38	1
70	Mauponggo	Woewolo	1.715,79	2
71	Mauponggo	Ua	1.345,35	2
72	Mauponggo	Sawu	1.227,21	2
73	Mauponggo	Jawapogo	995,93	2
74	Mauponggo	Wololelu	985,49	2
75	Mauponggo	Wolokisa	970,98	2
76	Mauponggo	Lajawajo	903,94	2
77	Mauponggo	Aewoe	901,71	2

78	Mauponggo	Bela	818,06	2
79	Mauponggo	Selalejo	790,14	2
80	Mauponggo	Maukeli	742,43	3
81	Mauponggo	Lodaolo	675,94	3
82	Mauponggo	Keliwatulewa	649,91	3
83	Mauponggo	Selalejo Timur	649,83	3
84	Mauponggo	Ululoga	636,43	3
85	Mauponggo	Lokalaba	593,4	3
86	Mauponggo	Wuliwalo	574,2	3
87	Mauponggo	Kotagana	564,83	3
88	Mauponggo	Wolotelu	543,29	3
89	Mauponggo	Woloede	492,54	3
90	Nangaroro	Nangaroro	1.801,36	1
91	Nangaroro	Riti	1.162,93	2
92	Nangaroro	Ulupulu I	813,22	2
93	Nangaroro	Woedoa	738,64	3
94	Nangaroro	Pogomogo	685,31	3
95	Nangaroro	Ulupulu	683,83	3
96	Nangaroro	Woewutu	593,32	3
97	Nangaroro	Podonura	580,57	3
98	Nangaroro	Kotakeo	576,19	3
99	Nangaroro	Tonggo	533,04	3
100	Nangaroro	Kotakeo li	510,27	3
101	Nangaroro	Kotakeo I	500,14	3
102	Nangaroro	Wokodekororo	470,34	3
103	Nangaroro	Wokowoe	447,18	3
104	Nangaroro	Bidoa	440,62	3
105	Nangaroro	Degalea	369,95	3
106	Nangaroro	Nataute	352,59	3
107	Nangaroro	Utetoto	334,03	3

108	Nangaroro	Odaute	195,61	3
109	Wolowae	Tendakinde	781,84	3
110	Wolowae	Tendatoto	540,73	3
111	Wolowae	Natatoto	501,35	3
112	Wolowae	Totomala	489,81	3
113	Wolowae	Anakoli	305,66	3

Sumber : Hasil Analisis

Pada dasarnya, penentuan hirarki/orde di desa-desa di wilayah studi menjadi tiga selang hirarki bukan merupakan patokan mutlak. Wilayah-wilayah desa ini juga dapat dikelompokkan menjadi lebih dari tiga hirarki.

Berdasarkan hasil perhitungan skalogram, nilai IPD seluruh desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Nagekeo dikelompokkan ke dalam tiga hirarki pusat pelayanan sebagai berikut :

- 1) Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah desa-desa dengan tingkat perkembangan tinggi. Terdapat 5 desa yang termasuk dalam hirarki I atau hanya sekitar 4,67 % desa dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Nagekeo, yakni dua desa di Kecamatan Aesesa (Danga dan Aeramo), desa Natanage di Kecamatan Boawae, Desa Mau'ponggo di Kecamatan Mau'ponggo, serta Desa Nangaroro di Kecamatan Nangaroro. Desa-desa yang termasuk dalam tingkat hirarki ini memiliki IPD antara 3.585,86-1.801,36 (rata-rata 2321,49). Desa-desa dengan hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih

memadai daripada desa-desa dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III), terutama dalam aspek :

- Sarana pendidikan, meliputi bangunan sekolah SD, SLTP, dan SLTA
- Sarana kesehatan, meliputi fasilitas pengobatan (rumah sakit, poliklinik, praktek dokter, praktek bidan, dan puskesmas), fasilitas penyedia obat (apotik dan toko obat), serta tenaga medis (dokter, bidan, dan paramedis).
- Aksesibilitas masing-masing wilayah desa terhadap pusat pelayanan maupun terhadap pusat pemerintahan relatif dekat.

2) Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah desa-desa dengan tingkat perkembangan sedang. Terdapat 32 desa atau sekitar 29,90 % dari seluruh jumlah desa di Kabupaten Nagekeo. Desa-desa yang termasuk dalam tingkat hirarki ini memiliki IPD antara 1.727,77- 790,14 (rata-rata 1.095,60). Adapun wilayah desa-desa dengan tingkat hirarki II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I
- Umumnya letaknya berada di pinggir wilayah berhirarki I dengan tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I

3) Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah desa-desa dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 76 desa atau sekitar 65.42% dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Nagekeo. Desa-desa yang termasuk dalam tingkat hirarki ini memiliki IPD antara 781,84-176,40 (rata-rata 552,82). Desa-desa pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan desa-desa yang termasuk ke dalam tingkat hirarki yang lebih tinggi. Adapun wilayah desa-desa dengan tingkat hirarki III mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Ketersediaan sarana dan prasarana di desa-desa tersebut relatif kurang.
- Akses masing-masing desa ke pusat-pusat pelayanan maupun pusat-pusat aktivitas pemerintahan relatif lebih sulit.

Pada dasarnya, untuk fasilitas-fasilitas tertentu dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks, desa-desa dengan tingkat hirarki yang lebih rendah masih harus mengaksesnya di desa-desa dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi. Oleh karena itu, umumnya letak desa-desa yang berhirarki lebih rendah berlokasi di sekitar atau pinggir desa-desa dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi. Secara spasial hasil perhitungan skalogram dengan tiga hirarki dapat dilihat pada Gambar Peta di bawah ini dan Hasil perhitungan sklogramnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut ;

1. Tingkat perkembangan desa-desa di Kabupaten Nagekeo sebagian besar masih tergolong rendah yaitu 76 desa atau sekitar 67.25% dari seluruh jumlah desa, sisanya tergolong sedang yaitu 32 desa atau sekitar 28.31% dari seluruh jumlah desa, dan hanya sedikit yang tergolong tinggi yaitu 5 desa pada 4 Kecamatan atau sekitar 4.42% dari seluruh jumlah desa. Desa berhirarki I terdiri dari: Desa Danga dan Aeram di Kecamatan Aesesa, Desa Mauponggo Di Kecamatan Mauponggo, Desa Nangaroro di Kecamatan Nangaroro, dan Desa Natanage di Kecamatan Boawae. Desa-desa dengan hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih banyak, lengkap, terutama sarana pendidikan dan kesehatan dan tentunya lebih memadai dari desa-desa hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III) sehingga bisa dijadikan Desa Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Nagekeo. Umumnya letak desa-desa yang berhirarki lebih rendah berlokasi di sekitar atau di pinggir desa-desa dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang

mempengaruhi indeks perkembangan desa (IPD), yaitu fasilitas kesehatan, kawasan permukiman padat penduduk dan pemukiman, fasilitas pendidikan, akses yang baik serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Untuk potensi ekonomi wilayah Berdasarkan hasil analisis Iq pada kabupaten nagekeo yaitu pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan sektor basis utama atau primer dengan komoditas unggulan tanaman Coklat di Kecamatan Mauponggo, tanaman Kacang Tanah di Kecamatan Boawae, tanaman Sorghum di Kecamatan Nangaroro, tanaman Jambu Mete di Kecamatan Aesesa Selatan, tanaman Kelapa di Kecamatan Keo Tengah, Budidaya Garam di Kecamatan Wolowae, serta Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Aesesa.

2. Berdasarkan data yang ada terkait tingkat pendapatan perkapita perkecamatan di Kabupaten Nagakeo yaitu 50,43% - 71,86%. Kondisi tersebut merupakan peningkatan pendapatan yang ada di Kabupaten. Data tersebut berimplikasi pada kesejatereraan masyarakat di kabupaten Nagakeo. Kesejatereraan masyarakat dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan suatu wilayah misalnya pada lokasi studi dengan tingkat pertumbuhan wilayah dari segi sektor pertanian dengan nilai kontribusi sebesar 66,78%, sementara hasil analisis strategi yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk pengembangan fungsi kawasan agropolitan dalam menunjang Kapet Mbay menggunakan analisis kuadran berada pada kuadran IV (pengembangan dan pertumbuhan),

dimana pada kuadran ini kekuatan yang dimiliki mendominasi kelemahan serta memiliki peluang untuk tubuh sangat baik. Dengan demikian, maka strategi yang digunakan adalah *strategi ST* sebagai prioritas serta beberapa strategi pendukung diantaranya:

- 1) Meningkatkan serta mendorong industri pada KAPET Mbay di Kab. Nagekeo.

Untuk mendorong industri di kapet maka perlunya penetapan adanya kawasan agropolitan yang jelas yaitu dengan Penentuan wilayah pusat/inti kawasan agropolitan pada wilayah berhierarki I yaitu di Kecamatan Aesesa (Danga dan Aeramo), Desa Natanage di Kecamatan Boawae, Desa Mau'ponggo di Kecamatan Mau'ponggo, serta Desa Nangaroro di Kecamatan Nangaroro dan wilayah hinterland sebagai penyangga berada pada hierarki II dan hierarki III.

- 2) Menarik investor dalam pengembangan ekonomi di KAPET Mbay. Dengan adanya investor maka industri bisa dikembangkan dan dapat menyerap tenaga kerja di kabupaten nagekeo.
- 3) Meningkatkan persaingan masyarakat perdesaan dalam pengembangan pertanian.
- 4) Meningkatkan kualitas sarana dan infrastruktur penunjang serta Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perdesaan.

Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan,

terutama sarana pendidikan dan kesehatan perlu dimaksimalkan pada wilayah berhierarki II dan III terutama pada wilayah basis utama komoditas tertentu.

- 5) Memperkuat kelembagaan pertanian dalam pengembangan ekonomi serta iklim usaha.
- 6) Meningkatkan persaingan masyarakat perdesaan dalam pengembangan pertanian.

Untuk meningkatkan persaingan maka Pengembangan sentra produksi pertanian perlu diarahkan sesuai dengan sumberdaya pertanian yang telah ada berdasarkan komoditas unggulannya.

Berdasarkan hasil penentuan komoditas unggulan, arahan pengembangan yang dapat direkomendasikan adalah pada desa-desa di Kecamatan Mauponggo sebagai sentra produksi coklat dan cengkeh, Kecamatan Nangaroro dengan sentra komoditas sorgum, Kecamatan Keo Tengah dengan sentra komoditas kelapa, Kecamatan Aesesa Selatan dengan sentra komoditan jambu mete, Kecamatan Wolowae dengan pengembangan garam serta pada Kecamatan Aesesa dengan komoditas rumput laut.

5.2. Saran

Dengan memperhatikan pengaruh Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Nagekeo dimasa yang akan datang dan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian, maka beberapa saran

sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut;

1. Perlunya campur tangan pemerintah dan swasta yang lebih serius dalam melakukan suatu strategi pembangunan utamanya dalam mendukung pengembangan fungsi kawasan agropolitan yang ditetapkan sehingga sektor sumberdaya pertanian yang ada dapat dimanfaatkan agar dapat memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan desa-desa di Kabupaten Nagekeo dimasa yang akan datang.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam secara efektif dan efisien, serta pemerintah mampu melihat dan mengembangkan kawasan agropolitan sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah dimasa mendatang.
3. Menciptakan situasi wilayah Kabupaten Nagekeo yang agropolis khususnya di wilayah perdesaan yang dapat menarik minat para investor untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Nagekeo khususnya dalam menunjang KAPET Mbay.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Sabari Yunus, M.A;DRS. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Siti Sutriah Nurzaman. 2012. *Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia*. Penerbit ITB. Bandung
- Lutfi Muta'ali, S.Si.,MSP. 2013. *Penataan Ruang Wilayah Dan Kota (Tinjauan Normatif-Teknis)*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE). Yogyakarta.
- Lutfi Muta'ali, S.Si., MSP. 2013. *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Prespektif Keruangan)*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE). Yogyakarta.
- Ali Kabul Mahi. 2014. *Agropolitan; Teori dan Aplikasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Emil Elestianto Dardak. 2007. *The Development Of Agricultural-Based Small Urban Areas to Promote Rural Development*. Central Java.
- Endang Werdiningsih. 2006. *Kajian Tipologi Wilayah Dan Karakteristiknya Dalam Mendukung Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Kasus: Kabupaten Sambas)*. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor

Laelatul Farhanah. 2015. *Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Wilayah*

Rojonoto Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Variabel-variabel dalam analisis skalogram

Kode	Keterangan Variabel	Satuan
X~1	= Kepadatan penduduk	jiwa/km ²
X~2	= Invers jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan	1/km
X~3	= Invers jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten	1/km
X~4	= Invers banyaknya penduduk desa/kelurahan yang tidak mempunyai pekerjaan	1/jiwa
X~5	= Invers jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	1/kk
X~6	= Jumlah kepala keluarga	jumlah kk
X~7	= Banyaknya keluarga yang menggunakan listrik PLN terhadap jumlah keluarga	rasio
X~8	= Banyaknya keluarga yang mempunyai TV terhadap jumlah keluarga	rasio
X~9	= Banyaknya rumah permanen terhadap jumlah keluarga	rasio
X~10	= Jumlah rumah permanen	unit
X~11	= Jumlah SD	unit
X~12	= Jumlah SLTP	unit
X~13	= Jumlah SMU	unit
X~14	= Jumlah madrasah diniyah	unit
X~15	= Jumlah pondok pesantren	unit
X~16	= Jumlah seluruh fasilitas kesehatan	unit
X~17	= Jumlah seluruh fasilitas peribadatan	unit
X~18	= Jumlah kopraasi	unit

Lampiran 2. Hasil perhitungan Analisis Skalogram

Kecamatan	Desa	X~1	X~2	X~3	X~4	X~5	X~6	X~7	X~8	X~9	X~10
Kecamatan Aesesa	Tedamude	35,35	0,05	0,05	0,12	0,69	212,00	0,85	2,12	0,58	123,00
	Tedakisa	33,97	0,06	0,06	0,10	0,65	249,00	1,00	1,66	0,62	154,00
	Dhawe	54,31	0,14	0,14	0,06	0,99	445,00	1,78	3,62	0,57	254,00
	Nggolombay	86,22	0,43	0,43	0,12	0,93	214,00	0,86	3,83	0,78	167,00
	Towak	27,43	0,10	0,10	0,10	0,79	255,00	1,02	3,27	0,74	189,00
	Nggolonio	44,35	0,05	0,05	0,07	1,02	361,00	1,45	2,03	0,67	243,00
	Waekokak	201,04	0,06	0,06	0,05	0,65	482,00	1,93	1,86	0,67	325,00
	Mbay II	44,71	0,15	0,15	0,08	0,89	325,00	1,30	1,49	0,85	276,00
	Mbay I	163,03	0,40	0,40	0,03	0,90	791,00	3,17	2,10	0,73	580,00
	Tonggurambang	113,60	0,11	0,11	0,08	0,95	313,00	1,25	2,57	0,88	277,00
	Marapokot	190,52	0,07	0,07	0,05	0,87	477,00	1,91	3,82	0,74	355,00
	Danga	373,88	2,00	2,00	0,01	0,74	1796,00	7,19	3,31	0,73	1320,00

Kecamatan	Desa	X~1	X~2	X~3	X~4	X~5	X~6	X~7	X~8	X~9	X~10
	Lape	121,96	0,29	0,29	0,03	0,77	799,00	3,20	3,79	0,81	649,00
	Labolewa	32,32	0,05	0,05	0,05	0,69	470,00	1,88	1,46	0,76	357,00
	Olaia	49,46	0,06	0,06	0,06	0,82	435,00	1,74	3,48	0,73	320,00
	Ngegedhawe	58,24	0,10	0,10	0,10	0,78	247,00	0,99	1,32	0,85	211,00
	Aeramo	167,92	0,10	0,10	0,02	0,74	1217,00	4,87	1,56	0,80	975,00
	Nangadhero	604,88	0,07	0,07	0,06	0,77	434,00	1,74	1,30	0,82	357,00
	Rendutenoe	190,99	0,11	0,08	0,09	0,87	270,00	1,08	2,22	0,69	187,00
Kecamatan Aesesa Selatan	Wajomara	163,49	0,13	0,07	0,14	0,85	175,00	0,70	2,28	0,77	135,00
	Langedhawe	163,00	0,18	0,10	0,15	0,75	163,00	0,65	2,51	0,64	104,00
	Rendututubhada	171,54	0,33	0,05	0,11	0,96	220,00	0,88	2,82	0,81	179,00
	Tengatiba	107,54	0,91	0,07	0,04	0,84	674,00	2,70	4,04	0,69	466,00
	Renduwawo	69,62	0,16	0,05	0,12	0,79	210,00	0,84	1,72	0,82	173,00
	Rendubutowe	83,88	0,08	0,04	0,08	0,68	309,00	1,24	4,62	0,86	267,00
	Rowa	51,64	0,08	0,02	0,08	0,96	322,00	1,29	1,50	0,65	211,00
Kecamatan Boawae	Solo	72,03	0,11	0,03	0,13	1,00	191,00	0,77	1,09	0,54	103,00
	Kelewae	76,92	0,08	0,02	0,07	0,86	360,00	1,44	1,72	0,77	279,00
	Leguderu	90,56	0,10	0,03	0,09	0,82	283,00	1,13	1,89	0,73	207,00
	Nagesepadhi	92,12	0,33	0,03	0,05	0,47	473,00	1,90	2,25	0,83	293,00
	Rigi	93,13	0,25	0,03	0,11	1,00	234,00	0,94	1,32	0,74	172,00
	Olakile	122,82	0,50	0,03	0,10	0,46	261,00	1,04	1,24	0,41	106,00
	Natanage	277,23	2,00	0,03	0,03	0,91	855,00	3,42	2,42	0,71	707,00
	Nageoga	206,24	0,33	0,03	0,04	0,98	611,00	2,45	1,90	0,79	486,00
	Wolopogo	249,20	0,13	0,03	0,08	0,96	311,00	1,25	2,55	0,80	248,00
	Rega	470,28	0,14	0,03	0,04	0,76	660,00	2,64	1,99	0,88	583,00
	Mulakoli	132,57	0,07	0,02	0,08	0,79	317,00	1,27	2,04	0,93	296,00
	Kelimado	240,80	0,10	0,03	0,07	0,57	376,00	1,51	1,78	0,95	356,00
	Wea Au	107,62	0,10	0,02	0,09	0,58	286,00	1,14	1,60	0,97	277,00
	Raja	116,35	0,07	0,03	0,08	0,93	295,00	1,18	1,21	0,93	274,00
	Raja Timur	86,87	0,06	0,03	0,11	0,97	228,00	0,91	1,09	0,78	179,00
Raja Selatan	99,14	0,06	0,03	0,10	0,58	258,00	1,03	1,23	0,93	241,00	
Wolowea	313,75	0,08	0,03	0,08	0,92	313,00	1,26	1,01	0,88	275,00	

Kecamatan	Desa	X~1	X~2	X~3	X~4	X~5	X~6	X~7	X~8	X~9	X~10
	Wolowea Timur	139,36	0,07	0,03	0,11	0,61	217,00	0,87	1,40	0,79	172,00
	Wolowea Barat	240,00	0,09	0,02	0,12	0,58	210,00	0,84	1,46	0,90	189,00
	Rotongamobo	203,02	0,17	0,04	0,05	0,82	538,00	2,15	1,11	0,90	486,00
	Dhereisa	34,61	0,10	0,05	0,12	0,69	207,00	0,83	1,56	0,79	163,00
	Gerodhere	142,16	0,08	0,04	0,08	0,86	296,00	1,19	1,21	0,86	256,00
	Nagerawe	39,88	0,06	0,04	0,11	0,48	232,00	0,93	1,22	0,88	204,00
	Focolodorawe	45,61	0,06	0,03	0,12	0,59	205,00	0,82	1,03	0,86	176,00
	Alorawe	31,71	0,06	0,05	0,27	0,35	91,00	0,36	1,08	0,52	47,00
	Natanage Timur	362,46	1,00	0,03	0,05	1,01	545,00	2,18	1,03	0,67	368,00
	Kecamatan Keo Tengah	Mbaenuamuri	408,97	0,50	0,02	0,08	1,09	319,00	1,28	1,06	0,84
Witurombaua		147,88	0,50	0,02	0,08	1,20	305,00	1,22	1,02	0,90	275,00
Kotowuji Timur		198,86	0,17	0,02	0,11	1,05	217,00	0,87	1,03	0,80	175,00
Kotowuji Barat		260,00	0,25	0,02	0,14	1,10	178,00	0,72	1,25	0,91	163,00
Udiworowatu		213,87	2,00	0,02	0,12	1,01	200,00	0,80	1,07	0,89	179,00
Pautola		264,29	0,13	0,02	0,11	0,90	231,00	0,93	1,15	0,80	184,00
Ladolima		409,00	0,11	0,02	0,12	0,94	204,00	0,82	1,09	0,83	170,00
Kotodirumali		96,56	0,25	0,01	0,08	0,99	301,00	1,21	1,17	0,90	273,00
Keli		126,92	0,50	0,02	0,12	0,86	206,00	0,83	1,11	0,90	185,00
Lewangera		228,64	0,13	0,02	0,11	1,01	235,00	0,94	1,21	0,88	207,00
Wajo		352,31	0,14	0,02	0,09	0,86	286,00	1,15	1,08	0,90	257,00
Ngera		166,00	0,09	0,02	0,15	1,11	166,00	0,66	1,14	0,96	159,00
Ladolima Timur		410,80	0,11	0,02	0,10	0,85	256,00	1,03	1,10	0,88	227,00
Ladolima Utara		209,00	0,09	0,02	0,16	0,89	156,00	0,63	1,08	0,77	120,00
Paumali		155,64	0,09	0,02	0,23	0,98	107,00	0,43	1,04	0,88	94,00
Wajo Timur		143,33	0,14	0,02	0,23	1,13	107,00	0,43	1,09	0,83	89,00
Kecamatan Mauponggo		Aewoe	379,87	0,11	0,01	0,09	0,66	283,00	1,13	1,02	0,82
	Bela	311,01	0,08	0,01	0,10	0,85	254,00	1,02	1,04	0,96	243,00
	Wolokisa	196,55	0,13	0,01	0,06	0,60	399,00	1,60	1,12	0,91	362,00
	Wuliwalo	68,08	0,10	0,02	0,11	0,75	225,00	0,90	1,03	1,21	272,00
	Maukeli	297,44	0,14	0,02	0,11	0,76	232,00	0,93	1,16	0,88	204,00
	Lokalaba	89,95	0,20	0,02	0,10	0,99	252,00	1,01	1,20	0,95	239,00

Kecamatan	Desa	X~1	X~2	X~3	X~4	X~5	X~6	X~7	X~8	X~9	X~10
	Wolotelu	145,20	0,33	0,02	0,12	0,87	204,00	0,82	1,03	0,92	187,00
	Mauponggo	1134,13	2,00	0,02	0,07	0,76	357,00	1,43	1,11	0,87	444,00
	Sawu	527,94	1,00	0,02	0,07	0,69	359,00	1,44	1,15	0,91	325,00
	Jawapogo	333,50	0,20	0,02	0,07	0,79	343,00	1,37	1,07	0,91	312,00
	Lajawajo	295,00	0,10	0,02	0,08	0,55	324,00	1,30	1,05	0,85	276,00
	Ululoga	198,47	0,14	0,02	0,11	0,78	227,00	0,91	1,11	0,88	201,00
	Lodaolo	216,89	0,17	0,02	0,11	0,87	237,00	0,95	1,03	0,90	214,00
	Woloede	158,81	0,11	0,02	0,14	0,82	173,00	0,69	1,13	0,89	154,00
	Woewolo	1120,15	0,10	0,02	0,07	0,82	375,00	1,50	1,22	0,92	211,00
	Selalejo	142,71	0,08	0,01	0,07	0,97	355,00	1,42	1,07	0,79	280,00
	Ua	549,70	0,20	0,02	0,05	0,71	456,00	1,83	1,12	0,72	329,00
	Keliwatulewa	327,23	0,50	0,02	0,15	0,71	165,00	0,66	1,65	0,91	150,00
	Kotagana	127,80	0,20	0,02	0,11	0,81	219,00	0,88	1,06	0,96	210,00
	Wololelu	622,41	0,17	0,02	0,14	0,00	180,00	0,72	1,04	0,99	179,00
	Selalejo Timur	206,77	0,08	0,01	0,11	0,00	229,00	0,92	1,10	0,92	210,00
Kecamatan Nangaroro	Podonura	113,55	0,07	0,02	0,11	0,83	230,00	0,92	1,11	0,97	223,00
	Tonggo	143,06	0,08	0,02	0,12	1,00	201,00	0,80	1,07	0,88	177,00
	Riti	495,51	0,06	0,02	0,06	0,85	386,00	1,55	1,06	0,82	268,00
	Wokodekororo	100,55	0,14	0,02	0,14	0,72	182,00	0,73	1,07	0,97	177,00
	Wokowoe	71,32	0,11	0,02	0,13	0,75	194,00	0,78	1,18	0,90	174,00
	Degalea	47,22	0,02	0,02	0,15	0,84	169,00	0,68	1,18	0,85	144,00
	Kotakeo	130,36	0,03	0,02	0,11	0,76	226,00	0,91	1,09	0,92	208,00
	Kotakeo I	66,87	0,03	0,02	0,11	0,99	219,00	0,88	1,06	0,94	207,00
	Kotakeo li	123,79	0,02	0,02	0,13	0,49	191,00	0,77	1,08	0,98	187,00
	Pogomogo	47,75	0,05	0,03	0,06	0,86	395,00	1,58	1,32	0,66	230,00
	Nangaroro	129,31	2,00	0,03	0,03	0,92	767,00	3,07	1,15	0,84	864,00
	Nataute	49,87	0,20	0,03	0,13	0,84	187,00	0,75	1,21	0,57	107,00
	Utetoto	38,47	0,04	0,03	0,16	0,73	159,00	0,64	1,11	0,86	127,00
	Odaute	15,59	0,05	0,03	0,26	1,00	96,00	0,39	1,53	0,78	75,00
	Bidoa	55,75	0,07	0,04	0,11	0,80	225,00	0,90	1,07	0,88	149,00
	Ulupulu	86,59	0,06	0,03	0,08	0,82	314,00	1,26	1,04	0,96	271,00

Kecamatan	Desa	X~1	X~2	X~3	X~4	X~5	X~6	X~7	X~8	X~9	X~10
	Woedoa	141,55	0,13	0,03	0,08	0,63	297,00	1,19	1,07	0,97	288,00
	Ulupulu I	219,97	0,05	0,03	0,08	0,79	327,00	1,31	1,06	0,93	256,00
	Woewutu	199,29	0,20	0,02	0,12	0,86	209,00	0,84	1,17	0,83	174,00
Kecamatan Wolowae	Natatoto	32,26	0,02	0,04	0,10	0,90	242,00	0,97	1,17	0,89	215,00
	Anakoli	38,66	0,06	0,04	0,18	0,93	135,00	0,54	1,36	0,90	122,00
	Totomala	16,65	0,06	0,03	0,10	0,99	241,00	0,97	1,09	0,92	222,00
	Tendatoto	25,61	0,28	0,03	0,08	0,77	296,00	1,19	1,08	0,69	206,00
	Tendakinde	43,89	1,11	0,02	0,07	0,98	370,00	1,48	1,34	0,95	350,00

Lanjutan....

Kecamatan	Desa	X~11	X~12	X~13	X~14	X~15	X~16	X~17	X~18	Σ X~1-X~18	Kelas Hirarki
Kecamatan Aesesa	Tedamude	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	0,00	384,80	III
	Tedakisa	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	1,00	0,00	449,12	III
	Dhawe	3,00	1,00	0,00	0,00	6,00	5,00	2,00	1,00	778,61	III
	Nggolombay	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	3,00	0,00	483,59	III
	Towak	2,00	1,00	0,00	0,00	7,00	4,00	1,00	0,00	492,54	III
	Nggolonio	2,00	1,00	0,00	0,00	11,00	5,00	3,00	2,00	677,68	III
	Waekokak	1,00	1,00	0,00	0,00	9,00	3,00	2,00	0,00	1029,33	II
	Mbay li	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	0,00	665,62	III
	Mbay I	1,00	0,00	0,00	3,00	7,00	5,00	11,00	0,00	1568,76	II
	Tonggurambang	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00	0,00	722,56	III
	Marapokot	2,00	1,00	1,00	1,00	11,00	3,00	3,00	0,00	1052,05	III
	Danga	5,00	3,00	3,00	0,00	36,00	17,00	7,00	9,00	3585,86	I
	Lape	4,00	1,00	0,00	0,00	14,00	4,00	1,00	3,00	1606,13	II
	Labolewa	3,00	1,00	0,00	0,00	5,00	6,00	2,00	1,00	882,27	II
	Olaia	2,00	1,00	0,00	0,00	4,00	3,00	1,00	1,00	823,42	II
	Ngegedhawe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	525,46	III
Aeramo	4,00	1,00	2,00	0,00	11,00	7,00	3,00	1,00	2397,12	I	
Nangadhero	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,00	1,00	2,00	1415,71	II	
Kecamatan Selatan	Rendutenoe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	659,13	III

Kecamatan	Desa	X~11	X~12	X~13	X~14	X~15	X~16	X~17	X~18	Σ X~1-X~18	Kelas Hirarki
	Wajomara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	481,44	III
	Langedhawe	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	441,98	III
	Rendututubhada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	581,51	III
	Tengatiba	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	1268,81	II
	Renduwawo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	464,13	III
	Rendubutowe	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	677,48	III
Kecamatan Boawae	Rowa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	594,23	III
	Solo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	373,70	III
	Kelewae	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	728,89	III
	Leguderu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	590,35	III
	Nagesepadhi	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	870,98	II
	Rigi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	508,51	III
	Olakile	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	499,60	III
	Natanage	2,00	1,00	2,00	0,00	3,00	7,00	3,00	1,00	1867,74	I
	Nageoga	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1315,77	II
	Wolopogo	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,00	822,99	II
	Rega	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1727,77	II
	Mulakoli	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	757,77	III
	Kelimado	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	983,80	II
	Wea Au	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	681,12	III
	Raja	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	696,78	III
	Raja Timur	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	501,83	III
	Raja Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	605,09	III
	Wolowea	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	913,00	II
	Wolowea Timur	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	534,24	III
	Wolowea Barat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	645,01	III
Rotongamobo	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	1241,25	II	
Dhereisa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	413,74	III	
Gerodhere	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	702,49	III	
Nagerawe	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00	0,00	487,59	III	
Focolodorawe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	433,12	III	

Kecamatan	Desa	X~11	X~12	X~13	X~14	X~15	X~16	X~17	X~18	Σ X~1-X~18	Kelas Hirarki	
Kecamatan Keo Tengah	Alorawe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	176,40	III	
	Natanage Timur	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1290,42	II	
	Mbaenuamuri	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1012,83	II	
	Witurombaua	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	741,81	III	
	Kotowuji Timur	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	599,91	III	
	Kotowuji Barat	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	610,39	III	
	Udiworowatu	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	604,79	III	
	Pautola	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	689,30	III	
	Ladolima	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	793,94	II	
	Kotodirumali	2,00	1,00	1,00	0,00	5,00	2,00	3,00	2,00	691,18	III	
	Keli	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	529,26	III	
	Lewangera	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	677,93	III	
	Wajo	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	906,53	II	
	Ngera	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	500,14	III	
	Ladolima Timur	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	902,88	II	
	Ladolima Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	491,63	III	
	Paumali	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	363,30	III	
	Wajo Timur	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	345,21	III	
	Kecamatan Mauponggo	Aewoe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	901,71	II
		Bela	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	818,06	II
Wolokisa		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	970,98	II	
Wuliwalo		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	574,20	III	
Maukeli		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	742,43	III	
Lokalaba		2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	593,40	III	
Wolotelu		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	543,29	III	
Mauponggo		2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	1955,38	I	
Sawu		2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1227,21	II	
Jawapogo		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	995,93	II	
Lajawajo		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	903,94	II	
Ululoga		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	636,43	III	
Lodaolo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	675,94	III		

Kecamatan	Desa	X~11	X~12	X~13	X~14	X~15	X~16	X~17	X~18	Σ X~1-X~18	Kelas Hirarki
	Woloede	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	492,62	III
	Woewolo	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1715,79	II
	Selalejo	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	790,14	II
	Ua	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1345,35	II
	Keliwatulewa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	649,83	III
	Kotagana	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	564,83	III
	Wololelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	985,49	II
	Selalejo Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	649,91	III
Kecamatan Nangaroro	Podonura	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	580,57	III
	Tonggo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	533,04	III
	Riti	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1162,93	II
	Wokodekororo	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	470,34	III
	Wokowoe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	447,18	III
	Degalea	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	369,95	III
	Kotakeo	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	576,19	III
	Kotakeo I	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	499,90	III
	Kotakeo li	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	510,27	III
	Pogomogo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	685,31	III
	Nangaroro	3,00	2,00	1,00	1,00	9,00	12,00	4,00	1,00	1801,36	I
	Nataute	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	352,59	III
	Utetoto	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	334,03	III
	Odaute	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	195,61	III
	Bidoa	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	440,62	III
	Ulupulu	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	683,83	III
Woedoa	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	738,64	III	
Ulupulu I	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	813,22	II	
Woewutu	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	593,32	III	
Kecamatan Wolowae	Natatoto	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	501,35	III
	Anakoli	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	305,66	III
	Totomala	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	489,81	III
	Tendatoto	2,00	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	540,73	III

Kecamatan	Desa	X~11	X~12	X~13	X~14	X~15	X~16	X~17	X~18	$\Sigma X\sim 1-X\sim 18$	Kelas Hirarki
	Tendakinde	2,00	0,00	1,00	0,00	4,00	2,00	2,00	1,00	781,84	III

Lampiran 3. Perbandingan data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa ke Kecamatan dan ke Kabupaten

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Luas Desa Ke Kecamatan (%)	Desa Ke Kabupaten (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Proporsi Penduduk Terhadap Kab (%)
Aesesa	Tedamude	849,00	24,02	5,55	1,70	35,35	0,58
	Tedakisa	997,00	29,35	6,78	2,08	33,97	0,69
	Dhawe	1.783,00	32,83	7,59	2,33	54,31	1,23
	Nggolombay	857,00	9,94	2,30	0,71	86,22	0,59
	Towak	1.020,00	37,19	8,59	2,64	27,43	0,70
	Nggolonio	1.445,00	32,58	7,53	2,31	44,35	0,99
	Waekokak	1.930,00	9,60	2,22	0,68	201,04	1,33
	Mbay II	1.302,00	29,12	6,73	2,07	44,71	0,90
	Mbay I	3.166,00	19,42	4,49	1,38	163,03	2,18
	Tonggurambang	1.253,00	11,03	2,55	0,78	113,60	0,86
	Marapokot	1.909,00	10,02	2,32	0,71	190,52	1,31
	Danga	7.186,00	19,22	4,44	1,36	373,88	4,94
	Lape	3.199,00	26,23	6,06	1,86	121,96	2,20
	Labolewa	1.880,00	58,16	13,44	4,13	32,32	1,29
	Olaia	1.742,00	35,22	8,14	2,50	49,46	1,20
	Ngegedhawe	990,00	17,00	3,93	1,21	58,24	0,68
	Aeramo	4.868,00	28,99	6,70	2,06	167,92	3,35
Nangadhero	1.736,00	2,87	0,66	0,20	604,88	1,19	
Aesesa Selatan	Rendutenoe	1.081,00	5,66	7,97	0,40	190,99	0,74
	Wajomara	703,00	4,30	6,06	0,31	163,49	0,48
	Langedhawe	652,00	4,00	5,63	0,28	163,00	0,45
	Rendututubhada	880,00	5,13	7,23	0,36	171,54	0,61
	Tengatiba	2.696,00	25,07	35,31	1,78	107,54	1,85
	Renduwawo	841,00	12,08	17,01	0,86	69,62	0,58
	Rendubutowe	1.238,00	14,76	20,79	1,05	83,88	0,85
Boawae	Rowa	1.291,00	25,00	7,97	1,77	51,64	0,89
	Solo	765,00	10,62	3,38	0,75	72,03	0,53
	Kelewae	1.443,00	18,76	5,98	1,33	76,92	0,99
	Leguderu	1.132,00	12,50	3,98	0,89	90,56	0,78
	Nagesepadhi	1.895,00	20,57	6,56	1,46	92,12	1,30
	Rigi	936,00	10,05	3,20	0,71	93,13	0,64
	Olakile	1.044,00	8,50	2,71	0,60	122,82	0,72
	Natanage	3.421,00	12,34	3,93	0,88	277,23	2,35
Nageoga	2.446,00	11,86	3,78	0,84	206,24	1,68	

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Luas Desa Ke Kecamatan (%)	Desa Ke Kabupaten (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Proporsi Penduduk Terhadap Kab (%)
	Wolopogo	1.246,00	5,00	1,59	0,35	249,20	0,86
	Rega	2.643,00	5,62	1,79	0,40	470,28	1,82
	Mulakoli	1.270,00	9,58	3,05	0,68	132,57	0,87
	Kelimado	1.505,00	6,25	1,99	0,44	240,80	1,04
	Wea Au	1.144,00	10,63	3,39	0,75	107,62	0,79
	Raja	1.181,00	10,15	3,23	0,72	116,35	0,81
	Raja Timur	913,00	10,51	3,35	0,75	86,87	0,63
	Raja Selatan	1.034,00	10,43	3,32	0,74	99,14	0,71
	Wolowea	1.255,00	4,00	1,27	0,28	313,75	0,86
	Wolowea Timur	871,00	6,25	1,99	0,44	139,36	0,60
	Wolowea Barat	840,00	3,50	1,12	0,25	240,00	0,58
	Rotongamobo	2.154,00	10,61	3,38	0,75	203,02	1,48
	Dhereisa	829,00	23,95	7,63	1,70	34,61	0,57
	Gerodhere	1.187,00	8,35	2,66	0,59	142,16	0,82
	Nagerawe	928,00	23,27	7,42	1,65	39,88	0,64
	Focolodorawe	821,00	18,00	5,74	1,28	45,61	0,56
	Alorawe	364,00	11,48	3,66	0,81	31,71	0,25
	Natanage Timur	2.182,00	6,02	1,92	0,43	362,46	1,50
Keo Tengah	Mbaenuamuri	1.276,00	3,12	4,50	0,22	408,97	0,88
	Witurombaua	1.220,00	8,25	11,89	0,59	147,88	0,84
	Kotowuji Timur	871,00	4,38	6,31	0,31	198,86	0,60
	Kotowuji Barat	715,00	2,75	3,96	0,20	260,00	0,49
	Udiworowatu	802,00	3,75	5,41	0,27	213,87	0,55
	Pautola	925,00	3,50	5,05	0,25	264,29	0,64
	Ladolima	818,00	2,00	2,88	0,14	409,00	0,56
	Kotodirumali	1.207,00	12,50	18,02	0,89	96,56	0,83
	Keli	825,00	6,50	9,37	0,46	126,92	0,57
	Lewangera	942,00	4,12	5,94	0,29	228,64	0,65
	Wajo	1.145,00	3,25	4,69	0,23	352,31	0,79
	Ngera	664,00	4,00	5,77	0,28	166,00	0,46
	Ladolima Timur	1.027,00	2,50	3,60	0,18	410,80	0,71
	Ladolima Utara	627,00	3,00	4,32	0,21	209,00	0,43
	Paumali	428,00	2,75	3,96	0,20	155,64	0,29
	Wajo Timur	430,00	3,00	4,32	0,21	143,33	0,30
	Mauponggo	Aewoe	1.132,00	2,98	2,91	0,21	379,87
Bela		1.017,00	3,27	3,19	0,23	311,01	0,70
Wolokisa		1.596,00	8,12	7,92	0,58	196,55	1,10
Wuliwalo		902,00	13,25	12,92	0,94	68,08	0,62
Maukeli		928,00	3,12	3,04	0,22	297,44	0,64
	Lokalaba	1.011,00	11,24	10,96	0,80	89,95	0,70

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Luas Desa Ke Kecamatan (%)	Desa Ke Kabupaten (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Proporsi Penduduk Terhadap Kab (%)
	Wolotelu	816,00	5,62	5,48	0,40	145,20	0,56
	Mauponggo	1.429,00	1,26	1,23	0,09	1.134,13	0,98
	Sawu	1.436,00	2,72	2,65	0,19	527,94	0,99
	Jawapogo	1.374,00	4,12	4,02	0,29	333,50	0,95
	Lajawajo	1.298,00	4,40	4,29	0,31	295,00	0,89
	Ululoga	909,00	4,58	4,47	0,32	198,47	0,63
	Lodaolo	950,00	4,38	4,27	0,31	216,89	0,65
	Woloede	694,00	4,37	4,26	0,31	158,81	0,48
	Woewolo	1.501,00	1,34	1,31	0,10	1.120,15	1,03
	Selalejo	1.420,00	9,95	9,71	0,71	142,71	0,98
	Ua	1.825,00	3,32	3,24	0,24	549,70	1,26
	Keliwatulewa	661,00	2,02	1,97	0,14	327,23	0,45
	Kotagana	878,00	6,87	6,70	0,49	127,80	0,60
	Wololelu	722,00	1,16	1,13	0,08	622,41	0,50
	Selalejo Timur	916,00	4,43	4,32	0,31	206,77	0,63
Nangaroro	Podonura	922,00	8,12	3,41	0,58	113,55	0,63
	Tonggo	804,00	5,62	2,36	0,40	143,06	0,55
	Riti	1.546,00	3,12	1,31	0,22	495,51	1,06
	Wokodekororo	729,00	7,25	3,05	0,51	100,55	0,50
	Wokowoe	776,00	10,88	4,57	0,77	71,32	0,53
	Degalea	679,00	14,38	6,04	1,02	47,22	0,47
	Kotakeo	906,00	6,95	2,92	0,49	130,36	0,62
	Kotakeo I	878,00	13,13	5,52	0,93	66,87	0,60
	Kotakeo II	765,00	6,18	2,60	0,44	123,79	0,53
	Pogomogo	1.582,00	33,13	13,92	2,35	47,75	1,09
	Nangaroro	3.071,00	23,75	9,98	1,68	129,31	2,11
	Nataute	748,00	15,00	6,30	1,06	49,87	0,51
	Utetoto	637,00	16,56	6,96	1,17	38,47	0,44
	Odaute	385,00	24,70	10,38	1,75	15,59	0,26
	Bidoa	901,00	16,16	6,79	1,15	55,75	0,62
	Ulupulu	1.259,00	14,54	6,11	1,03	86,59	0,87
	Woedoa	1.189,00	8,40	3,53	0,60	141,55	0,82
	Ulupulu I	1.311,00	5,96	2,50	0,42	219,97	0,90
Woewutu	837,00	4,20	1,76	0,30	199,29	0,58	
Wolowae	Natatoto	968,00	30,01	16,48	2,13	32,26	0,67
	Anakoli	542,00	14,02	7,70	0,99	38,66	0,37
	Totomala	966,00	58,03	31,87	4,12	16,65	0,66
	Tendatoto	1.186,00	46,31	25,43	3,29	25,61	0,82
	Tendakinde	1.480,00	33,72	18,52	2,39	43,89	1,02

Lampiran 3. Data PDRB

Lap Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstanta (Juta Rupiah) 2011-2015	KABUPATEN NAGEKEO				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	561.157,90	575.958,20	591.570,10	608.775,60	626.613,20
Pertambangan dan Penggalian	7.327,10	7.689,60	7.977,10	8.282,50	8.595,10
Industri Pengolahan	19.178,90	19.603,00	20.052,30	20.454,00	21.019,20
Pengadaan Listrik dan Gas	282,30	299,40	325,20	353,60	381,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	119,00	123,30	125,80	130,50	134,40
Konstruksi	45.797,50	48.485,50	51.267,90	53.968,50	56.973,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	50.919,80	53.526,90	56.499,70	59.542,90	62.116,20
Transportasi dan Pergudangan	29.454,30	30.416,80	31.281,00	32.405,10	33.600,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.342,70	1.407,10	1.473,30	1.538,30	1.606,70
Informasi dan Komunikasi	43.865,80	47.404,20	51.784,60	57.338,40	63.304,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.009,20	13.878,00	14.720,10	15.568,20	16.495,90
Real Estate	6.795,40	7.190,10	7.557,20	7.962,70	8.350,30
Jasa Perusahaan	453,60	458,80	472,50	483,40	497,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	162.883,90	177.974,30	193.937,90	209.473,30	226.587,20
Jasa Pendidikan	12.278,00	12.831,40	13.541,00	14.272,40	14.956,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	985,80	1.016,40	1.048,70	1.087,20	1.125,90
Jasa lainnya	1.875,70	1.925,90	1.966,60	2.012,30	2.091,50
PDRB	957.726,90	1.000.188,90	1.045.601,00	1.093.648,90	1.144.449,20

Lap Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstanta (Juta Rupiah) 2011-2015	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	14.244.976,82	14.669.948,11	15.069.630,22	15.610.964,65	16.067.626,21
Pertambangan dan Penggalian	664.143,65	705.179,29	740.639,07	780.665,28	830.760,74
Industri Pengolahan	587.146,65	622.392,40	652.631,66	674.620,78	709.889,56
Pengadaan Listrik dan Gas	25.370,84	27.776,93	29.844,29	34.109,88	37.587,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33.397,70	35.023,10	37.354,34	39.153,92	39.965,49
Konstruksi	4.834.570,44	5.178.453,66	5.450.012,45	5.733.391,46	6.032.814,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.090.748,39	5.422.061,66	5.825.755,76	6.121.599,25	6.494.621,61
Transportasi dan Pergudangan	2.296.963,65	2.402.908,84	2.536.165,63	2.702.256,68	2.850.508,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263.412,13	279.065,64	299.560,30	318.293,62	337.927,49
Informasi dan Komunikasi	3.756.156,43	4.023.034,15	4.268.913,34	4.595.314,31	4.923.562,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.561.621,81	1.730.922,67	1.933.750,03	2.058.287,35	2.176.828,13
Real Estate	1.235.446,20	1.311.293,90	1.383.084,22	1.402.817,86	1.456.810,53

Lap Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstanta (Juta Rupiah) 2011-2015	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jasa Perusahaan	135.154,35	143.028,47	150.346,00	157.716,09	164.983,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.571.012,71	5.968.135,98	6.405.819,96	6.785.670,31	7.266.516,72
Jasa Pendidikan	3.986.444,52	4.216.869,68	4.490.436,29	4.770.352,00	5.001.580,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	990.410,54	1.045.594,55	1.108.218,23	1.148.837,35	1.212.281,40
Jasa lainnya	1.057.150,69	1.081.498,50	1.123.026,84	1.172.220,46	1.215.833,76
PDRB	46.334.127,52	48.863.187,54	51.505.188,64	54.106.271,24	56.820.098,00

Lampiran 4. Data dan Hasil Analisis LQ

Data Hasil Komoditas Di Kabupaten Nagekeo 5 Tahun terakhir

Komoditas	2010	2011	2012	2013	2015
Padi	41.173	20.186	29.608	37.095	30.395
Jagung	11.990	12.439	13.804	19.179	9.940
Ubikayu	10.057	14.101	13.285	13.716	11.499
Ubijalar	1.971	1.794	2.591	1.760	1.689
Kedelai	115	102	41	26	40
Kacang Tanah	258	175	92	26	125
Kacang Hijau	113	114	113	172	71
Sorghum	55	43	23	6	14
Kelapa	1.559	2.405	8.008	2.997	4.156
Kopi	256	351	38.472	816	367
Kemiri	733	1.087	1.237	876	1.814
Cengkeh	204	186	371	192	589
Jambu Mete	1.225	1.226	1.236	980	1.134
Vanili	113	92	107	23	16
Coklat	591	579	2.195	258	525
Garam	802	0	1.853	2.304	0
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	12.680	106.157	161.006	1.111	0
Total	83.895	161.037	274.042	81.537	62.374

Data Hasil Komoditas Kecamatan Mauponggo

Komoditas	2010	2011	2012	2013	2015
Padi	4.156	2.845	2.168	1.557	1.180
Jagung	453	281	316	566	266
Ubikayu	1.012	345	935	372	271
Ubijalar	160	109	103	86	67
Kedelai	72	8	9	4	5
Kacang Tanah	9	4	6	4	6
Kacang Hijau	9	3	11	24	14
Sorghum	0	0	0	0	0
Kelapa	357	357	293	348	798
Kopi	120	120	125	75	125
Kemiri	3	357	206	246	417
Cengkeh	103	103	139	83	332
Jambu Mete	55	55	42	54	57
Vanili	50	35	0	4	1
Coklat	463	460	611	135	360
Garam	0	0	0	0	0
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0	0	0	0	0
Total	7.022	5.082	4.964	3.558	3.899

Hasil analisis LQ Kec. Mauponggo

Komoditas	LQ					Rata-Rata	Ket
	2010	2011	2012	2013	2015		
Padi	1,206	4,466	4,042	0,962	0,621	2,259	Basis
Jagung	0,451	0,716	1,264	0,676	0,428	0,707	Non Basis
Ubikayu	1,202	0,775	3,885	0,622	0,377	1,372	Basis
Ubijalar	0,970	1,925	2,195	1,120	0,635	1,369	Basis
Kedelai	7,481	2,485	12,118	3,526	2,000	5,522	Basis
Kacang Tanah	0,417	0,724	3,600	3,526	0,768	1,807	Basis
Kacang Hijau	0,952	0,834	5,374	3,198	3,155	2,702	Basis
Sorghum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Kelapa	2,735	4,704	2,020	2,661	3,072	3,038	Basis
Kopi	5,601	10,833	0,179	2,106	5,449	4,834	Basis
Kemiri	0,051	10,407	9,194	6,435	3,678	5,953	Basis
Cengkeh	6,033	17,548	20,684	9,907	9,018	12,638	Basis
Jambu Mete	0,536	1,422	1,876	1,263	0,804	1,180	Basis
Vanili	5,245	12,055	0,000	3,985	0,516	4,360	Basis
Coklat	9,364	25,175	15,367	11,991	10,971	14,574	Basis
Garam	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis

Data Hasil Komoditas Kec. Keo Tengah

Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Padi	332	305	451	414	307
Jagung	201	422	296	330	274
Ubikayu	793	1918	2091	1851	1159
Ubijalar	101	358	362	438	196
Kedelai	1	0	0	0	0
Kacang Tanah	0	0	0	0	0
Kacang Hijau	6	3	5	0	0
Sorghum	0	0	0	0	0
Kelapa	19,85	855	2137	729	1070
Kopi	20	28	33461	17	32
Kemiri	45,5	47	120	49	96
Cengkeh	25	16	58	18	84
Jambu Mete	19,85	20	86	20	23
Vanili	14,5	14	2	4	4
Coklat	59,5	58	86	53	53
Garam	0	0	0	0	0
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0	0	0	0	0
Total	1.638	4.044	39.155	3.923	3.298

Hasil analisis LQ Kec. Keo Tengah

Komoditas	LQ					Rata-Rata	Ket
	2010	2011	2012	2013	2015		
Padi	0,413	0,602	0,107	0,232	0,191	0,309	Non Basis
Jagung	0,859	1,351	0,150	0,358	0,521	0,648	Non Basis
Ubikayu	4,038	5,416	1,102	2,805	1,906	3,053	Basis
Ubijalar	2,624	7,946	0,978	5,172	2,195	3,783	Basis
Kedelai	0,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	Non Basis
Kacang Tanah	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Kacang Hijau	2,719	1,048	0,310	0,000	0,000	0,815	Non Basis
Sorghum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Kelapa	0,652	14,157	1,868	5,056	4,869	5,320	Basis
Kopi	4,001	3,177	6,087	0,433	1,649	3,069	Basis
Kemiri	3,180	1,722	0,679	1,163	1,001	1,549	Basis
Cengkeh	6,276	3,425	1,094	1,949	2,697	3,088	Basis
Jambu Mete	0,830	0,650	0,487	0,424	0,384	0,555	Non Basis
Vanili	6,585	6,060	0,131	3,615	4,881	4,254	Basis
Coklat	5,158	3,989	0,274	4,270	1,909	3,120	Basis
Garam	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis

Data Hasil Komoditas Kec. Nangaroro

Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Padi	437,00	322,00	442,00	508,00	550,00
Jagung	3.171,00	3.203,00	426,00	1.900,00	882,00
Ubikayu	3.158,00	4.203,00	5.821,00	5.697,00	3.389,00
Ubijalar	635,00	441,00	1.511,00	678,00	656,00
Kedelai	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00
Kacang Tanah	6,00	7,00	3,00	1,00	1,00
Kacang Hijau	8,00	13,00	27,00	66,00	7,00
Sorghum	23,00	25,00	17,00	0,00	0,00
Kelapa	432,99	443,00	570,00	426,00	1.055,00
Kopi	1,00	10,00	44,00	563,00	9,00
Kemiri	70,50	70,00	216,00	74,00	228,00
Cengkeh	25,00	16,00	54,00	37,00	53,00
Jambu Mete	253,00	253,00	225,00	246,00	271,00
Vanili	10,50	8,00	0,00	1,00	2,00
Coklat	7,10	6,00	146,00	10,00	18,00
Garam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.238	9.028	9.502	10.208	7.122

Hasil analisis LQ Kec. Nangaroro

Komoditas	LQ					Rata-Rata	Ket
	2010	2011	2012	2013	2015		
Padi	0,108	0,285	0,431	0,109	0,158	0,218	Non Basis
Jagung	2,693	4,593	0,890	0,791	0,777	1,949	Basis
Ubikayu	3,198	5,317	12,637	3,318	2,581	5,410	Basis
Ubijalar	3,281	4,385	16,819	3,077	3,402	6,193	Basis
Kedelai	0,000	1,399	0,000	0,307	0,219	0,385	Non Basis
Kacang Tanah	0,237	0,714	0,940	0,307	0,070	0,454	Non Basis
Kacang Hijau	0,721	2,034	6,891	3,065	0,863	2,715	Basis
Sorghum	4,259	10,371	21,317	0,000	0,000	7,189	Basis
Kelapa	2,828	3,286	2,053	1,135	2,223	2,305	Basis
Kopi	0,040	0,508	0,033	5,511	0,215	1,261	Basis
Kemiri	0,980	1,149	5,036	0,675	1,101	1,788	Basis
Cengkeh	1,248	1,534	4,198	1,539	0,788	1,862	Basis
Jambu Mete	2,103	3,681	5,250	2,005	2,093	3,026	Basis
Vanili	0,948	1,551	0,000	0,347	1,130	0,795	Non Basis
Coklat	0,122	0,185	1,918	0,310	0,300	0,567	Non Basis
Garam	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis

Data Hasil Komoditas Kec. Boawae

Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Padi	2.486,00	3.173,00	9.675,00	8.383,00	3.457,00
Jagung	3.004,00	5.389,00	4.142,00	7.740,00	2.767,00
Ubikayu	3.188,00	5.409,00	2.598,00	3.045,00	3.397,00
Ubijalar	895,00	763,00	565,00	423,00	636,00
Kedelai	28,00	67,00	24,00	19,00	27,00
Kacang Tanah	225,00	161,00	78,00	19,00	98,00
Kacang Hijau	57,00	61,00	54,00	27,00	20,00
Sorghum	24,00	18,00	2,00	5,00	11,00
Kelapa	581,00	581,00	1.581,00	1.200,00	980,00
Kopi	112,00	186,00	4.804,00	156,00	187,00
Kemiri	125,00	125,00	60,00	136,00	310,00
Cengkeh	51,00	51,00	120,00	54,00	120,00
Jambu Mete	85,00	85,00	288,00	87,00	94,00
Vanili	36,41	35,00	105,00	14,00	9,00
Coklat	49,99	46,00	1.317,00	50,00	74,00
Garam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.947	16.150	25.413	21.358	12.187

Hasil analisis LQ Kec. Boawae

Komoditas	LQ					Rata-Rata	Ket
	2010	2011	2012	2013	2015		
Padi	0,463	1,567	3,524	0,863	0,582	1,400	Basis
Jagung	1,920	4,320	3,236	1,541	1,425	2,488	Basis
Ubikayu	2,429	3,825	2,109	0,848	1,512	2,144	Basis
Ubijalar	3,480	4,241	2,351	0,918	1,927	2,583	Basis
Kedelai	1,866	6,550	6,312	2,790	3,455	4,194	Basis
Kacang Tanah	6,683	9,174	9,143	2,790	4,013	6,360	Basis
Kacang Hijau	3,866	5,336	5,153	0,599	1,442	3,279	Basis
Sorghum	3,344	4,174	0,938	3,181	4,021	3,132	Basis
Kelapa	2,855	2,409	2,129	1,529	1,207	2,026	Basis
Kopi	3,353	5,284	1,347	0,730	2,608	2,664	Basis
Kemiri	1,307	1,147	0,523	0,593	0,875	0,889	Non Basis
Cengkeh	1,916	2,734	3,488	1,074	1,043	2,051	Basis
Jambu Mete	0,532	0,691	2,513	0,339	0,424	0,900	Non Basis
Vanili	2,475	3,793	10,582	2,324	2,972	4,429	Basis
Coklat	0,649	0,792	6,470	0,740	0,721	1,874	Basis
Garam	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis

Data Hasil Komoditas Kec. Aesesa

Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Padi	32.868,00	12.829,00	16.159,00	25.627,00	23.967,00
Jagung	3.374,00	2.455,00	6.175,00	4.926,00	2.902,00
Ubikayu	697,00	1.509,00	941,00	1.118,00	2.031,00
Ubijalar	29,00	87,00	35,00	0,00	18,00
Kedelai	3,00	19,00	4,00	1,00	2,00
Kacang Tanah	6,00	2,00	3,00	1,00	2,00
Kacang Hijau	16,00	34,00	9,00	30,00	3,00
Sorghum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelapa	44,60	45,00	3.415,00	205,00	150,00
Kopi	1,00	3,00	38,00	3,00	11,00
Kemiri	170,00	170,00	580,00	171,00	299,00
Cengkeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jambu Mete	223,00	223,00	517,00	140,00	285,00
Vanili	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Coklat	3,10	2,00	28,00	2,00	8,00
Garam	2,00	0,00	28,50	2.110,00	0,00
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	10.930,00	106.157,00	161.006,00	1.111,00	0,00
Total	48.368	123.535	188.939	35.445	29.678

Hasil analisis LQ Kec. Aesesa

Komoditas	LQ					Rata-Rata	Ket
	2010	2011	2012	2013	2015		
Padi	1,385	0,828	0,792	1,589	1,657	1,250	Basis
Jagung	0,488	0,257	0,649	0,591	0,614	0,520	Non Basis
Ubikayu	0,120	0,140	0,103	0,188	0,371	0,184	Non Basis
Ubijalar	0,026	0,063	0,020	0,000	0,022	0,026	Non Basis
Kedelai	0,045	0,243	0,142	0,088	0,105	0,125	Non Basis
Kacang Tanah	0,040	0,015	0,047	0,088	0,034	0,045	Non Basis
Kacang Hijau	0,246	0,389	0,116	0,401	0,089	0,248	Non Basis
Sorghum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Kelapa	0,050	0,024	0,619	0,157	0,076	0,185	Non Basis
Kopi	0,007	0,011	0,001	0,008	0,063	0,018	Non Basis
Kemiri	0,402	0,204	0,680	0,449	0,346	0,416	Non Basis
Cengkeh	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Jambu Mete	0,316	0,237	0,607	0,329	0,528	0,403	Non Basis
Vanili	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	Non Basis
Coklat	0,009	0,005	0,019	0,018	0,032	0,016	Non Basis
Garam	0,004	0,000	0,022	2,107	0,000	0,427	Non Basis
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	1,495	1,304	1,450	2,300	0,000	1,310	Basis

Data Hasil Komoditas Kec. Aesesa Selatan

Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Padi	19	24	43	55	40
Jagung	1188	111	1044	2287	1184
Ubikayu	599	412	638	749	547
Ubijalar	101	0	15	135	116
Kedelai	11	0	4	1	5
Kacang Tanah	11	0	2	1	18
Kacang Hijau	17	0	4	25	27
Sorghum	8	0	4	1	3
Kelapa	45	45	11	46	48
Kopi	2	4	0	2	3
Kemiri	193,5	193	5	97	234
Cengkeh	0	0	0	0	0
Jambu Mete	237,5	238	4	173	143
Vanili	0	0	0	0	0
Coklat	2,55	2	0	3	6
Garam	0	0	0	0	0
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0	0	0	0	0
Total	2.435	1.029	1.774	3.575	2.374

Hasil analisis LQ Kec. Aesesa Selatan

Komoditas	LQ					Rata-Rata	Ket
	2010	2011	2012	2013	2015		
Padi	0,02	0,19	0,22	0,03	0,03	0,10	Non Basis
Jagung	3,41	1,40	11,68	2,72	3,13	4,47	Basis
Ubikayu	2,05	4,57	7,42	1,25	1,25	3,31	Basis
Ubijalar	1,77	0,00	0,89	1,75	1,80	1,24	Basis
Kedelai	3,30	0,00	15,07	0,88	3,28	4,51	Basis
Kacang Tanah	1,47	0,00	3,36	0,88	3,78	1,90	Basis
Kacang Hijau	5,18	0,00	5,47	3,32	9,99	4,79	Basis
Sorghum	5,01	0,00	26,87	3,80	5,63	8,26	Basis
Kelapa	0,99	2,93	0,21	0,35	0,30	0,96	Non Basis
Kopi	0,27	1,78	0,00	0,06	0,21	0,46	Non Basis
Kemiri	9,10	27,79	0,62	2,53	3,39	8,69	Basis
Cengkeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
Jambu Mete	6,68	30,38	0,50	4,03	3,31	8,98	Basis
Vanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
Coklat	0,15	0,54	0,00	0,27	0,30	0,25	Non Basis
Garam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis

Data Hasil Komoditas Kec. Wolowae

Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Padi	875	688	670	551	894
Jagung	599	578	1405	1430	1665
Ubikayu	610	305	261	884	705
Ubijalar	50	36	0	0	0
Kedelai	0	0	0	0	0
Kacang Tanah	1	1	0	0	0
Kacang Hijau	0	0	3	0	0
Sorghum	0	0	0	0	0
Kelapa	79	79	1	43	55
Kopi	0	0	0	0	0
Kemiri	125	125	50	103	230
Cengkeh	0	0	0	0	0
Jambu Mete	352	352	74	260	261
Vanili	0,35	0	0	0	0
Coklat	5,5	5	7	5	6
Garam	800	0	1824	194	0
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	1750	0	0	0	0
Total	5.247	2.169	4.295	3.470	3.816

Hasil analisis LQ Kec. Wolowae

Komoditas	LQ					Rata-Rata	Ket
	2010	2011	2012	2013	2015		
Padi	0,340	2,530	1,444	0,349	0,481	1,029	Basis
Jagung	0,799	3,450	6,494	1,752	2,738	3,047	Basis
Ubikayu	0,970	1,606	1,254	1,514	1,002	1,269	Basis
Ubijalar	0,406	1,490	0,000	0,000	0,000	0,379	Non Basis
Kedelai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Kacang Tanah	0,062	0,424	0,000	0,000	0,000	0,097	Non Basis
Kacang Hijau	0,000	0,000	1,694	0,000	0,000	0,339	Non Basis
Sorghum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Kelapa	0,810	2,439	0,008	0,337	0,216	0,762	Non Basis
Kopi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Kemiri	2,728	8,538	2,579	2,763	2,072	3,736	Basis
Cengkeh	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Non Basis
Jambu Mete	4,593	21,317	3,820	6,234	3,762	7,945	Basis
Vanili	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	Non Basis
Coklat	0,149	0,641	0,203	0,455	0,187	0,327	Non Basis
Garam	15,950	0,000	62,823	1,979	0,000	16,150	Basis
Budidaya Perikanan (Rumput Laut)	2,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,441	Non Basis